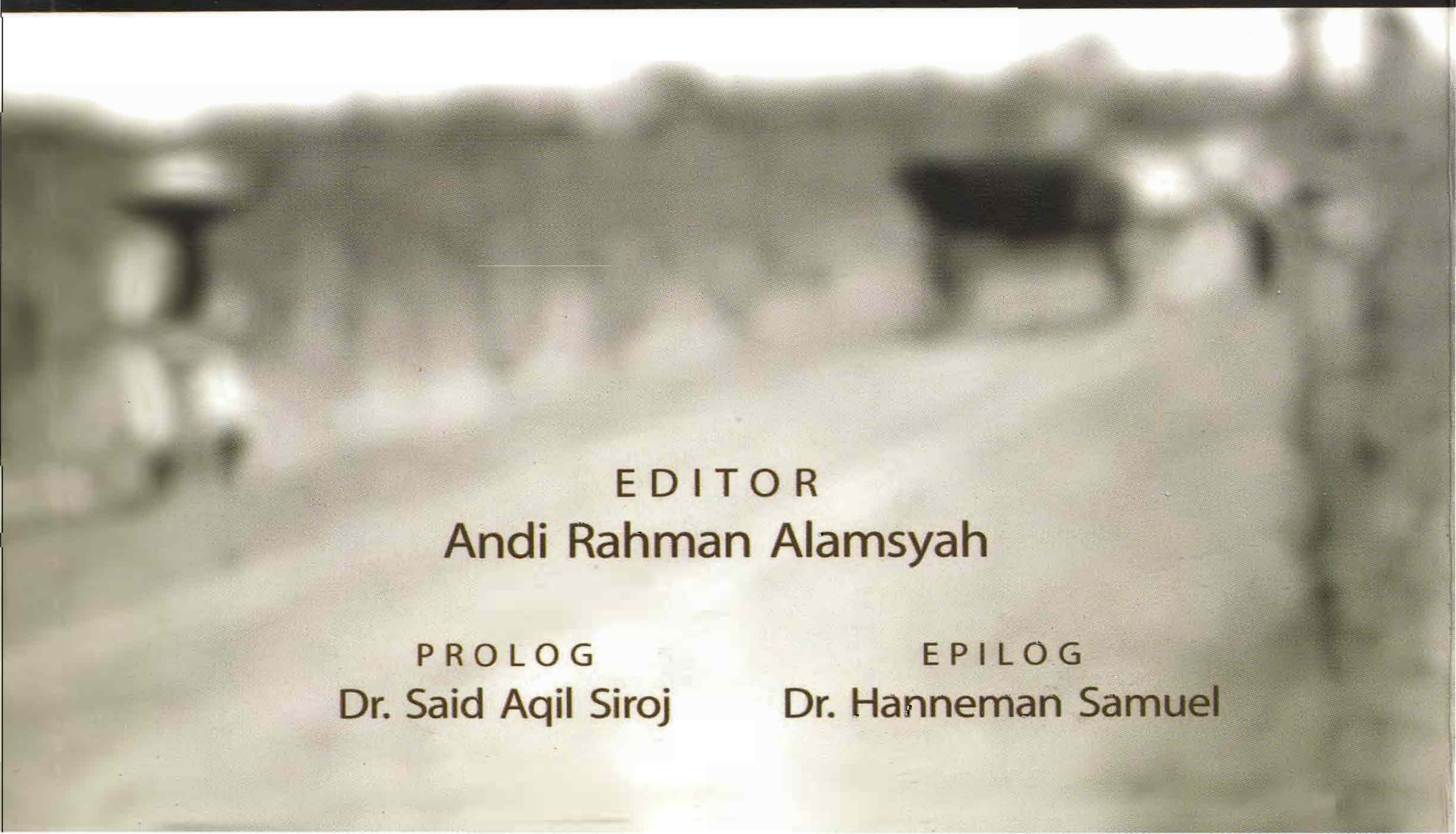


HITAM-PUTIH TEMBAKAU



EDITOR

Andi Rahman Alamsyah

PROLOG

Dr. Said Aqil Siroj

EPILOG

Dr. Hanneman Samuel

HITAM-PUTIH

TEMBAKAU

HITAM-PUTIH
TEMBAKAU

Editor: Andi Rahman Alamsyah

FISIP UI Press

HITAM-PUTIH TEMBAKAU

Editor
Andi Rahman Alamsyah

Layout dan perwajahan
Geger Riyanto (Penerbit Kepik)

Korektor
Muhammad Damm

Penerbit FISIP UI Press
Gedung A, FISIP UI Depok 16424
bekerja sama dengan LTN PBNU
Gedung PBNU lantai 5, Jl. Kramat Raya 164, Jakarta Pusat 10430

Cetakan pertama Oktober, 2011

Foto sampul depan atas adalah pemupukan tembakau di Indonesia, dan foto sampul depan bawah adalah perkebunan tembakau di Indonesia. Sumber: koleksi Tropenmuseum.

Hak cipta dilindungi undang-undang

Andi Rahman Alamsyah (editor)
Hitam-Putih Tembakau
Depok, *FISIP UI Press* 2011
xxii + 202 hlm.; 14 cm x 21 cm
ISBN: 978-979-1040-22-8

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan xi

Prakata xv

Prolog oleh Dr. Said Aqil Siroj
Menata Pertanian, Membangun Kesejahteraan xvii

1
Sebuah Potret Utuh 1

2
Pertanian Tembakau di Lima Wilayah Jawa 13

3
Tembakau: Tumpuan
Kesejahteraan dengan Beberapa Catatan 53

4
Petani dalam Sistem Perniagaan Tembakau 95

5
Tembakau dalam Denyut Budaya Kaum Tani 125

6
Negara di Ladang Tembakau 143

7
Tembakau, untuk Pertanian Indonesia 179

Epilog oleh Dr. Hanneman Samuel
Haruskah Petani Tembakau Mati
di Tangan Pengelola Globalisasi? 185

Daftar Pustaka 189

Profil Penulis 193

Indeks 195

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbandingan Luas Lahan
dan Produksi di Empat Kecamatan
Penghasil Tembakau dan Padi Terbesar di Sumedang 14

Tabel 2.2. Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga
Konstan di Kabupaten Sumedang Tahun 2009- 2013 18

Tabel 2.3. Kontribusi Dana Bagi Hasil
(Nonpajak) terhadap PAD Kabupaten Sumedang 19

Tabel 2.4. Perbandingan Kontribusi
Komoditas Tembakau dan Padi
terhadap Perekonomian Kabupaten Sumedang 20

Tabel 2.5. Jenis Tanaman Pertanian Utama di
Banyumeneng dan Sumberejo, Mranggen, Demak 25

Tabel 2.6. Produksi Tembakau, Padi,
dan Jagung di Tiga Kecamatan Penghasil
Tembakau di Demak Tahun 2009 25

Tabel 2.7. Jenis Komoditas Pertanian di Temanggung Berdasarkan Luas Lahan 29

Tabel 2.8. Penyerapan Tenaga Kerja Pertanian Tembakau dan Kopi 30

Tabel 2.9. Luas, Produksi, dan Jumlah KK Petani Tembakau di Temanggung 40

Tabel 2.10. Analisis Hasil Usaha Tani di Temanggung 40

Tabel 2.11. Luas Area Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Malang 43

Tabel 2.12. Perbandingan Kontribusi Pertanian dan Nonpertanian terhadap PDRB Kabupaten Malang (Tahun 2002-2009) 44

Tabel 2.13. Perbandingan Luas Area Tanam Beberapa Komoditas Andalan Pamekasan dan Total Produksi per Tahun (Tahun 2006-2009) 49

Tabel 2.14. Perbandingan Kontribusi Komoditas Tembakau dan Garam terhadap Perekonomian Kabupaten Pamekasan 52

Tabel 3.1. Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Petani Tembakau dan Padi di Kabupaten Sumedang 57

Tabel 3.2. Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap/Penyewa Tanah dan Petani Penggarap/Pemilik Tanah di Mranggen, Demak 61

Tabel 3.3. Perbandingan Pendapatan Petani Tembakau dan Nontembakau (Jagung/Padi) di Mranggen, Demak 64

Tabel 3.4. Pendapatan Petani Tembakau dari Usaha Tembakau dan Nontembakau di Temanggung 71

Tabel 3.5. Pendapatan Petani Kopi dari Usaha Kopi dan Nonkopi di Temanggung 71

Tabel 3.6. Perbandingan Pendapatan Buruh Tani dan Petani Pemilik Lahan Tembakau, Padi, dan Tebu di Kabupaten Malang 78

Tabel 3.7. Pendapatan Buruh Tani dari Sektor Nonpertanian di Malang 81

Tabel 3.8. Perbandingan Pengeluaran Rutin Buruh Tani Tembakau, Padi, dan Tebu di Malang 83

Tabel 3.9. Perbandingan Pendapatan Petani Tembakau, Padi, dan Tebu di Malang 87

Tabel 3.10. Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Petani Pemilik Lahan dengan Buruh Tani Tembakau dan Garam di Pamekasan 92

Tabel 6.1.Kebijakan Pemerintah terhadap Petani Tembakau dan Padi di Sumedang 147

Tabel 6.2. Respons Para Pihak dalam Pertanian Tembakau di Sumedang terhadap Kebijakan Pengendalian Tembakau 148

Tabel 6.3. Kebijakan/Program Pemerintah dalam Sektor Pertanian Tembakau dan Nontembakau di Kabupaten Demak 150

Tabel 6.4. Penerimaan DBHCHT Kabupaten Temanggung 155

Tabel 6.5. Peran Pemerintah dalam Pertanian Tembakau, Padi, dan Tebu di Malang 164

Tabel 6.6.Peran Pemerintah dalam Pertanian Tembakau dan Garam di Pamekasan 171

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1. Alur Perdagangan Tembakau di Sumedang 96

Bagan 4.2. Alur Perdagangan Padi di Sumedang 97

Bagan 4.3. Hubungan Vertikal Petani di Mranggen, Demak 103

Bagan 4.4. Alur Perdagangan Tembakau di Temanggung 110

Bagan 4.5. Alur Perdagangan Tembakau di Malang 116

Bagan 4.6. Alur Perdagangan Padi di Malang 118

Bagan 4.7. Alur Perdagangan Tebu di Malang 118

Bagan 4.8. Alur Perdagangan Tembakau di Pamekasan 120

Bagan 4.9. Alur Perdagangan Garam di Pamekasan 124

DAFTAR SINGKATAN

AEKI : Asosiasi Exportir Kopi Indonesia
AMTI : Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia
APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APEKI : Asosiasi Petani Kopi Indonesia
APTI : Asosiasi Petani Tembakau Indonesia
APTN : Asosiasi Pedagang Tembakau Nasional
APTP : Asosiasi Petani Tembakau Pamekasan
Balittas : Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat
BANSER : Barisan Ansor Serbaguna
Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKPM : Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLBU : Bantuan Langsung Benih Unggul
BPD : Badan Perwakilan Desa
BPS : Badan Pusat Statistik
DBHCHT : Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Dinas
Parsenibud : Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya
Dishutbun : Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Disperbunhut : Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
Disperindag : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Distan : Dinas Pertanian
dpl : di atas permukaan laut

DPR : Dewan Perwakilan Daerah
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FCTC : *Framework Convention on Tobacco Control*
FGD : *Focus Group Discussion*
GAPPRI : Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia
GG : Gudang Garam
GTI : Gerakan Tani Indonesia
ha : hektar
HAKI : Hak Kekayaan Intelektual
HGU : Hak Guna Usaha
HKTI : Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
Kabid : Kepala Bidang
Kadiskes : Kepala Dinas Kesehatan
KK : Kepala Keluarga
KPH : Kesatuan Pemangku Hutan
KTA : Kartu Tanda Anggota
KUD : Koperasi Unit Desa
KUTP : Komisi Urusan Tembakau Pamekasan
LKPJ : Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban
LPP NU : Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama
mm : milimeter
MUI : Majelis Ulama Indonesia
NRT : *Nicotine Replacement Treatment*
P2BN : Peningkatan Produksi Beras Nasional
PAD : Pendapatan Asli Daerah
PB NU : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PC NU : Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
PDIP : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

Pemkab	: Pemerintah Kabupaten
Perda	: Peraturan Daerah
Permenkeu	: Peraturan Menteri Keuangan
Permentan	: Peraturan Menteri Pertanian
PG	: Pabrik Gula
PHBM	: Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PPH	: Petugas Pengendali Hama
PPL	: Petugas Penyuluh Lapangan
PTPN	: Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
Renstra	: Rencana Strategis
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPP	: Rencana Peraturan Pemerintah
RUU	: Rancangan Undang-Undang
Setda	: Sekretariat Daerah
SLPTT	: Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu
Suseda	: Survei Sosial Ekonomi Daerah
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
UIM	: Universitas Islam Madura
UMR	: Upah Minimum Regional
Unisma	: Universitas Islam Malang
UNM	: Universitas Negeri Malang
UU	: Undang-Undang
VO	: *voor oogst*

PRAKATA

Buku ini adalah hasil konversi dari laporan penelitian LTN PBNU tentang dinamika kehidupan petani tembakau dan nontembakau di Sumedang, Demak, Temanggung, Malang, dan Pamekasan. Buku ini memuat berbagai hal yang terkait dengan aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya, baik pertanian tembakau maupun nontembakau. Dalam buku ini digambarkan kompleksitas pertanian tembakau maupun nontembakau. Harapannya, kompleksitas tersebut menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan atau program yang berkaitan dengan pertanian, khususnya pertanian tembakau. Tanpa mempertimbangkan kompleksitas itu, alih-alih menjadi jalan keluar atas persoalan, setiap kebijakan atau program yang dilakukan malah akan memunculkan persoalan baru. Kebijakan pengendalian tembakau berpotensi untuk ke arah sana.

Para peneliti sekaligus penyusun buku ini adalah Abdul Azis Muslim (penelitian di Sumedang), Zaenal Abidin E.P. (Demak), Feri Suprapto (Temanggung), Audriane F. Sani (Malang), dan Abdil Mughis Mudhoffir (Pamekasan). Andi Rahman Alamsyah merancang dan memimpin penelitian ini sekaligus mengedit laporan penelitian dari berbagai daerah tersebut hingga menjadi buku.

Terimakasih kepada Ketua Umum PBNU Dr. Said Aqil Siraj dan Dr. Hanneman Samuel (staf pengajar di Departemen Sosiologi FISIP UI) yang masing-masing telah memberikan prolog dan epilog untuk buku ini. Terima kasih pula untuk berbagai pihak, terutama para narasumber dan asisten lokal, yang telah membantu dalam penelitian di Sumedang, Demak, Temanggung, Malang, dan Pamekasan, juga pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya penerbitan buku ini.

Selamat membaca.

Jakarta, 19 September 2011

PROLOG

MENATA PERTANIAN, MEMBANGUN KESEJAHTERAAN

Dr. Said Aqil Siroj
(Ketua Umum PBNU)

Puji syukur Alhamdulillah, *Lajnah Ta'lif wan Nasyr* (LTN) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berhasil merampungkan penelitian yang dapat berwujud menjadi satu buku yang berbasis hasil riset. Buku ini penting untuk dibaca semua elemen anak bangsa setidaknya untuk mengingatkan kembali tentang jati diri sebagai bangsa agraris.

Indonesia adalah negara agraris. Sektor pertanian dengan berbagai komoditasnya mempunyai kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Hampir 50% masyarakat Indonesia melibatkan diri di sektor pertanian. Saya sendiri pun merasa sangat akrab dengan kelompok yang menamakan dirinya petani, pedagang, konsultan atau penyuluh, peneliti, pengusaha, buruh, dan lainnya. Ragam profesi yang mengaitkan diri dengan sektor pertanian adalah fakta sosial indikator vitalnya dunia pertanian di Indonesia.

Buku ini menyoroti kehidupan sosial ekonomi petani tembakau, satu komoditas pertanian penting di negeri ini. Kontribusi tembakau terhadap perekonomian lokal maupun nasional cukup menonjol. Tembakau juga mampu membangun jaringan sosial, bahkan menjadi kultur yang mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat. Di beberapa daerah, seperti Sumedang, Temanggung, Kudus, Malang, Pamekasan,

dan tempat lainnya, tembakau menjadi komoditi dominan yang menggerakan kehidupan masyarakat.

Cerita petani tembakau dalam buku ini idealnya dibaca oleh pemerintah, baik pihak eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dunia pertembakauan di Indonesia mempunyai cerita panjang. Pada cerita tersebut pemerintah ikut serta menjadi aktor, bahkan dalam konteks tertentu, menjadi sutradara. Selepas membaca buku ini mestinya pemerintah tidak lagi menambah cerita panjang kegetiran dunia pertembakauan di Indonesia melalui kebijakan dan segala peraturannya yang kontroversial. Masyarakat kelas bawah, terutama buruh pabrik rokok dan petani tembakau, sudah lama menginginkan ketenangan dan kesejahteraan hidup.

Di samping dunia pertembakauan, pertanian padi juga mempunyai problem besar yang harus dipikul para petaninya. Upaya pemerintah membebaskan tarif bea masuk beras melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.241 Tahun 2010 dari semula Rp 450 per kilogram menjadi nol, dipahami sebagai pengamanan stok dan pengendalian inflasi beras. Kenyataannya bea masuk impor nol persen lebih dari sekedar pengendalian inflasi beras tapi memukul harga beras maupun gabah pada masa panen.

Selama pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu kita mengenal Inpres No 13/2005, Inpres No 3/2007, Inpres No 1/2008, Inpres No 8/2008 dan Inpres No 7/2009. Sisi menonjol dari Inpres ini adalah amanah pengamanan harga beras, gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) melalui patokan harga yang kemudian disebut harga pembelian pemerintah (HPP). Amanah Badan Usaha Logistik (Bulog) sebagai otoritas pangan untuk mengamankan

harga di tingkat produsen pada besaran HPP menurut Inpres yang berlaku untuk beras kualitas medium.

Inpres No 7/2009 yang diundangkan akhir Desember 2009 dan berlaku 1 Januari 2010 mematok HPP GKP, GKG, dan beras Rp 2.640, Rp 3.345, dan Rp 5.060 per kilogram. Janji kesejahteraan ini setara kenaikan 10% dibandingkan Inpres No 8/2008 yang digantikannya. Ajakan untuk melakukan introspeksi, menakar ulang kelayakan Inpres No 7/2009 dalam hal ini sudah tentu erat kaitannya dengan besaran HPP dan proporsionalitasnya.

Saya bertanya kepada Prof. Maksum, Guru Besar Universitas Gadjah Mada, yang juga salah seorang Ketua PBNU tentang HPP sekarang yang sudah 10% lebih besar dibandingkan dengan HPP menurut Inpres No 8/2008, apakah ini perbaikan? Menurut Prof. Maksum, ini tidak cukup berarti dan tidak pantas diukur dengan besaran harga dunia karena tingkat subsidi dan proteksi perberasan mereka yang tinggi dibanding Indonesia. Ditambah lagi dengan pertimbangan sosial ekonomi Indonesia, dalam kaitannya dengan kesempatan kerja dan luasan pemilikan lahan.

Pertanian garam di Indonesia juga menghadapi persoalan pelik. Bentangan pantai Indonesia yang potensial tidak mampu menjadikan Indonesia sebagai produsen garam yang handal. Pemerintah tidak membangun infrastruktur pertanian garam. Akibatnya petani garam mengalami stagnasi. Jangankan bersaing dengan petani garam asing, berkembang pun tidak mampu. Regulasi memang sudah ada, namun pada praktiknya masih merugikan petani garam. Sebaliknya hingga saat ini Indonesia harus mengimpor garam untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu negara pengimpor garam Indonesia adalah Australia. Negeri

Kanguru itu mampu memproduksi garam dalam jumlah besar hingga menjadi negara pengekspor garam terbesar di dunia bermula dari keseriusan pemerintahnya membangun infrastruktur industri garam. Australia menggunakan pipa masuk ke laut hingga 5 km untuk mengambil air laut yang bersih dan memompanya di pabrik garam yang berteknologi tinggi.

Industri garam dengan dukungan infrastruktur akan mampu meningkatkan efisiensi sehingga harga di pasaran dapat bersaing tanpa harus merugikan petani garam. Sebagai perbandingan, harga garam impor hasil olahan teknologi Rp 800,- perkilo gram, sedangkan garam lokal produk tradisional tanpa dukungan infrastruktur Rp 850 per kilogram. Pemerintah pun mengimpor garam sebesar 150 ribu ton mulai Oktober hingga Desember 2010.

Nasib petani tebu juga tidak berbeda jauh dengan petani lainnya. Petani tebu terkait dengan industri gula nasional karena bahan baku gula di Indonesia adalah tebu. Indonesia memiliki banyak pabrik gula namun kapasitas produksinya tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi gula nasional. Pada awal 1998 industri gula di ambang kehancuran karena nota komitmen Pemerintah dengan *International Monetary Fund* (IMF) yang menghapuskan bea masuk gula impor dan melepaskan tata niaga gula dan beras dari monopoli Bulog. Kebijakan bea masuk impor gula nol persen diulang kembali di era KIB. Kali ini gula rafinasi yang semula hanya untuk industri makanan dan minuman diimpor hingga masuk ke pasaran Indonesia.

Keuntungan bertani tebu sepintas menguntungkan. Namun menurut hasil penelitian Lily Koesuma Widiastuty, tebu pun masih jauh dari harapan petani. Tebu bukan

tanaman yang efisien dan profit, yang dihasilkan relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang didapat apabila petani menanam padi dan kedelai. Pemerintah pun ikut campur tangan dalam industri gula, seperti kebijakan gula impor dan impor gula rafinasi. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 257 Tahun 2004 memang mengatur bahwa gula rafinasi hanya untuk industri makanan dan minuman. Namun faktanya beberapa media menemukan fakta gula rafinasi dijual bebas di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali.

Walhasil, buku ini berangkat dari niatan baik, yaitu menggugah semua pihak, terlebih pemerintah, agar memperhatikan petani. Kalaupun masih belum mampu memperhatikan seyogyanya memberikan dukungan, minimal dukungan yang bersifat tidak mengganggu kaum petani. Semoga bermanfaat.

1

Sebuah Potret Utuh

Tembakau. Sepucuk tanaman. Sebuah komoditas. Menghidupi puluhan ribu keluarga petani—dan ini bukan sesuatu yang dilebih-lebihkan. Mengunjungi wilayah-wilayah sentral penanaman tembakau, kita, orang luar, akan tercengang melihat bagaimana tanaman ini telah melesap ke dalam darah-daging warga sekitar. Slametan, hajatan spiritual, depresi massal, kebiasaan sepele sehari-hari; nyaris setiap partikel kehidupan warga wilayah produksi tembakau amat ditentukan oleh naik-turunnya harga komoditas tanaman tersebut yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Beberapa tahun belakangan ini, rokok, produk yang memungkinkan tembakau memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, dihadang oleh regulasi-regulasi kesehatan nasional dan internasional. Kontroversi pengendalian tembakau di Indonesia bermula dari adanya Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (*The WHO Framework Convention on Tobacco Control/WHO FCTC)* yang menempatkan tembakau sebagai zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan. Perdebatan itu yang membuat Indonesia, meski merupakan salah satu inisator WHO FCTC, hingga kini belum mera-

tifikasi konvensi tersebut. Alasan kesehatan menjadi dalih utama pendukung ratifikasi.

Barisan rapat yang lantang mengampanyekan pengendalian tembakau percaya rokok mengganggu kesehatan mereka yang mengonsumsinya—terhitung juga para perokok pasif yang sama sekali tak menikmati kepulan asap tersebut. Pembaca tentunya pernah menjumpai poster kampanye kesehatan yang memajang gambar tubuh para perokok, dan melihat bagaimana organ-organ tubuh para perokok digambarkan compang-camping tidak karuan. Asap rokok mencabik-cabik tubuh para pengonsumsinya dari dalam, begitulah kira-kira citra dampak negatif rokok yang diyakini berbagai pihak.

Namun, bukan berarti semuanya percaya dan satu suara dengan argumentasi-argumentasi kesehatan yang dipaparkan oleh para pelaku kampanye antirokok. Jelas saja. Para penolak ratifikasi WHO FCTC memandang konvensi ini dan turunannya dalam RPP dan RUU Tembakau di Indonesia hanya akan menyengsarakan masyarakat kelas bawah saja, terutama buruh pabrik rokok dan petani tembakau yang akan kehilangan pekerjaannya. Tak sedikit suara miring bermunculan dari mereka yang menggantungkan periuk nasinya dari industri rokok. Ada yang mendatangkan seorang kakek perokok berat berusia 90-an tahun dan bertubuh bugar, pada saat menuntut pengkajian ulang peraturan antitembakau. Tak sedikit yang meyakini, serangan terhadap rokok—khususnya jenis kretek yang kadar nikotinnya tinggi—merupakan bagian dari konspirasi besar perusahaan-perusahaan rokok putih yang memperluas pasar ke Indonesia. Sebuah proses pembunuhan besar-besaran, mereka percaya, sedang dilakukan oleh korporat global se-

cara senyap lewat jalur belakang, jalur legal-formal, lantaran pengusaha-pengusaha rokok dunia ini tidak sanggup mengambil alih perusahaan rokok lokal secara langsung.

Wanda Hamilton, dalam bukunya yang berjudul *Nicotine War* (2010), mengemukakan bahwa terlalu naif untuk melihat konvensi pengendalian tembakau semata berangkat dari dalih-dalih kesehatan. Aktivis yang memandang globalisasi dengan skeptis ini mengajak pembacanya menengok sisi lain dari kontroversi tembakau: ia tidak lain adalah pertarungan perusahaan-perusahaan raksasa global. Pendukung utama gerakan antitembakau adalah tiga perusahaan farmasi global (Novartis, Glaxo Wellcome, dan Pharmacia & Upjohn) yang, dipaparkan Hamilton, juga menjadi penyokong dana program pengendalian tembakau melalui Prakarsa Bebas Tembakau (*Free Tobacco Initiative*/FTI) dan melahirkan WHO FCTC. Perusahaan-perusahaan ini adalah produsen utama *Nicotine Replacement Treatment* (NRT), produk terapi pengganti nikotin yang diakui efektif memacu individu menghentikan kebiasaan merokok. Dengan kata lain, kampanye kemanusiaan antitembakau merupakan selubung pemasaran produk industri farmasi. Situasi ini digambarkan oleh Hamilton (2010) sebagai "perang nikotin", perang antara pedagang obat dengan pedagang rokok!

Kita, dalam buku ini, tidak akan masuk ke dalam perdebatan ekses rokok bagi kesehatan yang tampak tidak akan berujung dalam waktu dekat ini. Kita juga tidak akan mencoba menganalisis dinamika kepentingan korporat, sesuatu yang masih sukar untuk kita raba secara langsung, sulit untuk kita temukan bukti-bukti kuatnya. Meski bisa saja benar apa yang dipaparkan oleh para proponen kampanye pengendalian rokok bahwa nikotin menyebabkan gang-

guan-gangguan kesehatan yang serius; meski argumentasi-argumentasi mereka solid dan punya fondasi, buku ini akan memperlihatkan kehidupan para petani di wilayah yang perekonomiannya benar-benar bertumpu pada komoditas tembakau.

Selama ini, implikasi tidak langsung dan tidak disengaja dari kampanye antirokok adalah mendatangkan citra buruk kepada mereka yang terlibat dalam rantai produksi komoditas yang dituding merusak kesehatan sebagian warga dunia ini. Sekurang-kurangnya, dalam praktik di lapangan, kampanye ini begitu menggebu-gebu dalam mengekspos ekses produk jadi tembakau, ekses negatifnya bagi kesehatan yang tak jarang divisualisasikan dengan *horrific*, sehingga di sisi lain menghilangkan adegan-adegan bagaimana tembakau ini ditanam, dirawat dengan tekun oleh para petani, agar mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan layak.

Dalam buku ini, kita akan mendapati potret mereka yang seumur hidupnya menanam tembakau; inilah upaya untuk memperlihatkan perekonomian tembakau secara lebih utuh dan lengkap. Apa yang didesakkan oleh negara dan berbagai pihak yang mendukung regulasi pengendalian tembakau boleh jadi baik, tetapi kebijakan suatu negara tidak boleh tidak harus mengindahkan semua aspek yang terlibat di dalamnya. Mempertimbangkan separuh-separuh, mempertimbangkan hanya dua-tiga persen dari 250 juta penduduk dalam pembuatan kebijakan, katakanlah, hanya akan mengerucutkan kebijakan yang fatal, bahkan terbilang otoriter.

Pertama-tama, jelas, Indonesia adalah negara agraris. Sektor pertanian memegang peran yang tak tergantikan

dalam pembangunan. Data BPS 2010 memperlihatkan, sektor pertanian mendominasi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Sampai dengan Februari 2010, sekitar 42,8 juta orang atau 40% dari total angkatan kerja nasional (107,4 juta orang) terserap oleh sektor ini. Dalam perjalanan darat antarkota di Indonesia, sebagian besar waktu akan kita habiskan dengan melihat sawah yang menghampar tak habis-habis. Itulah realitas Indonesia.

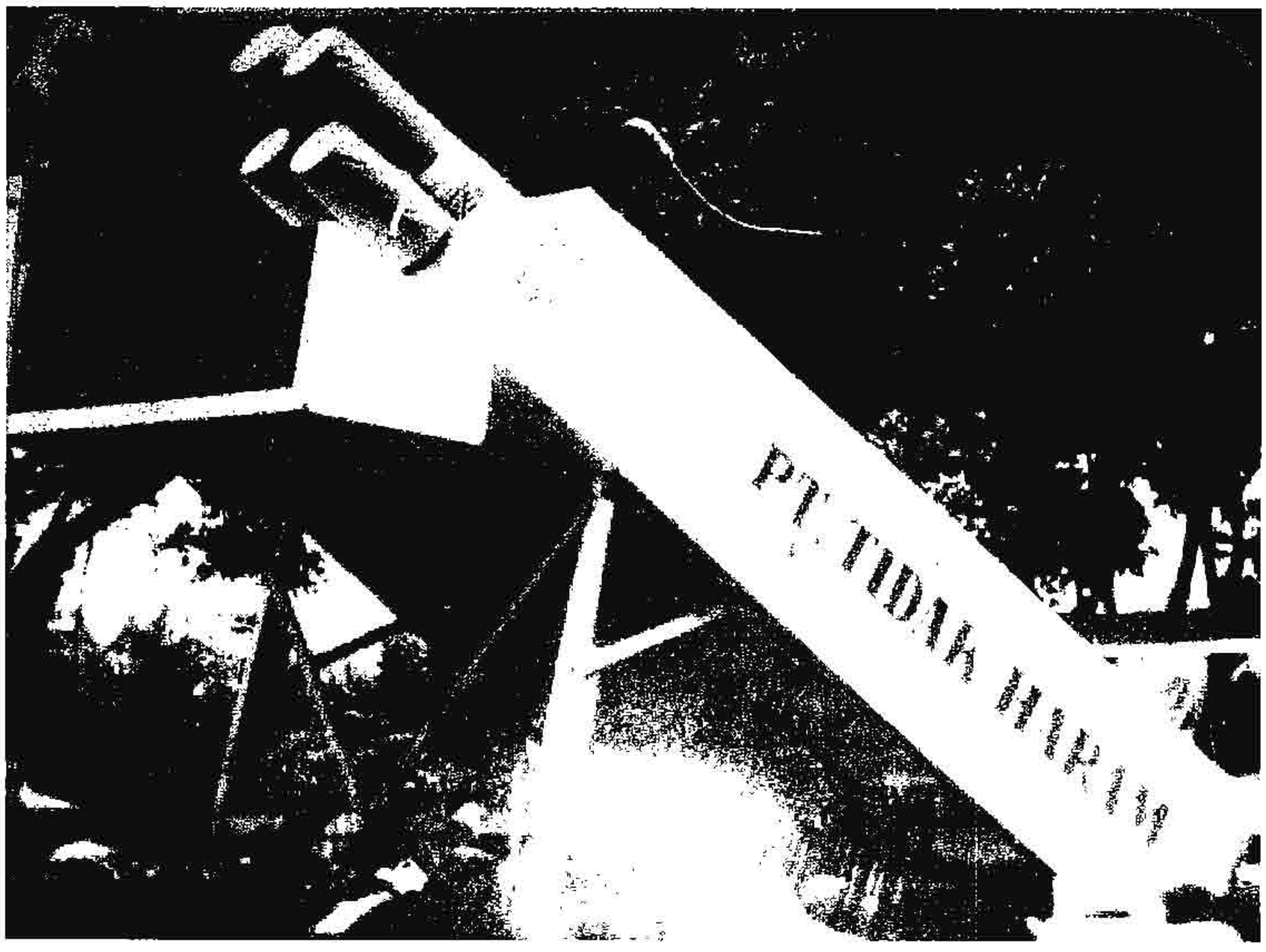
Di antara berbagai komoditas pertanian, tembakau adalah salah satu komoditas yang sangat penting kontribusinya terhadap perekonomian. Belum lagi, kemampuannya dalam membangun jaringan sosial, bahkan menjadi kultur yang mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat. Di beberapa daerah, seperti Temanggung dan Pamekasan, tembakau bahkan menjadi komoditas dominan yang menggerakkan kehidupan masyarakatnya. Secara nasional, pendapatan pemerintah dari cukai rokok pada tahun 2010 sebesar Rp 62,14 triliun atau melampaui target yang ditetapkan ABPN-Perubahan sebesar Rp 59,26 triliun, membuatnya menjadi penyumbang terbesar kedua setelah Migas (http://www.tempointeraktif.com, 21/12/2010).

Di mata internasional, Indonesia adalah negara dengan sederet prestasi di bidang pertembakauan; sebagai produsen tembakau terbesar keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Brasil, dan Zimbabwe; konsumen rokok terbesar ketiga dunia (*Jawa Pos*, 22 Agustus 2010); pemilik pabrik rokok terbanyak dunia termasuk di dalamnya pabrik kelas rumahan (*Kompas*, 14 Januari 2010). Artinya, Indonesia adalah salah satu pemasok tembakau maupun pasar potensial produk berbahan tembakau terbesar di dunia.

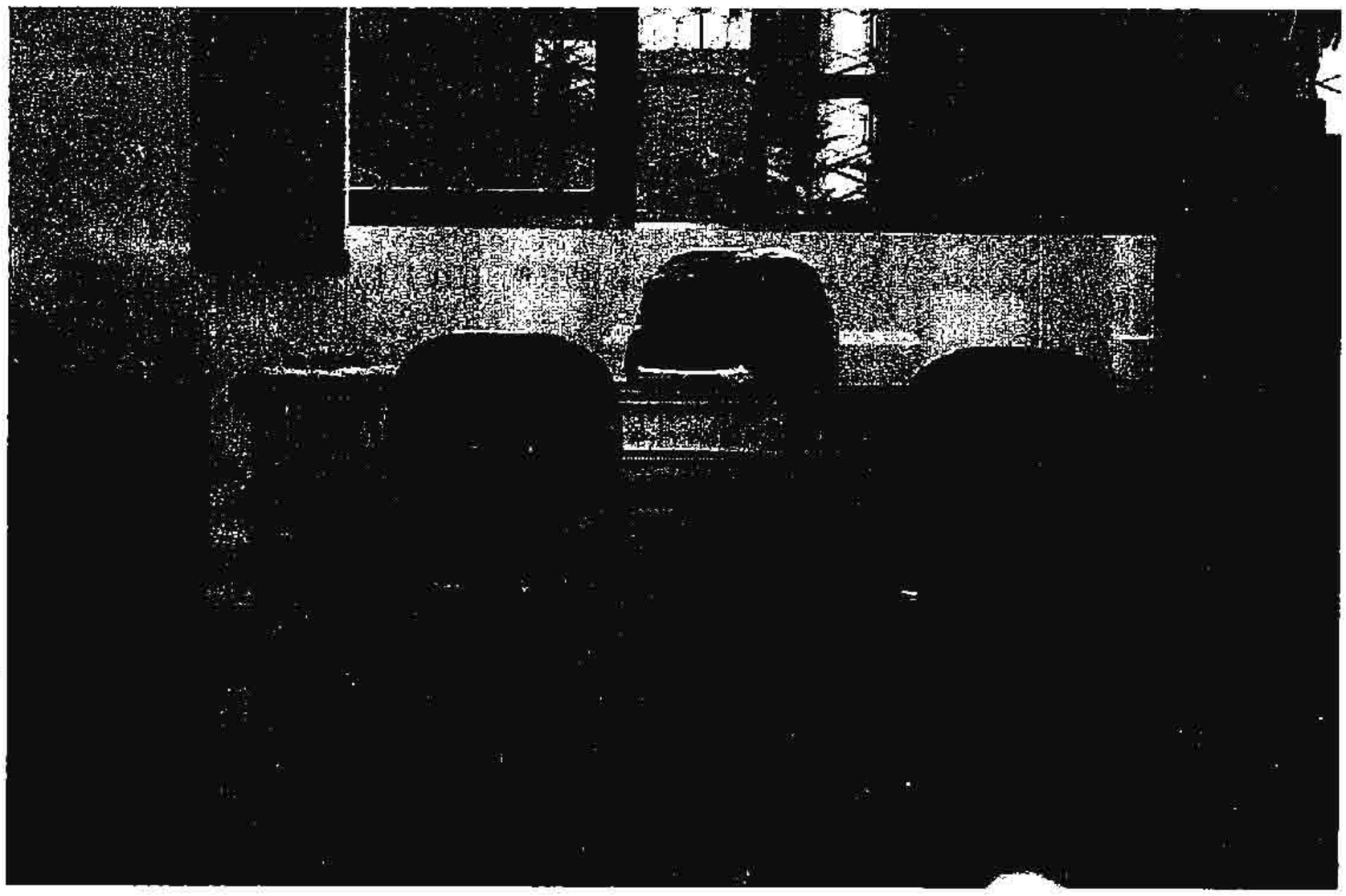
Kita belum masuk dalam seluk-beluk kehidupan para petani tembakau, warga negara yang hak hidupnya paling terancam oleh ekses-ekses ekonomi kebijakan pengendalian tembakau, tetapi, sedikit data makro ini saja telah menjelaskan betapa pentingnya komoditas ini bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Tak usah membawa-bawa praduga adanya kepentingan global atau gurita korporasi dunia yang hendak membelitkan tentakelnya di salah satu negara pengonsumsi tembakau terbesar ini, data yang terang ini sudah dengan sendirinya mempertanyakan, menggugat, memblejeti nalar politik yang mendasari kebijakan-kebijakan pengendalian tembakau.

Meski berangkat dari alasan-alasan kesehatan dan konvensi internasional yang telah disebutkan di atas, fundamen-fundamen ini belum cukup kokoh untuk menjustifikasi tindakan negara yang akan mencacah-cacah pilar perekonomiannya sendiri hingga hak-hak sosial-ekonomi warga negaranya. Barangkali, memang, rokok merusak kesehatan. Penyakit-penyakit yang dideretkan di bawah sebuah bungkus rokok bisa jadi memang mengancam mereka yang menghisap dan mendapatkan kenikmatan darinya. Tetapi, mengendalikan tembakau, tanpa pandang bulu, hanya akan meninggalkan kerusakan yang lebih dahsyat dan brutal lagi. Ini menyangkut nasi yang terhidang di atas piring keluarga para petani yang selama hidupnya menggantungkan hidup pada tembakau.

Kebijakan pengendalian ini memang ditopang oleh beberapa hasil penelitian yang menempatkan pertanian tembakau tidak kompetitif secara ekonomi, yang pada gilirannya berdampak pada kehidupan petani tembakau. Upah petani tembakau terendah di antara enam komoditas pertanian



Aksi keprihatinan petani tembakau



Ukiran Tembakau, simbol Kabupaten Temanggung, di meja Setda
(foto: Syukron)

(tebu, kelapa sawit, teh, kopi, coklat, tembakau) (Kompas, 29/2/2009). Menurut penelitian Lembaga Demografi FEUI, 66 persen buruh tani tembakau berpendidikan SD atau tidak sekolah sama sekali dan 58 persennya masih tinggal di rumah berlantai tanah (Kompas, 24/11/2010). Akan tetapi, kita juga memiliki data yang, hingga tingkat tertentu, dapat membantah berbagai hasil penelitian tersebut, selain juga akan menemukan secara langsung bagaimana di sejumlah wilayah—Sumedang, Temanggung, Demak, Malang, dan Pamekasan—faktanya, tembakau menjadi energi utama perekonomiannya. Regulasi tembakau bisa jadi mengoyak urat nadi vital yang menyuplai darah bagi perekonomian wilayah-wilayah ini.

Berbicara tentang peran pemerintah, di beberapa wilayah, memang ada pemerintah daerah yang berkontribusi dalam mengembangkan pertanian tembakau. Akan tetapi, kebanyakan pemerintah daerah tidak memiliki perhatian yang memadai, baik dalam mengembangkan pertanian tembakau maupun nontembakau. Sebagai bagian dari regulasi pengendalian tembakau, pemerintah mengampanyekan beberapa program yang membuatnya tampak mempunyai visi dan perhatian kepada kehidupan warganya. Beberapa di antaranya, pengalihan ke tanaman lain, diversifikasi produk jadi tembakau, dan sebagainya. Dalam kenyataannya, ini semua tidak ditangani dengan serius. Program-program hanya mendatangkan pertanyaan ketimbang jawaban; di manakah negara ketika nafas warganya hendak diputus oleh peraturan-peraturan yang dibuatnya?

Sekali lagi, tulisan ini tidak menempatkan diri dalam posisi sepakat atau tidak dengan argumentasi kesehatan yang menjadi arsenal utama dalam kebijakan pengendalian

tembakau. Dengan menengok arti tak tergantikan tembakau bagi wilayah-wilayah sentral produksi komoditas tersebut, tulisan ini hendak berbicara bahwa yang paling pertama dan utama dilukai oleh pengontrolan tembakau adalah hak asasi para petani selaku warga negara Indonesia. Jelas-jelas, kebijakan pengendalian tembakau akan mencabut mereka dari sumber penghidupannya; dan lagi, negara nyaris tak memberikan jalan keluar, lepas tangan. Membiarkan orang-orang kecil itu, yang selama ini tak pernah merepotkan pemerintah, habis-habisan mencari jalan keluarnya masing-masing dari api yang telah disulut oleh negara.

PENGUMPULAN DATA

Data dalam buku ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan sepanjang Februari 2011. Penelitian tersebut dilakukan di lima wilayah yang dikenal sebagai daerah pertanian, utamanya tembakau, di Jawa, yaitu Sumedang (Jawa Barat), Demak dan Temanggung (Jawa Tengah), serta Malang dan Pamekasan (Jawa Timur). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik, seperti wawancara, wawancara berkelompok, *Focus Group Discussion (*FGD*)*, pengamatan (observasi), dan studi dokumen. Data diperoleh dari narasumber (informan) yang terbagi atas dua kelompok, yaitu utama (inti) dan pendukung. Narasumber utama pada masing-masing wilayah meliputi petani pemilik lahan tembakau, petani penggarap (penyewa lahan, buruh tani tembakau, serta petani pemilik lahan nontembakau, petani penggarap dan buruh tani nontembakau. Sedangkan narasumber pendukung men-

cakup pihak-pihak yang relevan dalam konteks pertanian tembakau dan nontembakau, seperti aparat pemerintah, pengamat pertanian, pedagang tembakau, grader, dan sebagainya. Berikut adalah uraian tentang pengumpulan data pada masing-masing wilayah.

Dalam penelitian di Sumedang, narasumber penelitian terdiri dari dua kelompok informan, yaitu informan inti dan pendukung. Informan inti meliputi tiga petani tembakau dan tiga petani padi. Petani tembakau mencakup petani pemilik lahan dan buruh tembakau. Sedangkan untuk petani padi, narasumbernya adalah pemilik lahan, buruh tani sekaligus penyewa lahan, dan buruh tani yang bukan penyewa atau pemilik lahan. Dalam pertanian tembakau, petani pemilik atau penyewa lahan terkadang juga merupakan buruh tani tembakau.

Narasumber pendukung adalah ketua kelompok tani tembakau Mekarwangi dan Gabungan Kelompok Tani Sinar Harapan dari Kecamatan Ujung Jaya; petugas penyuluh lapangan (PPL) pertanian dari Unit Pelaksana Teknis Badan untuk Kecamatan Ujung Jaya dan Tomo; aparat Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya (Dinas Parsenibud); ketua APTI Kabupaten Sumedang dan APTI Provinsi Jawa Barat; anggota DPRD Kabupaten Sumedang; pengurus HKTI Kecamatan Ujung Jaya; ketua MWC NU Kecamatan Ujung Jaya dan ketua PC NU Kabupaten Sumedang; pemilik toko pertanian Cahaya Rezeki Tani yang selama ini banyak memberikan bantuan modal untuk petani tembakau di Cipinangpait.

Dalam penelitian di Demak, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah perpaduan antara studi dokumen, observasi, wawancara mendalam, dan FGD. Wawancara mendalam dilakukan terhadap para individu yang terkait langsung dengan pertanian di wilayah Banyumeneng dan Sumberejo. Mereka adalah petani penggarap, tengkulak, petugas penyuluh pertanian Kecamatan Mranggen, dan perangkat desa. Jumlahnya 13 orang. Meski informan yang terlibat dalam FGD sebanyak 38 orang, tetapi yang aktif hanya sekitar 10 orang; dari 10 orang ini yang berasal dari Banyumeneng 5 orang (petani, petani penggarap, dan aparat desa), Sumberejo 2 orang (petani tembakau), Girikusumo 1 orang (petani), dan Mranggen 2 orang (wartawan dan pengurus NU lokal).

Narasumber inti dalam penelitian di Malang terdiri atas empat orang pemilik lahan dan empat orang buruh tani/penggarap lahan. Mereka terbagi atas empat orang petani tembakau, dua orang buruh tani tembakau, serta petani padi dan tebu. Narasumber pendukung sebanyak tujuh orang, mencakup petani, pengusaha, tengkulak tembakau, ahli pertanian, dan aparat pemerintahan. Sedangkan untuk FGD, yang berpartisipasi sebanyak dua belas orang. Mereka terdiri atas petani tembakau, petani padi, pemilik lahan tebu, penggarap dan buruh tani, pengamat pertanian independen, dan pengepul tembakau.

Narasumber inti dalam penelitian di Temanggung terdiri dari empat orang petani tembakau dan empat orang petani kopi. Dari empat petani tembakau tersebut, dua orang adalah pemilik lahan di atas 1 ha, dua lainnya di bawah 1 ha. Demikian halnya dengan petani kopi, dua narasumber memiliki lahan di atas 1 ha dan dua lainnya di

bawah 1 ha. Pengumpulan data di Temanggung dilakukan dengan pengamatan, wawancara, wawancara berkelompok, dan FGD. Observasi dilakukan untuk mengamati keadaan rumah, kondisi lahan pertanian, dan keadaan fasilitas umum. Wawancara dilakukan di rumah masing-masing informan. Adapun wawancara berkelompok dilakukan di rumah salah satu informan dengan mengacu pada pedoman wawancara. FGD dilakukan di STAINU Temanggung dengan melibatkan para pihak yang terlibat dalam pertanian tembakau, seperti aparat Disperbunhut, pengurus APTI, petani tembakau dari Lereng Sumbing dan Sindoro, dan petani kopi Gesing.

Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian di Pamekasan adalah *Klebun Desa* (Kepala Desa) Tambung, Carik Desa Tambung, petani tembakau, karyawan pabrik rokok Gudang Garam (GG), Mantan Ranting GG, petani garam, petani tembakau di Kadur, Manajer Sampoerna, Kadishutbun, Mantan Kadishutbun, Kadisperindag, Kadiskes, Kadistan, Ketua APTP, dan Ketua KUTP, dan dosen pertanian Universitas Islam Madura (UIM). Adapun narasumber yang menjadi partisipan FGD diambil dari empat dusun di Desa Tambung (Dusun Biris Dajah, Biris Laok, Ninggara, dan Rengoh) dengan kategori pedagang, petani pemilik lahan yang kaya, petani pemilik lahan kecil, dan buruh tani. Per dusun terdiri atas empat orang partisipan, sehingga jumlah total peserta FGD adalah enam belas orang.

2

PERTANIAN TEMBAKAU DI LIMA WILAYAH JAWA

SUMEDANG

Sumedang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang sangat potensial untuk sektor pertanian. Luas lahan tanaman padi sawah yang tersebar di 26 kecamatan Kabupaten Sumedang mencapai 69.366 ha dengan kapasitas produksi sebesar 437.209 ton, dan lahan tanaman padi ladang mencapai luas 8.781 ha dengan kapasitas produksi 25.002 ton. Sementara, tanaman tembakau yang tersebar di 26 kecamatan mencakup lahan seluas 2.496 ha dan memiliki kapasitas produksi 22.996 ton. Dari 26 kecamatan tersebut, produksi tanaman padi dan tembakau terbesar tersebar di Kecamatan Jatigede, Tomo, Ujung Jaya, dan Tanjungsari (lihat Tabel 2.1).

Tabel 2.1.
Perbandingan Luas Lahan dan Produksi di Empat Kecamatan Penghasil Tembakau dan Padi Terbesar di Sumedang

Kecamatan	Tembakau		Padi	
	Luas area (ha)	Produksi (ton)	Luas area (ha)	Produksi (ton)
Tanjungsari	202	1.939	1.397	8.759
Jatigede	384	3.571	2.355	14.913
Tomo	386	3.551	2.529	16.197
UjungJaya	197	1.832	4.587	29.302

Sumber: diolah dari data Dishutbun Kabupaten Sumedang 2010.

Dalam sejarahnya, tembakau masuk ke Sumedang, khususnya Kecamatan Tanjungsari, bermula pada masa sebelum kemerdekaan dengan digelarnya pasar tembakau di Desa Mariuk, Distrik Tanjungsari, yang sekarang disebut Desa Margaluyu, Kecamatan Tanjungsari. Pada waktu itu para penjualnya berdatangan menggunakan *oblok* (pikulan). Pasar tersebut dikenal sebagai pasar *bako omprongan*. Para pedagangnya berasal dari Cigasti, Cicalengka, Majalaya, dan Cijambu. Setelah kemerdekaan, Gerakan Tani Indonesia (GTI) memelopori pindahnya pasar tembakau ke Lanjung, Desa Tanjungsari. Pasar tersebut lantas berkembang menjadi pasar tembakau berskala provinsi, menghimpun pedagang dan pembeli dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Semakin berkembangnya pasar tembakau di Lanjung, Tanjungsari, menarik perhatian para petani Sumedang untuk membudidayakan serta mengolah tembakau; dimulai dari wilayah Cijambu, dengan produknya yang terkenal, tembakau *mole* Gunung Putri, dan terus menyebar ke wilayah lain di Kabupaten Sumedang.

Pada tahun 1965, pasar tembakau pindah ke Pasar Tanjungsari, dekat alun-alun Tanjungsari. Pada tahun 1986,

pasar ini dipindah ke Pasar Baru, dan pada 2002 dipindah lagi ke pasar khusus tembakau bernama Pusat Agrobisnis Tembakau Jawa Barat. Pusat Agrobisnis Tembakau yang dibangun baru-baru ini memungkinkan pembudidayaan dan pengolahan tembakau *mole* kian berkembang, serta membuka pemasarannya hingga ke luar Jawa Barat (Dishutbun Kabupaten Sumedang-APTI Sumedang 2010: 18-19).

Dari segi iklim, tanaman tembakau dapat tumbuh di dataran rendah hingga dataran tinggi, yaitu 200-3.000 m di atas permukaan laut (dpl), dengan curah hujan rata-rata 2.000 mm per tahun untuk daerah dataran rendah dan 1.500-3.500 mm per tahun untuk daerah dataran tinggi. Tembakau dapat tumbuh pada suhu 18-32,3°C, dan suhu yang optimal bagi pertumbuhannya adalah 18-27°C. Tembakau juga memerlukan sinar matahari dan kelembaban yang cukup, tidak menghendaki pohon pelindung kecuali pelindung sementara setelah waktu tanam. Kabupaten Sumedang, yang merupakan daerah berbukit dan bergunung dengan ketinggian 25-1.667 m di atas permukan laut, memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Daerah Sumedang tergolong beriklim tipe C tropis dengan temperatur kelembaban 15-28°C, kelembaban antara 50-90%, dan curah hujan rata-rata 2.830 mm per tahun dengan enam bulan Bulan Basah dan enam bulan Bulan Kering.

Untuk jenis tanah, tembakau menghendaki struktur tanah yang subur dan gembur dengan drainase yang baik, serta jenis tanah aluvial (deli), andosol, dan podsolik (virginia). Karena perakarannya relatif dangkal, maka persediaan air yang cukup sangat diperlukan dalam pertumbuhan tembakau. Tanaman ini sangat peka terhadap drainase yang kurang baik. Tanah yang baik untuk tembakau adalah

tanah yang mudah meloloskan air. Tanaman tembakau tumbuh dengan optimal pada pH 5,5-6,5. Secara umum, kondisi tanah di Sumedang sangat cocok dan sesuai untuk tanaman tembakau.

Dari jumlah penduduk, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) tahun 2009 (*Sumedang dalam Angka* 2010: 29-33), jumlah total penduduk Kabupaten Sumedang 1.150.187 jiwa, terdiri dari 575.698 laki-laki dan 574.489 perempuan. Dari 26 kecamatan yang ada, Kecamatan Jatinangor memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu, 101.140 jiwa, dan Kecamatan Surian paling sedikit yaitu, 13.020 jiwa.

Dari jumlah penduduk sebanyak itu, yang bekerja di sektor pertembakauan, mulai dari produksi dan pembudidayaan adalah sebagai berikut: pemilik usaha produksi tembakau berjumlah 9.706 kepala keluarga (KK), dengan jumlah tenaga kerja mencapai 9.177 orang. Kalau diasumsikan setiap KK memiliki 5 anggota keluarga, maka jumlah total yang bekerja dalam sektor pertembakauan mencapai 48.530 jiwa (data Dishutbun Kabupaten Sumedang 2010). Pekerja di sektor pengolahan industri tembakau jumlahnya juga sangat besar. Jumlah total pemilik usaha pengolahan tembakau, yang terdaftar, di Kabupaten Sumedang sebanyak 43 pengusaha dengan jumlah tenaga kerja 220 orang. Menurut Ketua APTI Jawa Barat Srn (wawancara, 25 Februari 2011), jumlah total usaha pengolahan industri rokok, di luar yang terdaftar di Disperindag, mencapai 138, tetapi 8 di antaranya sudah bangkrut. Total penduduk yang bekerja di sektor pertembakauan kurang lebih mencapai sekitar 100 ribu orang, atau 9% dari total penduduk Kabupaten Sumedang.

Sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Sumedang memberikan kontribusi sebesar 29%-30% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Persentase tersebut menempatkan sektor ini pada urutan nomor satu dari 5 lapangan usaha penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Sumedang. Sumber PDRB terbesar kedua adalah sektor perdagangan, terutama hotel dan restoran, sedangkan urutan ketiga ditempati industri pengolahan. Pada tahun 2009, sektor pertanian menyumbangkan Rp 1,54 triliun dari total PDRB sebesar Rp 5,36 triliun. Selama lima tahun ke depan, proyeksi PDRB untuk sektor pertanian diperkirakan terus mengalami peningkatan sebesar Rp 1 miliar per tahun. Diperkirakan, PDRB sektor pertanian akan meningkat sebesar Rp 5 miliar pada 2013 dibandingkan dengan pendapatan sektor ini pada 2009.

Dari segi sumber pendapatan asli daerah, sektor pertanian juga memberikan kontribusi sangat besar. Dari total pendapatan daerah secara keseluruhan tahun 2010, Rp 54 miliar berasal dari dana bagi hasil, di antaranya, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 4,1 miliar.[1] Besarnya cukai tembakau membuktikan bahwa tanaman tembakau memberikan kontribusi sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

---

1 Lampiran Permenkeu No. 243/PMK 07/2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010 menyampaikan versi yang berbeda. Disebutkan bahwa total untuk Provinsi Jawa Barat adalah Rp 75.974.209.144 dengan alokasi untuk Kabupaten Sumedang sebesar Rp 4.726.553.370. Jumlah ini terbesar ke-4 setelah Bekasi, Karawang, dan Garut.

Tabel 2.2.
Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2009- 2013

Lapangan usaha	2009	2010	2011	2012	2013
- Pertanian	1.543.341	1.642.617	1.719.437	1.801.996	1.909.306
- Pertambangan dan penggalian	6.908	7.245	7.598	7.811	7.921
- Industri pengolahan	1.355.466	1.371.392	1.485.008	1.590.374	1.702.008
- Listrik, gas, dan air bersih	135.194	140.531	141.519	142.025	142.239
- Bangunan dan konstruksi	127.771	130.420	135.281	143.582	153.907
- Perdagangan, hotel, dan restoran	1.383.309	1.461.506	1.595.727	1.698.472	1.809.002
- Pengangkutan dan komunikasi	182.908	190.128	191.465	192.059	192.438
- Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	213.137	214.195	215.687	216.210	219.774
Jasa-jasa	417.868	434.363	437.418	438.487	439.641
- Jumlah (juta rupiah)	5.365.905	5.592.401	5.929.144	6.231.019	6.576.240

Sumber. RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013.
Keterangan: menggunakan asumsi berdasarkan data tahun 2004-2008.

Berdasarkan data Dishutbun Kabupaten Sumedang, jumlah lahan produktif yang ditanami tembakau seluas 2.296 ha, dengan jumlah produksi bahan mentah mencapai 21.071,85. Lahan tersebut dimiliki oleh 9.706 KK dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebesar 9.177 orang, yang tergabung dalam 90 kelompok tani. Jika diasumsikan setiap KK memiliki 3 orang anggota yang dipekerjakan (tidak terdaftar), maka ada 9.706 x 3 = 29.118 orang. Sedangkan dari sejumlah 9.177 orang tenaga kerja, jika diasumsikan tiap orang memiliki 4 anggota keluarga, maka total tenaga kerja yang terlibat sebanyak 9.177 x 4 orang = 36.708 orang.[2]

2 Adanya perbedaan jumlah penyerapan tenaga kerja antara data yang disajikan Dishutbun dengan data yang disampaikan ketua APTI Kabupaten Sumedang dise-

Tabel 2.3.
Kontribusi Dana Bagi Hasil (Nonpajak) terhadap PAD Kabupaten Sumedang

Uraian	Jumlah (Rp)		
Pendapatan daerah	Perubahan tahun anggaran 2008	Perubahan tahun anggaran 2009	Tahun anggaran 2010
- Pendapatan asli daerah	86.056.574.849	109.731,802.606	114.063.376.218
- Pajak daerah	24.766.128.945	28.006.018.959	34.932.494.948
- Retribusi daerah	45.233.774.844	63.257.875.369	7.456.551.422
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.792.970.141	3.418.832.959	2.800.000.000
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	13.263.700.919	15.049.075.319	68.874.329.848
- Dana perimbangan	705.294.752.080	723.597.060.576	755.193.196.769
- Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	52.516.220.080	53.820.147.576	54.852.529.769
- Dana alokasi umum	608,993,532.000	629.006.913.000	634.169.767.000
- Dana alokasi khusus	43.785.000.000	40.770.000.000	66.170.900.000
- Lain-lain pendapatan yang sah	99.898.515.500	121.455.293.487	92.687.964.960
- Hibah	9.000.000.000	-	-
- Dana darurat	-	-	-
- Dana bagi hasi pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	28.446.325.000	33.175.311.987	33.576.483.460
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus	6.005.962.680	35.300.000.000	22.201.500.000
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	56.446.227.820	52.979.981.500	36.909.981.500
- Jumlah pendapatan daerah	891.249.842.430	954.784.156.670	961.944.537.948

Sumber: APBD Kabupaten Sumedang 2010.

babkan data Dishutubun hanya menghitung jumlah pekerja yang terlibat pada saat proses budidaya tembakau (tanam dan panen), sedangkan versi ketua APTI menghitung mulai dari proses budidaya, pengolahan, perdagangan, dan pemasaran.

Tabel 2.4.
Perbandingan Kontribusi Komoditas Tembakau dan Padi terhadap Perekonomian Kabupaten Sumedang

Indikator	Tembakau	Padi
PNBP	Cukai tembakau melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten Sumedang Rp 4,1 miliar dari total DBHCHT Provinsi Jawa Barat Rp 81 miliar	-
PDRB	Tidak ada data khusus kontribusi tembakau terhadap PDRB	Tidak ada data khusus tentang kontribusi padi terhadap PDRB
Penciptaan lapangan kerja	Untuk lahan 1 ha dibutuhkan 70 orang untuk penyiangan, 15-20 orang untuk penyemprotan, 150 orang untuk buruh cangkul	Untuk lahan 1 ha dibutuhkan 25 orang tenaga kerja dengan rincian buruh tanam 6 orang, buruh popok 6 orang, biaya garet 3 orang, buruh semprot 12 orang
Pendapatan rumah tangga untuk lahan ½ -1 ha	Biaya tanam ½ ha = Rp 3 juta-an, kalau menghasilkan tembakau yang baik; dijual dalam bentuk batangan bisa mendapatkan Rp 9 juta-an. Dalam kondisi hasil jelek, tembakau masih menguntungkan atau paling tidak impas, tidak sampai merugi	Lahan ½ ha biaya tanam 6 kuintal padi atau Rp 2,4 juta. Hasil padinya 2,5 ton, kalau dijual laku Rp 4,5 juta. Untuk buruh padi dibayar dengan sistem bagi hasil (bawon) 7:1. Artinya 7 kg untuk pemilik 1 kg untuk buruh padi

Sumber: diolah dari data sekunder, hasil wawancara, FGD, dan observasi 15-26 Februari 2011.

Dibandingkan dengan pertanian padi, pertanian tembakau menyerap lebih banyak tenaga kerja. Menurut ketua APTI Kabupaten Sumedang yang juga pedagang dan pengolah hasil tembakau, proses penyerapan tenaga kerja sektor pertembakauan sangat panjang, mulai dari masa tanam, masa petik, perajangan, pengangkutan di pasar tembakau, pengolahan, proses pengemasan hingga produk jadi, sampai tahap pemasaran. Semuanya dikerjakan oleh orang yang berbeda dalam jumlah yang sangat besar (wawancara dengan Ujr, 26 Februari 2011).

DEMAK

Kabupaten Demak terletak di pesisir utara Jawa Tengah, berbatasan dengan ibu kota Jawa Tengah, Semarang. Kabupaten ini terkenal sebagai pusat pertanian Jawa Tengah. Beberapa jenis tanaman pertanian dapat dijumpai di wilayah ini seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kedelai, sorgum dan tembakau yang tergolong tanaman perkebunan semusim (*Demak dalam Angka* 2010: 191). Di beberapa wilayah di kabupaten ini juga dikembangkan jenis tanaman buah, seperti belimbing dan klengkeng.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Demak berupa lahan sawah, luasnya 50.360 ha atau 56,12% dari wilayah ini, selebihnya adalah lahan kering (*Demak dalam Angka* 2010: 2). Adapun luas tanah yang ditanami tembakau mencapai 2.232 ha, yang meliputi Kecamatan Mranggen 492 ha, Karangawen 1.405 ha, dan Guntur 335 ha (*Demak dalam Angka* 2010: 211). Khusus untuk kecamatan Mranggen, tahun ini lahan tembakau diperkirakan meluas menjadi 760 ha (wawancara dengan petugas penyuluh lapangan/PPL Kecamatan Mranggen, 22 Februari 2011). Sistem pengairan untuk lahan tersebut adalah pengairan teknis 36,5%, tadah hujan 34,58%, dan setengah teknis 15,62%. Daerah yang cocok untuk ditanami tembakau adalah daerah tadah hujan seperti di tiga kecamatan paling selatan Demak, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Tembakau, para penduduk Demak mengira-ngira, telah ada di wilayah ini sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Para petani dan pengusaha pada zaman pemerintahan Hindia Belanda memperkenalkan tanaman tembakau

di wilayah ini dan sekitarnya seperti Weleri (Kendal) dan Temanggung. Salah seorang sesepuh desa, Asw, yang sekarang sudah berusia di atas 70 tahun, mengaku dulu ayahnya yang berasal dari Temanggung menanam tembakau ketika pindah ke daerah Mranggen. Ia menduga, ayahnya melakukan hal ini karena banyak orang di Temanggung, daerah asal ayahnya, juga bertanam tembakau. Jika dirunut, tembakau di Mranggen sudah berusia kira-kira lebih dari satu abad (wawancara dengan Asw, 24 Februari 2011).

Sebagai catatan tambahan, di wilayah utara Demak hasil pertanian meningkat drastis sejak dibangunnya Waduk Kedungombo. Wilayah yang dialiri sungai dari Waduk Kedungombo meliputi Kecamatan Sayung, Demak, Bonang, Mijen, dan beberapa kecamatan lain. Daerah-daerah utara ini merupakan sentra tanaman padi di Demak, dan karena itu harga sewa tanahnya pun cukup tinggi, mencapai Rp 15 juta/*bahu*/tahun (wawancara dengan Sn, 22 Februari 2011).

Demak, secara umum, berciri agraris. Bila menelusuri jalanan antarkecamatan di kabupaten ini, kita hanya akan menemukan lahan persawahan yang menghampar luas, beserta beberapa bangunan gudang dan pabrik. Bahkan, bila berjalan ke arah selatan, dari arah Demak ke Mranggen, melewati Pasar Buyaran, lalu Kecamatan Guntur, Kecamatan Karangawen, hingga tiba di Mranggen; atau dari pertigaan Onggorawe, melewati Kecamatan Sayung menuju Mranggen, sejauh mata memandang yang terhampar di kanan dan kiri jalan semata lahan persawahan.

Jumlah penduduk Demak, menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak (November 2010) 1.208.670 jiwa, meliputi 340.570 KK. Adapun total

penduduk kecamatan Mranggen berjumlah 159.832 jiwa (http://www.demakkabupatengo.id/statistik-kependudukan.html, diunduh 2 Maret 2011).

Di wilayah Banyumeneng, yang menjadi salah satu situs penggalian data, dapat dijumpai lahan pertanian tembakau. Namun, warga yang berprofesi sebagai petani tembakau dapat dihitung dengan jari. Desa ini terletak tepat di pinggir kawasan Hutan Barang, yang masuk dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang. Hutan ini menghubungkan wilayah Semarang, Demak, Purwodadi dan Blora. Pemandangan sebaliknya justru terlihat di Sumberejo, desa di sebelah Banyumeneng, yang warganya dikenal gemar bertanam tembakau. Menurut aparat Desa Banyumeneng, ketika musim tanam tembakau, 99% petani Sumberejo bertanam tembakau.

Jenis pekerjaan di Desa Banyumeneng cukup beragam. Ada dua lembaga pendidikan cukup besar di desa ini yang menyediakan pendidikan dari jenjang TK hingga SMU, yaitu Yayasan Ki Ageng Giri dan Yayasan Al-Hadi. Dua lembaga ini menyerap peserta didik utamanya dari masyarakat Mranggen. Selain itu, dua lembaga ini juga banyak menyerap tenaga kerja dari Banyumeneng. Tak sedikit penduduk desa yang menjadi guru, tata usaha, pengelola kantin, dan sebagainya. Kedekatan desa ini secara geografis dengan Kota Semarang juga memungkinkan banyak warganya untuk bekerja sebagai buruh pabrik maupun tukang bangunan di kota tersebut. Tapi, pada umumnya, warga tetap memiliki lahan pertanian. Mereka tetap memiliki sawah sebagai penopang utama ekonomi keluarga.

Kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Demak setiap tahunnya berasal dari sektor pertanian, yaitu menca-

pai 43%. Besarnya kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Demak menunjukkan bahwa sektor ini masih menjadi primadona dalam kegiatan ekonomi masyarakat Demak dan secara otomatis menyerap banyak tenaga kerja.

Selama lima tahun terakhir, PDRB Kabupaten Demak terus mengalami peningkatan. Tahun 2006, misalnya, PDRB Kabupaten Demak hanya sebesar Rp 3,997 triliun. Namun, pada 2007 meningkat menjadi Rp 4,337 triliun, dan pada 2008 Rp 4,945 triliun. Pada 2009, PDRB Kabupaten Demak meningkat lagi menjadi Rp 5,393 triliun (http://www.jatengprov.go.id/?document_srl=5170, diunduh 3 Maret 2011). Dengan demikian terlihat bahwa paling tidak selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi masyarakat Demak semakin membaik.

Wilayah Mranggen dan sekitarnya bertumpu pada sektor pertanian. Dapat dipastikan, 90% dari warga Desa Banyumeneng maupun Desa Sumberejo yang berada di wilayah Mranggen menggantungkan hidupnya dari pertanian. Lahan pertanian di Desa Banyumeneng mencapai 696 ha, sementara di Sumberejo seluas 889 ha, sehingga mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja di dua desa tersebut.

Setiap tahunnya, petani menanam padi maupun jagung dan kedelai selama dua musim tanam yang disebut *labuh* dan *rendeng* (penghujan). Masing-masing musim itu berlangsung tiga sampai empat bulan. Lebih kurang enam bulan berikutnya adalah saatnya bertanam tembakau. Musim tembakau di sini lebih pendek umurnya daripada musim tembakau di tempat lain seperti Weleri (Kendal) dan Temanggung. Ada juga petani yang tidak bertanam tembakau, tetapi memilih tanaman jenis lain seperti kede-

lai, jagung, kacang tanah, kacang hijau, kacang panjang, dan lain-lain.

Tabel 2.5.
Jenis Tanaman Pertanian Utama di Banyumeneng dan Sumberejo, Mranggen, Demak

Jenis tanaman	Lama tanam (bulan)	Estimasi hasil per 1 ha (Rp)	Kebutuhan tenaga kerja per 1 ha (orang)	Keterangan
Jagung	3	4 ton/10 juta	15	Kebanyakan dijual
Padi	3	3,6 ton gabah kering/ 7.272.000	15	Rata-rata disimpan untuk kebutuhan sendiri
Tembakau	6	1,3 ton tembakau rajang kering/28,6 juta	20-30	Harganya fluktuatif, padat modal. Biaya modal dan tenaga kerja lebih besar daripada harga jual

Sumber: diolah dari hasil wawancara dan FGD.

Tabel 2.6.
Produksi Tembakau, Padi, dan Jagung di Tiga Kecamatan Penghasil Tembakau di Demak Tahun 2009

Kecamatan	Tembakau (ton)	Padi (ton)	Jagung (ton)
Mranggen	338,70	9,973	27,372
Karangawen	1,042,70	20,011	35,422
Guntur	321,60	37,609	18,231

Sumber: Demak dalam Angka 2010: 198, 199, dan 213.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jagung paling banyak dihasilkan di tiga kecamatan penghasil utama tembakau di Kabupaten Demak, disusul padi. Sebagai jenis tanaman perkebunan semusim, jumlah hasil panen tembakau dari tiga kecamatan di wilayah ini berada di bawah tanaman nontembakau. Akan tetapi, jika mengacu pada tabel sebelumnya (lihat Tabel 2.5), hasil panen tembakau secara ekonomis lebih menjanjikan daripada komoditas nontembakau.

Lagipula, dalam penyerapan tenaga kerja, seperti dipaparkan pada Tabel 2.5, tanaman tembakau lebih banyak membutuhkan tenaga kerja lantaran semua pengerjaannya harus dilakukan secara simultan, dan pengolahan lahannya cukup menguras tenaga.

> Tanah untuk tanam tembakau harus dicangkul untuk ditinggikan, sehingga pengolahan tanahnya memang berbeda dengan tanaman padi maupun jagung. Kalau padi dan jagung cukup dibajak, tetapi kalau tembakau lain. (Wawancara dengan Jmn, 24 Februari 2011)

Jadi, dalam pertanian tembakau, semua harus dilakukan secara serempak agar waktu panen tidak terlambat dibandingkan dengan petani lain. Sebenarnya hal ini juga tidak jauh berbeda dengan pengolahan lahan pada tanaman nontembakau, hanya saja tingkat kebutuhan pengolahan lahannya tidak seberat tembakau. Artinya, di sektor pertanian nontembakau serapan tenaga kerjanya tidak cukup banyak dibandingkan dengan tembakau. Namun, hal ini bukan berarti petani nontembakau tidak mengalami kesulitan. Sama dengan petani tembakau, mereka kesulitan mencari tenaga kerja jika hanya mengandalkan pekerja dari lingkungan desa setempat.

Pekerjaan *macul* (mencangkul) merupakan pekerjaan yang berat dalam tata kerja pertanian di sawah. Musuh utamanya adalah terik matahari. Para pencangkul di Desa Sumberejo terbatas pada orang-orang yang sudah paruh baya. Sangat sulit untuk mencari tenaga pencangkul muda. Daripada menjadi pencangkul, mereka lebih memilih men-

jadi tukang bangunan atau buruh pabrik di Semarang. Keadaan Ini menyebabkan desa tersebut mengalami krisis tenaga kerja untuk menggarap sawah (wawancara dengan Jmn, 25 Februari 2011).

Namun, jika memang membutuhkan tenaga kerja, pemilik lahan seluas 1 *bahu* ke atas yang jumlahnya tidak banyak akan mengundang pekerja dari desa lain. Para pekerja ini sekarang mengenal kerja borongan dan enggan bekerja dengan sistem harian, apalagi jika yang dikerjakan adalah tanaman tembakau. Harga borongan tergantung dari luas lahan yang akan dikerjakan. Untuk 1 *bahu* penggarapan tanah diborong dengan harga sekitar Rp 1 juta. Adapun bagi pemilik lahan yang luasnya seperempat bahu sampai setengah bahu, mereka mengerjakan sawah itu sendiri dan biasanya sambil bekerja di tempat lain. Untuk mengerjakan sawahnya, mereka pergi ke sawah pada pagi hari mulai pukul 05.00 hingga selesai pada pukul 07.00. Setelah itu, mereka beralih bekerja di tempat lain, misalnya menjadi tukang bangunan di Semarang. Bekerja harian lebih menguntungkan dilakukan di Semarang, sebab upah harian lebih tinggi di Semarang daripada di Mranggen yang sebesar Rp 40.000. Di Sumberejo sendiri jumlah pemilik lahan di atas 1 *bahu* sekitar 20 orang.

Meski secara ekonomi harga jual tembakau lebih tinggi dibandingkan komoditas pertanian nontembakau, tetapi harganya tidak dapat diprediksi dari tahun ke tahun. Nilai harga tembakau kering dari petani Mranggen ini tidak pernah stabil, dan sering kali meluncur jatuh. Misalnya, yang semula harganya Rp 30.000,00 bisa meluncur hingga Rp 10.000,00 atau bahkan lebih rendah lagi, yang kemudian membuat para petani tembakau merugi. Oleh karena itu,

terkadang hasil dari bertanam komoditas nontembakau digunakan untuk menutup kerugian dari bertani tembakau.

TEMANGGUNG

Temanggung merupakan kabupaten yang terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah. Di sebelah utara kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah selatan dengan Kabupaten Magelang, sebelah timur dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah barat dengan Kabupaten Wonosobo. Gunung yang mengelilingi Temanggung antara lain Gunung Sumbing (± 3.260 m dpl), Gunung Sindoro (± 3.151 m dpl), dan Gunung Prau (± 2.565 m dpl). Ketinggian Temanggung sebagian besar berkisar antara 500-1.450 m dpl. Hal ini menjadikan Temanggung relatif sejuk dengan suhu berkisar antara 20-30°C. Kontur lahan di Temanggung terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi berupa lereng gunung dan perbukitan. Secara geologis, wilayah ini tersusun dari batuan beku, yaitu sedimen piroklastik Gunung Sindoro-Sumbing dan sekitarnya. Ukuran dari piroklastik bervariasi mulai dari blek, gragal, kerikil, pasir debu, dan lempung (*Temanggung dalam Angka* 2010).

Kondisi tersebut mendukung pengembangan sejumlah komoditas di Temanggung; beberapa yang utama adalah kopi, tembakau, padi, jagung, dan aneka sayuran. Luas lahan pertanian di Temanggung mencapai 24.543 ha dengan jumlah petani 252.641 orang. Komoditas pertanian yang banyak dibudidayakan di Temanggung terdiri dari jagung, padi, kopi, dan tembakau (lihat Tabel 2.7). Padi dan ja-

gung ditanam bergiliran dengan tembakau, menyesuaikan dengan musim. Dua komoditas andalan dan khas Temanggung adalah tembakau dan kopi. Bahkan, dua komoditas ini mengemuka dalam berbagai simbol Kabupaten Temanggung. Pada musim kemarau (April-Agustus), mayoritas petani Temanggung menanam tembakau.

Tabel 2.7.
Jenis Komoditas Pertanian di Temanggung Berdasarkan Luas Lahan

Jenis pertanian	Lahan panen (ha)	Hasil produksi (ton)
Tembakau	13.088,30	6.786,64
Kopi (arabika dan robusta)	10.346,71	6.044,04
Padi	27.879	137,072
Jagung	32.684	136.057

Sumber: diolah dari Temanggung dalam Angka 2010 dan data Setda Temanggung 2011.

Data kependudukan BPS tahun 2009 menunjukkan jumlah penduduk Temanggung sebanyak 722.087 jiwa. Persentase perempuan mencapai 50,13% dan laki-laki 49,87%. Penduduk yang berusia produktif (15-59 tahun) mencapai 459.801 jiwa. Penduduk di atas usia 10 tahun yang bekerja 411.816 jiwa. Sebanyak 252.641 jiwa atau 61,35% dari jumlah total penduduk terserap ke sektor pertanian. Data Disperbunhut Temanggung, lebih lanjut, menunjukkan jumlah anggota keluarga para petani mencapai 442.121 jiwa atau 61,2% dari penduduk Temanggung. Sektor pertanian memberi kontribusi yang penting bagi Temanggung.

Dua komoditas, tembakau dan kopi, menjadi produk andalan Kabupaten Temanggung. Pertanian tembakau dan industri penunjangnya menyerap tenaga kerja 82.882 orang, sedangkan kopi 45.876 orang (Tabel 2.8). Kedua produk

pertanian tersebut, terutama tembakau, boleh dikatakan menciptakan sebagian besar lapangan kerja di wilayah ini. Dalam catatan Mukani dan Isdijoso, luas area tembakau di Temanggung sekitar 20.000 ha (*Monograf Balittas No. 5* tahun 2000).

Tabel 2.8.
Penyerapan Tenaga Kerja Pertanian Tembakau dan Kopi

Jenis pekerjaan	Tembakau	Kopi
Petani*	49.528	43.362
Industri Penunjangnya	33.354	2.514
Total	82.882	45.876

Sumber: diolah dari data BPS 2010.
**Data petani tembakau tahun 2010 dan petani kopi 2007.*

Mukani dan Isdijoso, lebih lanjut, memperlihatkan pusat tembakau dengan lahan yang luas sudah dapat dijumpai di Kedu, Bagelen, Malang, dan Priangan sejak tahun 1650. Tembakau yang dibudidayakan di wilayah eks-Karesidenan Kedu ini biasanya disebut tembakau kedu. Pusat pengembangan, pengolahan, dan pemasaran tembakau kedu ini berada di Kabupaten Temanggung. Banyak tembakau dari daerah eks-Karesidenan Kedu yang dijual di Temanggung dalam bentuk daun hijau.

Sebagai data tambahan, pada 1956 petani Temanggung beramai-ramai membuka lahan ilalang pada ketinggian 1.100 m dpl (Purlani dan Rachman dalam *Monograf Balittas No. 5* tahun 2000). Pada masa ini, produksi tembakau ditujukan untuk memenuhi permintaan masyarakat setempat terhadap tembakau *garangan* yang diramu dengan klembak dan kemenyan untuk dijadikan rokok. Barulah pada

tahun 1970 tembakau Temanggung dijadikan bahan baku utama industri rokok.

Tembakau yang ditanam di Temanggung tergolong jenis tembakau *voor oogst* (VO). Tembakau ini ditanam pada akhir musim hujan dan dipanen pada musim kemarau (Abdullah dan Soedarmanto 1982, seperti dikutip Sholeh dalam *Monograf Balittas No. 5* tahun 2000). Semakin kering kondisi lahan, semakin baik tembakau yang dihasilkan. Intensitas cahaya matahari yang tinggi sangat diperlukan terutama pada masa panen dan proses pengolahan pascapanen yang meliputi pemeraman, perajangan, dan pengeringan. Faktor cuaca sangat mempengaruhi kualitas tembakau yang dihasilkan, sehingga turut menentukan harga jualnya. Petani tembakau Temanggung sangat khawatir jika pada masa panen curah hujan tinggi, karena dapat menurunkan kualitas tembakau yang diolahnya.

Di Temanggung terdapat jenis tembakau yang sangat diminati oleh pabrikan karena keunggulan kualitasnya. Tembakau ini dikenal dengan nama *srinthil*. Kandungan yang ada dalam tembakau tersebut dianggap paling bagus dan *grade*-nya di atas F (yang terbaik). Daun tembakau ini dicirikan dengan warnanya yang lebih hitam. Berbeda dengan tembakau lain, srinthil akan menggumpal apabila dirajang. Aromanya juga lebih tajam dibandingkan tembakau lainnya. Jenis tembakau ini tidak bisa secara sengaja ditanam. Bukan jenis bibit yang menyebabkan kemunculannya, melainkan faktor alamlah yang membentuknya. Para petani belum memiliki pengetahuan praktis agar srinthil tumbuh di ladang mereka. Secara geografis, srinthil sering muncul pada daerah-daerah tertentu saja.

Tembakau di Temanggung memiliki keunikan tersendiri untuk setiap wilayah tanamnya. Antara satu daerah dengan daerah lainnya bisa berbeda jauh kualitasnya. Tembakau yang ditanam di Lereng Gunung Sumbing yang menghadap ke timur berbeda kualitasnya dengan yang ditanam menghadap ke barat. Tembakau tegal dan tembakau sawah juga berbeda kualitasnya. Tembakau tegal memiliki masa tanam yang lebih lama, namun harga jualnya lebih tinggi. Berikut adalah jenis-jenis tembakau yang ada di Temanggung berdasarkan wilayahnya (Diolah dari temuan lapangan dan *Monograf Balittas No 5* tahun 2000):

- Lamuk: tembakau dari lereng timur Gunung Sumbing pada ketinggian >1.100 m dpl. Dengan menanam kultivar lokal *gober genjah kemloko* dihasilkan tembakau mutu *srinthil* super istimewa. Tembakau jenis ini ditanam di sekitar Kecamatan Tembarak.
- Lamsi: tembakau dari lereng timur dan utara Gunung Sumbing pada ketinggian >1.100 m dpl. Dengan menanam kultivar lokal *gober genjah kemloko* dihasilkan mutu *srinthil* super istimewa. Tembakau jenis ini banyak ditanam di Kecamatan Bulu dan Parakan, dengan tingkat kemiringan tanah 15-40% dan tipe tanah regosol.
- Twalo: tembakau yang terletak di lembah Gunung Sindoro dan Sumbing pada ketinggian >1.000 m dpl. Dengan menanam kultivar *gober togog*, *genjah sitieng*, dan *gober genjah kemloko* dihasilkan tembakau mutu sedang. Wilayah penanaman tembakau jenis ini adalah Kecamatan Parakan dan Ngadirejo.
- Paksi: tembakau dari lereng timur Gunung Sindoro pada ketinggian >1.100 m dpl. Dengan menanam kultivar lokal *gober genjah kemloko* dihasilkan tembakau *srinthil*

super istimewa. Wilayah penanamannya meliputi Kecamatan Ngadirejo.

- Swanbin: daerah tegalan di Selatan Gunung Prau dengan ketinggian 900-1.400 m dpl, tingkat kemiringan 15-40%, dan tipe tanah latosol. Dengan menanam kultivar *gober genjah kemloko* dihasilkan tembakau mutu sedang. Wilayah penanaman tembakau jenis ini meliputi Kecamatan Tretep dan Wonoboyo.
- Tionggang: tembakau yang ditanam pada lahan sawah dengan ketinggian 500-700 m dpl, kemiringan 3-15% dan tipe tanah latosol. Wilayah penanaman tembakau jenis ini meliputi Kecamatan Kedu, Tembarak, Bulu, Parakan, dan Ngadirejo.
- Swantingjan: tembakau jenis ini banyak ditanam di tegal banyon maupun sawah dan banyak berada di sekitar Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Jumo, dan Kecamatan Candiroto.

PDRB Kabupaten Temanggung tahun 2009 mencapai Rp 4,5 triliun. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Temanggung 2009 mencapai 31,19%. Sektor industri pengolahan berada pada urutan kedua penyumbang PDRB Kabupaten Temanggung, mencapai 19,88%. Urutan ketiga penyumbang PDRB Kabupaten Temanggung adalah sektor perdagangan, hotel, dan rumah makan dengan sumbangan 17,18%. Dari data ini tampak bahwa sektor pertanian merupakan tulang punggung utama perekonomian di Temanggung.

Bila dilihat dari jumlah perusahaan dan tenaga kerja menurut jenisnya, di Kabupaten Temanggung, industri penunjang sektor pertanian menjadi bagian yang penting, mulai dari industri pembersihan kopi, pembuatan tepung,

pengolahan buah, pembuatan gula aren, pengeringan dan pengolahan tembakau, pembuatan alat perajang tembakau, hingga anyaman keranjang tembakau. Baik dari segi jumlah perusahaan, penyerapan tenaga kerja, dan nilai produksinya, industri penunjang sektor pertanian mempunyai peran yang signifikan di Temanggung (lihat *BPS* 2010). Industri kayu olahan menduduki posisi yang juga penting dalam perekonomian Temanggung, denga nilai ekspor mencapai US$ 91 juta. Nilai produksi kayu olahan hanya bisa disamai oleh dua komoditas pertanian, yaitu kopi dan tembakau, yang bila dijumlahkan total nilai produksi keduanya mencapai Rp 917 miliar.

Secara keseluruhan, nilai total ekspor kopi pada tahun 2009 mencapai sekitar Rp 60 miliar (BPS 2010). Adapun untuk tembakau, bila diasumsikan harga rata-rata per kilogramnya Rp 45.000, perputaran uang di seputar komoditas ini pada 2009 sudah mencapai Rp 857 miliar (Setda Kabupaten Temanggung). Padahal, bila cuaca bagus, harga tembakau petikan terakhir bisa lebih dari dari Rp 100.000/kg. Dari total PDRB Kabupaten Temanggung tahun 2009 yang mencapai Rp 4,5 triliun, kontribusi tembakau mencapai 19,05% dan kontribusi kopi setara dengan 1,34%.

Sementara itu, menurut data BPS 2010, untuk pengeringan dan pengolahan tembakau saja uang yang berputar mencapai Rp 94 miliar, dengan jumlah pekerja yang terlibat 23.031 orang. Perputaran uang dalam industri mesin perajang tembakau mencapai Rp 1,8 miliar dengan jumlah pekerja yang terlibat 65 orang. Sedangkan pada industri alat perajang tembakau tradisional mencapai Rp 46 juta dengan jumlah serapan pekerja 45 orang. Dalam industri anyaman bambu untuk keranjang tembakau mencapai Rp 10 miliar



Petani tembakau Temanggung (foto: Humas Pemkab Temanggung)



Para pekerja di Temanggung membalik jemuran tembakau
(foto: Humas Pemkab Temanggung)



Bibit tembakau di persemaian



Bibit tembakau di persemaian (foto: Syukron)

dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 9.758 orang. Penghasil anyaman keranjang bahkan bukan berasal dari daerah yang menjadi sentra tembakau, melainkan dari daerah yang menjadi sentra kopi (wawancara dengan Thr, 23 Februari 2011). Untuk anyaman pelepah pisang sebagai pelapis keranjang tembakau, omzetnya mencapai Rp 250 juta dengan pekerja 425 orang. Sedangkan untuk pembuatan *rigen* atau alat jemur tembakau, nilai perputaran uangnya mencapai Rp 60 juta dengan penyerapan kerja 30 orang.

Komoditas kopi juga melibatkan perputaran uang yang cukup besar pada industri penunjangnya. Untuk industri pembersihan kopi nilai produksinya mencapai Rp 6,2 miliar dengan penyerapan tenaga kerja 2.312 orang. Untuk pembuatan kopi bubuk, nilai produksinya mencapai Rp 1,19 miliar dan menyerap 202 tenaga kerja (BPS 2010). Namun, jumlah penyerapan tenaga kerja dan nilai produksi kopi masih jauh di bawah tembakau.

Dengan gambaran di atas, jelas saja kalau banyak petani di Temanggung mengandalkan tembakau sebagai penghasilan utama. Nilai ekonomis komoditas ini jauh lebih tinggi dibandingkan komoditas lain, sebagaimana disampaikan Adk (wawancara, 16 Februari 2011), petani tembakau dari Banaran Bansari, *"Di Temanggung ini mayoritas; apa pun kebutuhan yang dianggap besar itu, 90%, tidak hanya 75%, dari hasil tembakau."*

Selain itu, kondisi lahan, khususnya tegalan tadah hujan, juga tidak memungkinkan petani untuk menanam komoditas lain yang memiliki nilai ekonomi setara tembakau. Tanaman yang tahan hidup pada musim kemarau yang benar-benar kering tidak banyak, sehingga pilihan petani terbatas. Banyak petani yang mengatakan bahwa lahan me-

reka pada musim kemarau tidak bisa ditanami tanaman selain tembakau karena kondisi lahan yang kering. Bila petani menanam komoditas selain tembakau, biaya produksi akan membengkak hingga melebihi pendapatan yang akan diterima pada masa panen. Tembakau merupakan denyut nadi bagi masyarakat petani Temanggung, khususnya petani tegalan, seperti penuturan Rcb (wawancara, 23 Februari 2011), petani dari Ngadirejo: *"Pada lahan tegalan, tembakau itu seperti segala-galanya; ada tanaman seperti jagung, tapi untuk panennya, minim sekali."*

Perekonomian Temanggung banyak digerakkan oleh tembakau sebagai komoditas andalan. Bahkan, perputaran uang di kota-kota besar juga terserap ke Temanggung pada saat panen tembakau. Menurut penuturan Adk (wawancara, 16 Februari 2011), pada bendel uang pembayaran tembakau tertera tulisan "BI Yogyakarta", yang menandakan bahwa perputaran uang di Temanggung begitu besar hingga menyerap uang dari luar kota. Hal ini ditegaskan pula oleh Rcb (wawancara, 23 Februari 2011):

> *Pas panen tembakau, duit sepuluh ewu niku ora kanggo, padakne susuk sepuluh ewu kan mbalik kudune tapi wah mung sepuluh ewu wae wis luweh. Tapi nek pas ora panen tembakau duit sepuluh ewu yo rekoso tenan.*
>
> [Saat panen tembakau, uang Rp 10.000,00 itu tidak ada nilainya; misalkan dapat kembalian Rp 10.000,00 (orang enggan menerimanya sambil berkata), "Wah, sekadar Rp 10.000, untuk kamu saja." Tetapi, pada

> saat tidak panen tembakau, uang sepuluh ribu susah sekali (mendapatkannya)].

Luas lahan yang ditanami tembakau di Temanggung pada 2009 mencapai 13.088,30 ha. Jumlah petani tembakau di Temanggung pada 2009 menurut data Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Temanggung berjumlah 47.642 orang. Petani yang berada di 14 dari 20 kecamatan di Temanggung mengandalkan tembakau sebagai sumber penghasilan utamanya. Istilah *mengko bar mbakon* (nanti setelah musim tembakau) cukup populer untuk menjanjikan pengeluaran besar seperti untuk membeli kendaraan, menikahkan anak, pergi haji, membayar hutang, dan pengeluaran besar lainnya. Hal ini seperti disampaikan Imb, petani tembakau dari Cepit, yang mengatakan bahwa:

> Orang tembakau itu kalau menjanjikan sesuatu pada anak pasti nanti setelah panen tembakau, entah itu mainan, sepeda motor, beli tanah, kuliah, mau menikah; mau apa pun *bar mbako* (setelah panen tembakau).

Omzet komoditas kopi di Temanggung juga relatif besar. Dengan luas lahan panen yang mencapai 10.346,70 ha, dikembangkan dua jenis kopi yaitu, robusta dan arabika (BPS 2010). Jumlah petani kopi Temanggung pada 2007 mencapai 43.362 orang dengan rincian 8.962 petani kopi arabika dan 34.400 petani kopi robusta. Daerah pertanian kopi di Temanggung terletak di lereng pegunungan sebelah utara. Temanggung merupakan salah satu penghasil kopi terbesar di Jawa Tengah. Budidaya tanaman kopi robusta

tersebar di sejumlah kecamatan seperti Kandangan, Gemawang, Candiroto, Jumo, Bejen, dan Wonoboyo.

Tabel 2.9.
Luas, Produksi, dan Jumlah KK Petani Tembakau di Temanggung

Tahun	Luas (ha)	Produksi (ton)	Jumlah petani (KK)
2007	13.039,90	8.019,44	-
2008	11.440,00	5.012,43	-
2009	13.088,30	6.786,64	47.642
2010	14.577,65	6.373,99	49.528

Sumber: diolah dari Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Temanggung dan Disperbunhut.

Tabel 2.10.
Analisis Hasil Usaha Tani di Temanggung

Komoditas	Biaya produksi (Rp)	Hasil panen (Rp)	Keuntungan (Rp)
Padi	7,5 Juta	15 Juta	7,5 Juta
Jagung	6 Juta	9 Juta	3 Juta
Tembakau	15 Juta	30 Juta	15 juta
Kopi	7,5 Juta	15 Juta	7,5 Juta

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Temanggung 2011.

Untuk komoditas kopi, panen hanya bisa dilakukan satu tahun sekali. Jadi, usaha pertanian kopi memiliki masa tunggu panen yang paling panjang. Adapun untuk tembakau, masa tunggu panennya hanya berkisar antara 5-6 bulan. Apabila musimnya sedang bagus, keuntungan yang diperoleh petani tembakau dapat mencapai dua kali lipat dari kopi. Tak mengherankan jika kemudian berkembang pemahaman umum dalam masyarakat bahwa jika tembakau dilarang, maka pasar-pasar akan sepi, mengingat pasar-pasar di Temanggung pada masa panen tembakau sangat ramai dan perputaran uangnya amat kencang.

Multiplier effect (efek domino) panen tembakau menghembuskan nafas pada perekonomian Temanggung. Pasar-pasar menjadi ramai karena petani memiliki uang dari hasil panen. Bahkan, dari cerita para narasumber, *dealer* sepeda motor tidak menerima pembayaran pembelian secara tunai lantaran membludaknya permintaan sepeda motor dengan pembayaran tunai, sementara stok mereka terbatas (wawancara dengan Mtl, pedagang tembakau, 16 Februari 2011), selain juga karena pembelian secara kredit lebih menguntungkan *dealer*. Pasar malam juga banyak digelar di beberapa lokasi sehabis panen tembakau. Pasar malam ini berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya dan masuk ke pedesaan-pedesaan di lereng gunung.

Berbagai fakta lapangan kian memperlihatkan bagaimana komoditas tembakau menjadi komoditas yang mengurat-akar dalam perekonomian masyarakat Temanggung. Protes terhadap fatwa haram rokok dan pencantuman tembakau sebagai zat adiktif dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terbilang keras di Temanggung. Ulama NU setempat menyelenggarakan istighosah akbar berkenaan dengan ini dan menyedot ribuan massa turun ke alun-alun kota. Bahkan, partai politik yang diidentikkan dengan gerakan antitembakau anjlok perolehan suaranya di Temanggung.

Begitu hebatnya arti tembakau bagi kesejahteraan warga Temanggung, ada cerita bahwa pada masa kepemimpinan Bupati Totok Ary pernah terjadi pemukulan (pengeroyokan) terhadap sang kepala daerah. Peristiwa yang mengambil tempat di Kecamatan Kledung tersebut meledak karena bupati dianggap tidak berpihak kepada petani tembakau (wawancara dengan Mtl, Rcb, dan Thr, Februari 2011).

Cerita lain, pada waktu Shalat Jumat, jamaah bisa bubar apabila cuaca mendung sebab para petani lebih memilih untuk mengurusi tembakau yang tengah dijemur lantaran khawatir kalau kehujanan harganya akan jatuh (wawancara berkelompok di Dusun Cepit, 21 Februari 2011).

MALANG

Berada di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang memiliki luas wilayah 3.238,26 km^2. Secara geografis, kabupaten ini terletak pada 112°17',10,90"-122°57',00,00" Bujur Timur dan 7° 44',55,11"-8°26',35,45" Lintang Selatan (*Kabupaten Malang dalam Angka* 2010: 13). Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto di utara; Kabupaten Probolinggo dan Lumajang di timur; Kabupaten Blitar dan Kediri di barat, serta Samudra Hindia di selatan (*Kabupaten Malang dalam Angka* 2010: 13).

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten terluas di antara 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur (*Kabupaten Malang dalam Angka* 2010: 13). Selain luas, tanah di Kabupaten Malang pun subur. Kabupaten ini memiliki potensi pertanian yang baik, dilihat dari luasnya wilayah lahan yang sudah dimanfaatkan untuk sektor pertanian dan perkebunan. Sekitar 55,22% dari total wilayah di kabupaten ini digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, tak mengherankan kalau mayoritas penduduk Kabupaten Malang bekerja pada sektor pertanian (BPS Jawa Timur 2009: 4).

Berdasarkan kondisi tanah dan arah pengembangan wilayah, Kabupaten Malang terbagi ke dalam beberapa wilayah komoditas pertanian atau, menurut ahli pertanian setempat, peta komoditas (wawancara dengan Ags, ahli pertanian Unisma, 18 Februari 2011). Luas lahan pertanian dan perkebunan, seperti nampak pada Tabel 2.11, mencapai 175.298 ha (*Kabupaten Malang dalam Angka* 2010: 226), yang terbagi atas tiga wilayah komoditas. Malang bagian utara dan timur banyak ditanami buah-buahan seperti apel; Malang bagian barat karena memiliki kadar air yang baik, diarahkan sebagai pusat tanaman sayur mayur; dan Malang bagian selatan dijadikan pusat tanaman keras atau berserat seperti tebu, sengon, kapas, dan sebagainya (wawancara dengan Ags, ahli pertanian Unisma, 18 Februari 2011). Tiga wilayah yang terletak di Malang selatan yaitu, Desa Ngasem, Desa Pakisaji, dan Desa Jatiguwi, yang menjadi lokasi penelitian ini, merupakan pusat pertanian dan perkebunan.

Tabel 2.11.
Luas Area Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Malang

Jenis lahan	Ha	%
Sawah	49.552	15,44
Tegal/ladang/kebun	99.764	31,11
Perkebunan	19.578	6,11
Hutan	6.404	2,56
Total	175.298	55.22

Sumber: Kabupaten Malang dalam Angka 2010.

Sektor pertanian memainkan peranan penting dalam roda perekonomian Kabupaten Malang. Sektor ini menjadi kontributor paling tinggi dalam PDRB Kabupaten Malang.

Tercatat, sejak tahun 2002 hingga tahun 2009 pertanian secara konstan menempati posisi teratas dibandingkan sektor lainnya (*Kabupaten Malang dalam Angka* 2009; *Kabupaten Malang dalam Angka* 2010: 407).

Tabel 2.12.
Perbandingan Kontribusi Pertanian dan Nonpertanian terhadap PDRB Kabupaten Malang (Tahun 2002-2009)

Tahun	Pertanian (Rp)	Pengangkutan & komunikasi (Rp)	Pertambangan & penggalian (Rp)
2002	3.585.189,86	561.378,56	261.214,17
2003	3.585.189,86	590.508,99	282.633,73
2004	4.277.683,93	638.804,91	310.444,89
2005	4.812.562,16	860.428,83	365.637,06
2006	5.661.252,65	1.019.232,85	422.823,91
2007	6.352.330,72	1.112.505,90	487.089,04
2008	7.066.445,50	1.104.005,90	486.727,87
2009	7.979.506,96	1.364.881,52	556.281,27

Sumber: Kabupaten Malang dalam Angka 2009 dan 2010.

Memang, luas total lahan tembakau di Kabupaten Malang hanya 157 ha (*Kabupaten Malang dalam Angka* 2010: 229), tetapi produk pertanian ini bisa menunjang kehidupan petani di Kecamatan Sumberpucung (Malang Selatan) dan Tumpang (Malang Barat) lantaran terdapat permintaan pasar yang baik, setidaknya dalam 10 tahun ke belakang (wawancara dengan Ar, 20 Februari 2011). Padi menempati urutan teratas sebagai tanaman yang memiliki angka produksi tertinggi dalam sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Malang. Selain tembakau dan padi, produk pertanian yang juga cukup penting dalam menggerakkan roda perekonomian Malang adalah tebu, yang

ditopang oleh dua pabrik gula berskala besar, yaitu Pabrik Gula (PG) Krebet dan Kebonagung.



Lahan tembakau yang baru ditanami di Desa Jatiguwi

Secara historis, tidak ada catatan spesifik tentang kapan tembakau mulai ditanam di Kabupaten Malang. Namun, para petani tembakau sepakat bahwa tanaman ini sudah lama hadir di Malang Selatan. Bahkan, ada yang berasumsi tembakau sudah ditanam sejak sebelum Indonesia merdeka (wawancara dengan Tj, 24 Februari 2011; Ar, 20 Februari 2011). Para narasumber kerap menceritakan bahwa pada masa kanak-kanak, mereka sudah mulai belajar menanam tembakau. Ayah dan kakek mereka pun sudah belajar menanam tembakau dari leluhurnya. Selain itu, sejarah pun mencatat bahwa pada tahun 1930-an PT Bentoel (Bentoel Group) membuka pabrik rokoknya di Malang (Bentoel

Group 2009). Ada kemungkinan, pembukaan pabrik rokok ini menjadi salah satu pemicu berdirinya perkebunan tembakau di Malang.

Belakangan, terdapat usaha-usaha untuk memperluas area perkebunan tembakau di Malang. Misalnya, pada awal tahun 1990-an ada upaya membawa bibit tembakau dari Temanggung untuk ditanam di Kecamatan Pujon. Hal serupa dilakukan di Ngajum pada tahun 2000 melalui kerja sama dengan pabrik rokok. Akan tetapi, karena kandungan air dalam tanah di kedua lokasi tersebut tinggi, sementara tembakau tidak dapat hidup dengan baik pada tanah seperti itu, upaya tersebut tidak berhasil (wawancara dengan Djd, staf Balittas, 18 Februari 2011).

Berdasarkan data alokasi definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2010, terjadi peningkatan alokasi yang cukup drastis untuk kabupaten/kota di seluruh Provinsi Jawa Timur; dan Kabupaten Malang menempati posisi ke-4 penerima cukai tertinggi setelah Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan Pasuruan, yaitu sebesar Rp 28,832 miliar (*DBHCHT-Depkeu* 2010). Dari dana bagi hasil ini, setiap dinas di kabupaten memperoleh anggaran untuk pengembangan komoditas tembakau. Pada tahun 2009 Dinas Pertanian (Distan) memperoleh anggaran hasil cukai sebesar Rp 2 miliar. Karena dana ini wajib dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman tembakau, maka Distan memanfaatkannya dengan membangun laboratorium uji tembakau (wawancara dengan Rni, Distan, 18 Februari 2011).

Pertanian tembakau membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak, terutama pada masa pascapanen yang melibatkan proses menjemur dan merajang tembakau (wawan-

cara dengan Sd, penggarap lahan tembakau dan padi, 16 Februari 2010). Pada dasarnya, pengelolaan lahan pertanian adalah pekerjaan yang jarang sekali dapat dikerjakan sendiri, terutama bila luas lahan sudah lebih dari 1 ha, sedangkan ketersediaan tenaga kerja tidak selalu memadai. Oleh karena itu, ada kalanya pada masa-masa sibuk seperti masa panen dan pascapanen para petani mendatangkan tenaga kerja dari wilayah lain untuk membantunya.

Beberapa petani tembakau di Desa Jatiguwi ada yang gemar melakukan eksplorasi atau pengembangan lahan tembakau di luar Jatiguwi. Salah satunya adalah Ar, yang mencoba menanam tembakau di wilayah dekat Pantai Ngliep, Kecamatan Donomulyo. Mengingat jarak antara Jatiguwi dan lokasi tersebut lebih dari 40 km, sehingga cukup merepotkan bagi Ar bila harus bolak-balik setiap hari, maka ia mendidik sekelompok petani lokal untuk menggarap lahannya. Usaha yang dilakukan oleh Ar ini sedikit banyak membuka peluang pasar tenaga kerja bagi petani di Kecamatan Donomulyo. Mereka yang sebelumnya tidak pernah belajar bertani tembakau, kini mendapat pelajaran mengurus tembakau.

PAMEKASAN

Kabupaten Pamekasan, salah satu kota di Pulau Madura, terletak pada $6^{0}51'$-$7^{0}31'$ Lintang Selatan dan $113^{0}19'$-$113^{0}58'$ Bujur Timur. Secara geografis, sebelah utara Pamekasan adalah Laut Jawa; sebelah selatan Selat Madura; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sampang; dan di timur berbatasan dengan Kabupaten Sumenep (*Pamekasan dalam*

Angka 2010: 10). Secara khusus, penelitian dilakukan di Desa Tambung, Kecamatan Pademawu. Luas daerah ini 219,939 ha dengan jumlah penduduk 2.441 jiwa (*RPJMD* 2009: 1).

Total luas area yang dapat digunakan untuk pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pamekasan adalah 57.641 ha atau 73% dari total luas Kabupaten Pamekasan yang besarnya 79.230 ha (Bappeda 2010). Dari luas area tanam tersebut, pada tahun 2009 seluas 29.044 ha digunakan untuk perkebunan tembakau (*Pamekasan dalam Angka* 2010: 184). Kondisi lahan tersebut sangat potensial untuk ditanami tembakau. Namun, sejak tahun 2004 hingga 2009, luas area perkebunan tembakau terus-menerus menyusut, dari 34.565 ha hingga tinggal 29.044 ha (http://www.pamekasan.go.id, diunduh 4 Maret 2011). Penyusutan ini diakibatkan oleh cuaca yang tidak menentu yang berujung pada gagal panen, selain juga karena harga jual tembakau jenis sawah yang merosot (wawancara dengan Kadisperindag Kabupaten Pamekasan, 23 Februari 2011). Meskipun demikian, luas area tanam tembakau di Pamekasan tetap yang terluas se-Jawa Timur, bahkan juga se-Indonesia.

Tabel berikut menggambarkan bahwa tembakau merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting di Pamekasan, di samping jagung, padi, dan garam sebagai komoditas utama wilayah ini. Sebagian besar jagung maupun padi sebenarnya ditanam pada lahan tanam tembakau. Hanya saja, tembakau ditanam pada musim kemarau, sedangkan tanaman lainnya pada musim penghujan.

Tabel 2.13.
Perbandingan Luas Area Tanam Beberapa Komoditas Andalan Pamekasan dan Total Produksi per Tahun (Tahun 2006-2009)

Jenis komoditas	2006		2007		2008		2009	
	(ha)*	(ton)**	(ha)*	(ton)**	(ha)*	(ton)**	(ha)*	(ton)**
Tembakau	31.985	18.391	31.367	16.625	29.050	16.384	29.044	16.583
Jagung	38.070	87.942	40.427	96.188	39.091	197.864	45.241	121.961
Padi	22.255	108.382	22.143	111.072	22.765	127.391	22.850	130.858
Garam	2.096	88.870	2.096	62.209	2.096	97.757	2.096	97.757

Sumber: diolah dari Pamekasan dalam Angka 2010.
** Luas area tanam dalam ha.*
*** Total produksi per tahun dalam ton.*

Tinjauan sejarah menunjukkan bahwa sejak abad ke-18 penduduk lokal di Pamekasan telah menanam tembakau secara luas (wawancara dengan ketua APTP, 17 Februari 2011). Pada masa itu pula, Madura telah menjadi daerah penghasil dan pengekspor utama garam. Sumber lain mengatakan bahwa tanaman tembakau diperkenalkan oleh orang Portugis pada abad ke-16 (Makfoeld 1982: 2-4 dalam Santoso 2001: 96). Bahkan, ada juga yang mengatakan tembakau sebagai tanaman asli Madura; lebih dulu ditanam sebelum kedatangan orang-orang Portugis (Santoso 1994 dan Makfoeld 1982: 1 dalam Santoso 2001). Beberapa sumber sejarah ini, bagaimanapun, menunjukkan bahwa orang Madura di Pamekasan telah mengenal dan menanam tembakau secara turun-temurun selama ratusan tahun. Komoditas ini mulai dibudidayakan secara luas sebagai perkebunan besar pada zaman kolonial Belanda, sedangkan industri lokal berskala besar mulai masuk menyerap tembakau Madura sejak awal abad ke-19.

Dari jumlah total penduduk Pamekasan, sebanyak 689.225 jiwa pada tahun 2000, lebih dari separuhnya (337.000 jiwa) terserap ke dalam sektor komoditas tembakau (Dishutbun Kabupaten Pamekasan 2000). Dari jumlah itu, 304.000 orang adalah petani yang bergerak dalam budidaya tembakau. Saat panen raya, sekitar 30.000 orang terlibat dalam kegiatan ekonomi pertembakauan, terdiri dari 1.600 orang pedagang, 400 orang pengrajin tikar, 500 orang pengrajin tembakau *krosok*, dan sisanya menjadi penggulung, perajang, hingga kuli angkut. Tingginya produktivitas tembakau di Pamekasan—sebesar 16.384 ton pada tahun 2008—juga membuat orang-orang yang berkocek tebal membuka pabrik rokok lintingan. Pada tahun 2007 terdapat 241 pabrik rokok lintingan yang menyerap tenaga kerja sebanyak 3.218 orang, dan pada 2008 jumlah pabrik meningkat hingga 256 pabrik yang mempekerjakan lebih dari 6.150 warga (Disperindag Kabupaten Pamekasan 2009). Sebagai perbandingan, jumlah tenaga kerja yang terserap kedalam sektor perikanan dan pertambakan adalah 13.952 orang nelayan, 1.125 orang petani ikan, dan 3.000 orang petani garam.

Data di atas memperlihatkan dengan jernih, komoditas tembakau menjadi tumpuan sebagian besar warga Pamekasan. Oleh karena itu, pemerintah setempat pun mengangkat komoditas ini sebagai andalan daerahnya. Jelas saja, lebih dari separuh warga terserap ke dalam sektor ini. Pendapatan daerah dari cukai pertanian tembakau juga terbilang besar.

Secara umum, angka pertumbuhan ekonomi Pamekasan dari tahun 2007 hingga 2009 terus mengalami kenaikan, berturut-turut dari 4,76% pada tahun 2007 menjadi 5,53%

pada tahun 2008 dan 5,63% pada tahun 2009. Angka ini di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang berada pada kisaran 4,9-5%. Kontribusi tembakau dan garam terhadap perekonomian Pamekasan dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Jika melihat perbandingan dua komoditas utama Pamekasan, kontribusi tembakau terhadap perekonomian Pamekasan lebih besar daripada garam. Saat panen raya, jika rata-rata produksi tembakau pada tahun 2009 mencapai 16.583 ton dengan patokan harga Rp 30.000/kg, maka, jika terserap semua, perputaran uang di Kabupaten Pamekasan dari sektor pertembakauan saja dapat mencapai kurang-lebih Rp 497,5 miliar. Sementara, untuk komoditas garam yang dalam sekali panen raya dapat menghasilkan 97.757 ton garam dengan patokan harga Rp 250.000/ton, perputaran uang mencapai Rp 24,4 miliar. Jumlah ini jauh di bawah kontribusi komoditas tembakau.

Selain karena area perkebunan tembakau memang lebih luas, harga jual yang lebih tinggi serta peluang penciptaan lapangan kerja yang besar, membuat tembakau menjadi komoditas yang lebih vital dalam perekonomian daerah. Di Pamekasan ada ungkapan:

> Jika ingin membeli barang dengan harga murah datanglah di masa sebelum tanam tembakau, tapi jika ingin memperoleh untung besar atas penjualan barangmu datanglah di masa panen raya, uang seperti tak ada harganya. (Wawancara dengan Klebun Desa Tambung, 15 Februari 2011)

Tabel 2.14.
Perbandingan Kontribusi Komoditas Tembakau dan Garam terhadap Perekonomian Kabupaten Pamekasan

Indikator	Tembakau	Garam
PNBP	Kontribusi terhadap cukai per tahun sebesar Rp 4,5 miliar; DBHCHT Pamekasan = Rp 23 miliar (terbesar ketiga di Jatim setelah Kediri dan Malang).	-
PDRB	Rp 21,4 miliar pada tahun 2009 terus mengalami peningkatan terhitung dari tahun 2003 sebesar Rp 10,7 miliar.	Jika masuk sektor pertanian dengan sub perikanan, maka PDBR sebesar Rp 311,9 miliar.
Penciptaan lapangan kerja	Sektor ikutan di masa tanam hingga panen raya antara lain: pengrajin tikar pembungkus, pengrajin anyaman bidik, pengrajin keranjang, pengrajin bambu penutup bedengan, pengrajin gembor (alat penyiram), pembuat pisau perajang, perajang, penggulung, kuli angkut, pedagang, perawat, pemetik.	Sektor ikutan: penguras, persewaan mesin menguras air, pengrajin anyaman untuk gudang garam.
Pendapatan rumah tangga untuk 1/2 ha lahan	Jumlah pohon: 10.000 pohonpenghasilan kotor per 1000 pohon (40-50 kg) = Rp 1 juta; Jika harga per kg rata-rata Rp 20.000, maka penghasilan kotor = Rp 10 juta;Modal: ± Rp 7 juta (pencangkulan, pemupukan, perawatan, panen, perajangan, pembungkusan, pengangkutan);Pendapatan bersih = Rp 3 juta;Jika dikerjakan oleh buruh tani (plus modal), maka penghasilan tersebut dibagi 50:50. Jika modal dari pemilik lahan, maka pembagiannya 1/3 : 2/3 untuk buruh tani : petani pemilik.	3 petak lahan ± 6000 m^2; tiap petak dapat menghasilkan 8 ton, jika 3 petak maka menghasilkan 24 ton garam;Dengan kisaran harga garam Rp 180 ribu-Rp 300 ribu, jika dipatok harga per ton Rp 200 ribu maka diperoleh penghasilan sebesar Rp 4,8 juta; jika dikurangi modal sekira Rp 800 ribu maka pendapatan bersih sebesar Rp 4 juta (aturan bagi hasil antara buruh dengan pemilik lahan berlaku sama dengan komoditas tembakau).

Sumber: diolah dari hasil wawancara, BPS Kabupaten Pamekasan 2010, dan data Disperindag Pamekasan.

3

TEMBAKAU: TUMPUAN KESEJAHTERAAN DENGAN BEBERAPA CATATAN

LEBIH MENGUNTUNGKAN, WALAUPUN BELUM BISA DIANDALKAN

Menanam tembakau di Sumedang masih lebih menguntungkan daripada menanam komoditas lain. Meskipun petani tembakau memiliki lahan yang sama luasnya dengan petani padi, misalnya, tetapi harga jual komoditasnya pada masa panen akan lebih tinggi. Ada dua model penjualan tanaman tembakau di wilayah ini: dijual batangan selagi masih di sawah atau dijual dalam bentuk rajangan yang sudah diolah. Selain itu, penjualan tembakau dapat dilakukan dengan metode tunda-simpan. Artinya, kalau harga jual masih rendah, petani tembakau masih bisa menyimpannya terlebih dahulu sebelum dijual.

Sayang, bagi petani tembakau yang menggarap lahan sewaan atau buruh tani tembakau yang lahannya kurang

dari 1 ha, meskipun cukup besar, penghasilan dari tembakau tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka selama setahun. Seperti yang dialami oleh AS, seorang petani tembakau yang memiliki lahan kurang dari 1 ha. Dengan modal Rp 1,5 juta, ia memperoleh hasil Rp 3,5 juta dari lahan 100 bata. Modal tanam tembakau untuk lahan 100 bata tidak jauh berbeda dengan modal tanam padi untuk lahan 100 bata (untuk padi Rp 1,4 juta). Namun, hasil panennya tetap lebih besar tanaman tembakau. Sementara jika lahan dengan luas yang sama ditanami padi, hasilnya adalah 5 kuintal atau Rp 1,5 juta kalau dijual.

Penghasilan dari penjualan tembakau memang sangat besar. Sayangnya, hal ini belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bulanan seorang petani kecil di Sumedang seperti AS, lantaran tanaman tembakau hanya dapat dipanen setahun sekali. Pengeluaran rutin bulanan yang harus dikeluarkannya kurang lebih Rp 1,3 juta, dengan rincian uang transportasi sekolah anak (duduk di bangku SMP) Rp 10.000,00 x 24 = Rp 240.000,00; uang jajan anak Rp 7.000,00 x 30 = Rp 210.000,00; cicilan di bank Rp 460.000,00; pulsa Rp 100.000,00; lauk pauk Rp 200.000,00. Pengeluaran tersebut tidak sebanding dengan penghasilannya. Untuk menutupi kekurangannya, AS bekerja sebagai tukang kayu bangunan atau kuli material, meskipun penghasilan dari tukang kayu bangunan juga tidak memadai karena tidak setiap hari ada pekerjaan.

Persoalan lain bagi petani, harga tembakau bisa sewaktu-waktu terjembab. Misal, pada tahun 2009, penghasilan dari tembakau yang ditanam di lahan seluas 100 bata dengan modal Rp 1,5 juta hanya mencapai Rp 400.000,00. AS tidak melakukan tunda-simpan karena memang tidak

memiliki sarana dan modal untuk penyimpanan (wawancara dengan AS, 17 Februari 2011). Seperti halnya petani tembakau lainnya di Cipinangpait, AS hanya menjual tembakau dalam bentuk batangan ketika panen di sawah dan menjualnya dengan model borongan.

Nasib yang hampir sama juga dialami petani padi, baik dari pemilik atau penyewa lahan kurang dari 1 ha maupun dari buruh taninya. Ad menyewa lahan seluas 300 bata dengan biaya 6 kuintal padi atau Rp 2,4 juta. Biaya tanamnya sekitar Rp 2 juta. Hasil panen padi seputar Rp 8 juta. Jadi, total keuntungan panen padi sekitar Rp 4 juta. Penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bulanannya yang kurang-lebih Rp 2 juta. Untuk mengatasi kekurangannya, Ad harus menjadi buruh traktor maupun mengutang ke orang lain.

> Penghasilan Rp 2,4 juta itu untuk pengeluaran rutin bulanan tetap tidak cukup, sehingga harus mengutang, dan akan dibayar kalau panen nantinya. Pengeluaran rutin bulanan sekitar Rp 2 juta-an. Sekolah anak (dulu waktu anak masih sekolah) Rp 1 juta-an. Untuk yang lainnya bayar listrik, beli beras, pulsa, hingga Rp 1 juta-an. Biaya sebesar itu tidak cukup, bahkan terkadang harus mengutang. (Wawancara dengan Ad, 19 Februari 2011)

Buruh tani padi malah lebih mengenaskan lagi nasibnya. Ada perbedaan honor antara buruh tani laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki, honornya Rp 30.000,00/hari. Sedangkan untuk perempuan, Rp 20.000,00/hari. Perbedaan ini didasari pada prasangka bahwa laki-laki lebih kuat

ketimbang perempuan. Honor tersebut masih kotor karena belum dikurangi biaya makan, sehingga honor bersih buruh tani hanya Rp 20.000,00. Kalau sebulan bisa bekerja secara penuh, maka penghasilan bersihnya adalah Rp 600.000,00. Untuk ongkos petik padi, buruh tidak dibayar dengan uang melainkan padi, dengan perbandingan 7:1, 7 kg untuk petani pemilik lahan, 1 kg untuk buruh. Saat panen tiba, kalau sepasang suami-istri sama-sama bekerja sebagai buruh tani, keluarganya terkadang bisa mendapatkan padi sebanyak 4 kuintal.

Penghasilan seorang buruh tani di Sumedang tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Dalam setahun, seseorang mungkin hanya bekerja sebagai buruh tani selama 3-4 bulan, sisanya ia akan mencari kayu bakar untuk dijual dengan harga Rp 15.000,00/ikat untuk menutupi kekurangan biaya hidupnya. Usaha lainnya adalah dengan berhutang kepada orang lain yang dibayar pada saat panen. Jumlah hutang seorang buruh tani tiap bulannya bisa mencapai Rp 200.000,00. Kalau tidak mencukupi, ia akan berhutang lagi pada bulan berikutnya dengan jumlah yang sama, hingga jumlah hutangnya mencapai Rp 800.000,00 sampai Rp 1 juta. Hutang tersebut akan dibayar saat panen, tetapi tidak dibayar semuanya. Kalau dibayar semua, padi hasil kerjanya sebagai buruh akan habis, jadi harus ada yang disisakan untuk dimakan. Pengeluaran terbesar buruh tani dalam sebulan sekitar Rp 200.000,00 sampai Rp 500.000,00. Di antaranya, untuk membeli lauk-pauk, bayar listrik, serta kebutuhan lainnya (wawancara dengan Ars, 26 Februari 2011).

Tabel 3.1.
Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Petani Tembakau dan Padi di Kabupaten Sumedang

Indikator	Petani tembakau		Petani padi	
	Pemilik lahan	Buruh tani	Pemilik lahan	Buruh tani
Pendapatan	Lahan 1 ha mendapatkan hasil Rp 6-9 juta	Rp 3,5 juta untuk ½ ha dari hasil buruh dan sewa lahan	Untuk lahan 1 ha biaya Rp 4.400.000,00 menghasilkan Rp 8 juta, sumber lain adalah budidaya lele	Jika menjadi buruh penuh waktu, penghasilan Rp 900 ribu/bulan; untuk buruh petik padi, modelnya bagi hasil 7:1, 7 kg untuk pemilik lahan, 1 kg untuk buruh. Sekali musim panen kadang dapat 4 kuintal (Rp 1.200.000,00)
Pengeluaran	Rata-rata antara Rp 1-1,5 juta (uang jajan anak, biaya sekolah, buku, amplop hajatan, listrik, dan kebutuhan harian)	Rata-rata Rp 1,3 jutaan (biaya sekolah anak, uang jajan sekolah, listrik, pulsa, cicilan bank)	Rp 1 jutaan (listrik, telepon, dan biaya kebutuhan harian)	Rp 200 ribu-Rp 1 juta-an (kalau tidak punya anak sekolah)
Tambahan penghasilan	Tanam palawija, sayuran, jual kebutuhan harian dan makanan ringan, ternak sapi	Tukang kayu bangunan, kuli bangunan	Beternak lele, sewa lahan untuk tanaman palawija dan sayuran	Jual kayu bakar, buruh untuk tanaman palawija (nonpadi), berhutang uang ke orang lain, kuli bangunan, kuli traktor
Pemilikan aset	Rumah dinding batako, sepeda motor meski cicilan, ada televisi, kulkas	Rumah dinding batako, lantai semen	Rumah dinding batako,	Rumah dinding kayu, lantai tanah, sepeda pancal, listrik menumpang ke tetanggal, tidak ada TV
Tingkat pendidikan	SD-SMA	SD-SMP	SR, perguruan tinggi	SR dan SD, pesantren

Sumber: diolah dari hasil observasi 15-25 Februari 2011.

Berikut kita ringkas situasi perekonomian petani tembakau dan padi di Sumedang. Dari segi biaya, biaya menanam padi pada lahan 1 ha tidak berbeda jauh dengan biaya menanam tembakau pada lahan yang sama. Akan tetapi,

harga jual komoditas tetap lebih besar tanaman tembakau. Sementara itu, kesejahteraan buruh tani tembakau maupun padi nyaris sama—ongkos buruh tani sama-sama Rp 30.000,00/hari, kecuali ada pekerjaan tambahan (lembur) dengan bayaran Rp 30.000,00 meski dengan waktu hanya tiga jam. Selain itu, risiko tanaman tembakau lebih kecil daripada tanaman padi. Dari siklus delapan tahunan, hanya sekali harga tembakau anjlok, selebihnya cukup stabil, bahkan kalaupun jatuh tetap tidak sampai rugi modal, atau minimal impas (biaya tanam sama dengan pendapatan hasil jual panen).

DARAH DAGING PETANI DEMAK

Kesejahteraan petani di dua desa yang menjadi lokasi penelitian di Demak, Sumberejo dan Banyumeneng, tidak ditentukan oleh posisinya dalam pekerjaan. Di wilayah ini tidak ditemukan kategori buruh tani. Hampir dapat dipastikan, semua petani adalah penggarap lahan sawah, meskipun didapatkan dari hasil sewa, sehingga tidak ditemukan pekerja yang hanya menjadi buruh, semata bergantung pada pemilik lahan. Minimal rata-rata lahan yang disewa seorang petani seluas 1/4 *bahu* atau kira-kira 1.750 m^2. Sementara, pemilik lahan yang juga sekaligus penggarap memiliki lahan rata-rata di atas 1/2 *bahu* (atau setara dengan 3.500 m^2). Contoh petani penggarap adalah Mn, yang menggarap lahan *bengkok* di Banyumeneng. Ia sendiri berasal dari luar Banyumeneng, tetapi istrinya berasal dari desa ini. Ia tidak punya lahan sendiri dan menyewa lahan di desa ini.

Ada lagi jenis petani lain, yaitu pemanfaat lahan hutan, seperti Ksm yang mendayagunakan kawasan hutan di Hutan Barang. Ksm tidak menyewa tanah di hutan itu, melainkan bertugas sebagai pelestari hutan dengan membudidayakan tanaman produksi. Sejak tahun 1999, setelah Hutan Barang di wilayah Banyumeneng habis dijarah, diperkenalkan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Perhutani kemudian memberikan kesempatan kepada petani di sekitar hutan untuk memanfaatkan lahan gundul dan menanaminya dengan tanaman produktif, selain tetap menjaga kelangsungan tanaman hutan dengan mereboisasi pohon jati, misalnya. Di sela-sela tanaman jati itu ditanami tanaman tegalan, seperti sayuran, pisang, dan sebagainya. Jadi, ia menggarap lahan *kukrukan*, demikian istilah lokal menyebutnya, seluas lebih kurang 1 ha. Namun, karena lokasinya di hutan, musuh terbesarnya justru adalah binatang hutan seperti landak, kera, babi hutan, dan sebagainya (wawancara dengan Ksm, 20 Februari 2011).

Mn, sebagai petani penggarap lahan sewaan, tidak lagi menanam tembakau selama tiga tahun terakhir ini. Ia kecewa dengan anjloknya harga tembakau setelah sempat tinggi pada 1999, dan kini beralih ke tanaman jagung. Setelah beralih bertanam jagung, ia mampu membeli dua sepeda motor dan membiayai kuliah anaknya yang pertama hingga selesai di sebuah perguruan tinggi di Semarang. Dengan menggarap lahan 1/2 *bahu*, ia mampu menghasilkan 2 ton jagung yang setara dengan Rp 6 juta. Dikurangi biaya tanam dan pemeliharaan sebesar Rp 2 juta, keuntungan yang didapatnya Rp 4 juta. Karena masa penen tiga bulan sekali, jika dihitung, setiap bulan ia mendapatkan penghasilan kira-kira Rp 1,3 juta. Jika dibandingkan dengan UMR Ka-

bupaten Demak sebesar Rp 847.987,00 berdasarkan SK Gubernur Jateng, maka penghasilan menanam jagung di atas lahan 1/2 bahu melebihi angka UMR. Namun, ia mengaku, penghasilan sebesar itu jelas kurang mencukupi jika diperuntukkan membiayai anaknya kuliah. Ia merasa beruntung memiliki mesin pembajak sawah, sehingga ia sering menawarkan jasanya kepada para petani lain dengan upah hingga Rp 200.000,00/hari (wawancara dengan Mn, 19 Februari 2011). Memang, jika petani menggarap lahan kurang dari 1/2 *bahu*, perolehannya dari bertanam jagung akan setara atau mungkin di bawah UMR Kabupaten Demak.

Kediaman Mn adalah rumah khas petani, dengan ruangan bagian depan kosong dan biasanya untuk menyimpan hasil panen sebelum dijual. Dinding rumahnya tersusun dari kayu dan lantainya masih berupa semen, kecuali teras rumahnya yang telah dikeramik. Di dalam rumahnya ada meja kursi dari kayu serta satu *buffet* dengan pesawat televisi di atasnya. Sementara, sisa ruangan seluas lebih kurang 10 m^2 dibiarkan kosong. Kehidupannya sebagai petani penggarap yang mengandalkan sewa lahan berjalan dengan sekadarnya, bersahaja. Bagaimanapun, hal ini sudah membuatnya bangga. Namun, ia masih bermimpi suatu saat bisa menanam tembakau lagi jika harganya tinggi (wawancara dengan Mn, 19 Februari 2011).

Pemandangan yang hampir sama dapat kita jumpai pada petani penggarap berinisial Na di Banyumeneng. Rumahnya terbuat dari kayu dan di dalamnya hanya terdapat meja kursi kayu yang sudah usang. Pesawat televisi menjadi satu-satunya barang mewah di rumah tersebut. Teras rumahnya sendiri terkesan dibiarkan apa adanya, berlantai tanah. Pin-

tu rumahnya terbuat dari kayu yang terlihat kusam dengan kaca pintu yang sudah pecah. Petani penggarap sewa memang hidup dengan taraf ekonomi yang cukup rendah.

Pola yang cukup berbeda kita temukan pada petani pemilik lahan seperti S di Sumberejo. Selain disegani karena jabatannya yang tinggi di desa, S juga seorang pemilik lahan. Rumahnya berdinding tembok dan lantainya keramik. Kebetulan ia sempat mengenyam pendidikan tinggi hingga universitas di sebuah perguruan tinggi di Kudus. Ia mengaku banyak menyewakan tanahnya, 1/4 *bahu* kepada beberapa orang. Dengan bertani, ia sanggup menyekolahkan kedua anaknya hingga perguruan tinggi (wawancara dengan S, 23 Februari 2011).

Tabel 3.2.
Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap/Penyewa Tanah dan Petani Penggarap/Pemilik Tanah di Mranggen, Demak

Kedudukan petani	Kondisi rumah	Pendapatan	Tingkat pendidikan
Penggarap/penyewa	Berdinding kayu, berlantai semen	Di bawah UMR	Rendah
Pemilik lahan	Berdinding tembok, berlantai keramik	Di atas UMR	Tinggi

Sumber: diolah dari hasil wawancara dan observasi.

Untuk menggambarkan kesejahteraan petani tembakau, informasi yang dihimpun dari aparat Desa Banyumeneng menyebutkan, ketika tembakau dari Sumberejo laku dengan harga tinggi, puluhan sepeda motor akan masuk ke desa itu setiap harinya, baik yang baru maupun bekas pakai. Anak-anak sekolah sekonyong-konyong saja banyak memakai motor baru sewaktu tembakau laku. Perempuan Sumberejo yang pergi ke sawah juga tidak ketinggalan menggunakan

perhiasan emas. Tingginya harga tembakau juga merambah ke sektor lain, membuat perekonomian menggeliat bergairah. Pasar Mraggen pun menjadi ramai. Aparat yang memiliki tanah *bengkok* di Banyumeneng juga senang karena harga sewa turut naik. Hanya saja, sayangnya, hal tersebut tidak berlangsung lama. Mereka tidak sungkan-sungkan untuk menjual lagi sepeda motornya, misalnya, ketika yang punya tanah meminta uang sewa tanah. Atau, sewaktu membutuhkan biaya tanam lagi, barang yang didapatkan dari tembakau dijual lagi untuk modal (wawancara dengan Nga, 16 Februari 2011).

Gambaran di atas memperlihatkan bagaimana panen tembakau memiliki kontribusi ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan panen komoditas nontembakau. Dengan catatan, jika harga tembakau tinggi. Petani penggarap yang memiliki lahan, seperti S, secara rutin tetap bertanam tembakau. Ia tidak bisa beralih ke tanaman lain pada saat di wilayahnya musim tembakau, karena menurutnya hasil terbaik tetap dari tembakau. Apalagi tanah di wilayahnya paling bagus untuk menanam tembakau (wawancara dengan S, 16 Februari 2011).

Salah seorang informan menuturkan:

> Kalau *pas* tembakau laku, keuntungan saya jauh lebih besar daripada bertanam padi atau jagung. Paling bagus harga tembakau itu, di sini, tahun 1999. Saat itu harga tembakau mencapai di atas Rp 30.000,00 (per kg). Jadi, dengan empat kali petikan daun, total keuntungan saya sampai Rp 15 juta lebih untuk ukuran 1/4 *bahu*. Tapi tahun berikutnya tidak pernah bagus. Pernah ada yang sampai di atas Rp 20.000,00

(per kg) untuk petikan satu dan dua, tapi setelah itu anjlok sampai di bawah Rp 10.000,00 (per kg). Saya jelas rugi dibandingkan modal yang harus saya keluarkan. Kalau padi dan jagung harganya stabil, segitu saja, paling saya dapat dari jagung sekitar Rp 2 juta lebih untuk 1/4 *bahu*. Itu sudah bersih. (Wawancara dengan Nim, 17 Februari 2011)

Masyarakat setempat menganggap bertanam tembakau lebih padat modal daripada tanaman lain. Dari kedua desa yang merepresentasikan situasi pertanian di Demak, harga tenaga untuk tanaman tembakau juga lebih tinggi dibandingkan komoditas nontembakau. Seperti dituangkan dalam Tabel 3.3, pengeluaran modal untuk 1 ha diperkirakan mencapai Rp 16 juta, termasuk untuk biaya pembelian obat. Angka tersebut termasuk untuk biaya pekerja yang sekarang menggunakan sistem borongan yang memberikan keuntungan lebih tinggi kepada pekerja daripada sistem harian. Sistem borongan hanya dikenal dalam pertembakauan, dan tidak dikenal dalam tanaman nontembakau. Pada saat panen, dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk memotong dan merajang daun. Biaya memetik daun biasanya juga dilakukan dengan borongan. Adapun untuk perajangan harga standar di daerah ini Rp 75.000,00 untuk jam kerja semalam suntuk.

Akan tetapi, biaya pengolahan itu kerap tidak diimbangi dengan harga jual tembakau yang fluktuatif. Harga jual komoditas ini selalu berubah dan beberapa kali jatuh. Petani meyakini, jika harga tembakau kering per kilogram di bawah Rp 10.000,00, maka dapat dipastikan petani tembakau merugi. Sebaliknya, jika harga tembakau per kilo-

gramnya menembus angka di atas Rp 20.000,00, bertani tembakau jelas lebih menguntungkan dibandingkan bertani nontembakau (wawancara dengan S, 16 Februari 2011).

Tabel 3.3.
Perbandingan Pendapatan Petani Tembakau dan Nontembakau (Jagung/Padi) di Mranggen, Demak

Jenis tanaman	Luas (ha)	Masa tanam (bulan)	Biaya tanam (juta Rp)	Jumlah hasil panen	Harga
Tembakau	1	6	16	Bervariasi, tergantung kualitas daun tembakau; dan dipetik sampai daun petikan ketujuh. Rata-rata 1,3 ton	Harga daun petikan pertama hingga terakhir bervariasi, dari harga Rp 8.500,00/kg sampai Rp 27.000,00/kg. Rata-rata Rp 20.000,00/kg. Jadi, total Rp 26 juta.
Non-tembakau (jagung/padi)	1	3	6-7	4-4,5 ton	Tergantung kualitas jagung/padi dan tengkulak membelinya Rp 2.500,00'kg, sehingga total yang didapatkan sebesar Rp 10 juta.

Sumber: diolah dari hasil wawancara dan FGD.

Sekalipun harga tembakau hanya bagus pada petikan pertama atau kedua saja, dan selanjutnya jatuh, petani yang terbiasa bertanam tembakau selalu menanam komoditas ini. Kalau harga tembakau turun, petani menyiasatinya dengan mengurangi luas lahan tanamnya dari tahun sebelumnya. Adapun, komoditas nontembakau seperti padi, jagung, dan kedelai dianggap memiliki harga yang terlampau standar. Bahkan, bertani padi dipandang hanya dimanfaatkan untuk memenuhi cadangan beras keperluan rumah tangga petani.

Perlu ditambahkan, pertanian tembakau memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan pertanian nontembakau. Tinggi atau rendahnya kesejahteraan petani tembakau juga sangat ditentukan oleh pihak eksternal, paling utama adalah para tengkulak. Mereka membeli tembakau petani untuk dijual ke gudang pabrik rokok yang berdiri di wilayah ini, terutama dari pabrikan besar seperti Sampoerna, Gudang Garam, Noroyono, Sukun, dan lain-lain. Melalui para tengkulaklah petani menjual tembakau kering mereka ke gudang pabrik rokok tersebut. Apalagi, tembakau dari wilayah ini paling cocok untuk rajangan rokok kretek pabrikan, bukan jenis lain seperti lintingan maupun cerutu. Karena amat dipengaruhi oleh tengkulak, salah seorang narasumber, Isw, dalam wawancara pada 22 Februari 2011, menyampaikan bahwa pedagang atau tengkulak selalu lebih untung daripada petani tembakau, *"Biar harga tembakau murah pun, tengkulak tetap untung."*

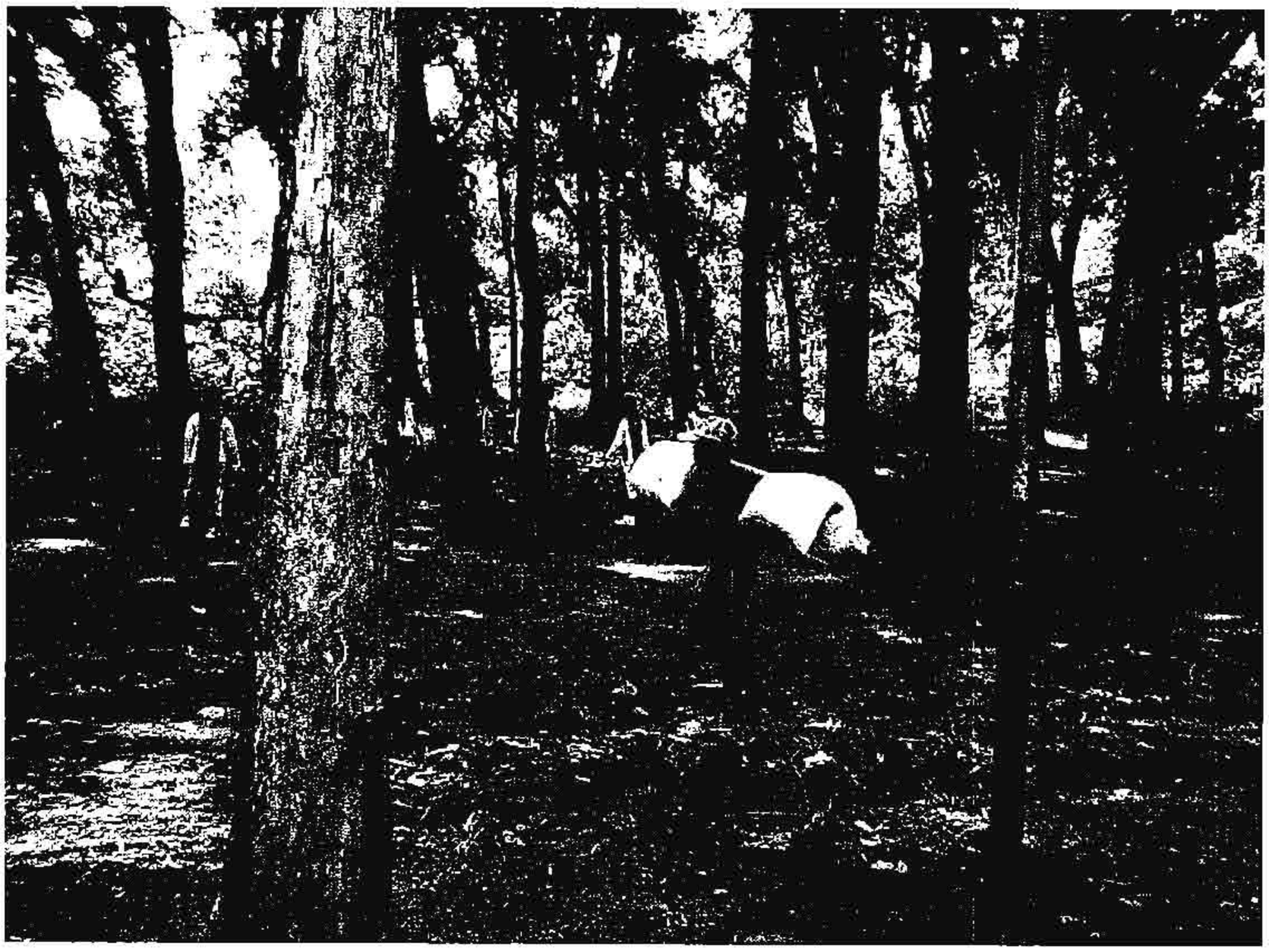
Ada dua jenis tengkulak di Mranggen: tengkulak yang berjalur ke pabrik dan tengkulak mandiri. Tengkulak yang berjalur ke pabrik berhubungan dengan gudang pabrik rokok yang mempercayakan pembelian tembakaunya kepada para penimbang kualitas atau biasa disebut *grader*. Mayoritas tengkulak bergantung pada para *grader*. Adapun tengkulak mandiri adalah mereka yang mempunyai modal, dalam artian tidak dimodali oleh pabrik, dan memiliki gudang sendiri. Mereka menjadi tengkulak merangkap *grader* di gudangnya sendiri. Tengkulak ini biasanya beroperasi menunggu gudang pabrik rokok besar tutup. Pada saat gudang pabrik besar sudah tutup, biasanya di rumah petani masih ada sedikit simpanan tembakau. Tengkulak mandiri ini lantas mendatangi petani untuk membeli tembakau

tersebut dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pabrik. Pada saat tengkulak pabrik sudah mandeg, dan pabrik tidak lagi membeli, petani tidak mempunyai pilihan lain selain menjual tembakaunya kepada tengkulak mandiri. Tampilnya para tengkulak mandiri ini menjadi satu-satunya alternatif penjualan tembakau bagi petani.

Oleh para tengkulak mandiri ini, kadang tembakau yang masih di tangan petani dihargai hanya sebesar Rp 2.000,00 atau Rp 3.000,00, maksimal Rp 5.000,00, yang tentu sangat jauh bila dibandingkan dengan harga jual ke gudang pabrik besar. Tengkulak mandiri lantas menimbun tembakau, dan biasanya, setengah tahun kemudian akan ada perusahaan rokok kecil yang mencari tembakau. Tengkulak ini pun menjualnya dengan harga tiga hingga lima kali lipat dari harga beli dari petani. Di sinilah petani tembakau lagi-lagi dipermainkan. Penat dengan semua ini, salah seorang informan menyampaikan, jika petani memiliki modal untuk mendirikan gudang yang biayanya cukup mahal, pasti mereka punya kedudukan yang lebih kuat di hadapan para tengkulak (wawancara dengan Nim, 17 Februari 2011).

Petani tembakau sangat bergantung pada para tengkulak lantaran komoditas ini amat berisiko jika disimpan di rumah. Tembakaunya akan mudah busuk atau anjlok kualitasnya akibat terserang jamur. Petani bahkan rela untuk melepas tembakaunya meski tengkulak hanya memberi sedikit uang muka, atau, lebih lagi, hanya menyerahkan catatan sekadarnya—yang di wilayah ini disebut sebagai *garet*. Apalagi, kalau harga tembakau sedang bagus-bagusnya, tidak ada uangnya sekalipun petani kemungkinan besar akan melepas tembakau kering mereka ke tengkulak, sebab

mereka ingin tembakau keringnya lekas diterima pihak gudang.



Petani dari Hutan Mranggen

Mn, seorang petani tembakau, baik pada saat harga tembakau bagus maupun jelek, menitipkan tembakaunya ke petani tembakau lain. Pernah, pihak yang dititipinya mengaku tidak dibayar oleh tengkulak. Deritanya makin menjadi-jadi ketika harga tembakau anjlok. Karena sudah kecewa dipermainkan tengkulak dengan sistem *garet* ini, ia tidak bertanam tembakau selama dua tahun terakhir. Alat-alatnya pun, seperti *widig* (tempat menjemur tembakau) yang jumlahnya mencapai 125 buah serta alat rajang sudah rusak atau hilang entah ke mana. Dulu, ketika masih bertanam tembakau, sering kali ia berspekulasi dengan berta-

nam tembakau sampai hampir seluas 1 ha dengan sistem sewa tanah. Suatu ketika, tembakaunya tidak laku, dan ia pun terpaksa membabat pohon tembakaunya. Ia rugi total (wawancara dengan Mn, 19 Februari 2011).

Tetapi apa boleh buat, sebagaimana yang dikatakan S, masyarakat Desa Sumberejo sudah terlalu akrab dengan tembakau. Terutama, karena di seputar wilayah Mranggen, tanah desa ini paling bagus untuk tanaman tembakau. Wilayah ini tidak pernah mengganti tembakau sebagai komoditas utamanya, meskipun sering kali telah mendapat sosialisasi untuk beralih ke tanaman lain. Lagipula, petani setempat melihat hasil jual tanaman lain tetap tidak bisa menyaingi hasil jual tembakau.

Jangan heran, aktivitas-aktivitas besar di Sumberejo tak pernah lepas dari panen tembakau. Banyak acara hajatan keluarga seperti sunatan, pernikahan, maupun membangun rumah dilangsungkan setelah musim panen tembakau. Memang, harga tembakau di Sumberejo, atau secara luas di Mranggen dan Karangawen, tidak sepadan dengan harga tembakau di daerah lain yang memiliki kualitas tembakau yang jauh lebih bagus. Sekalipun begitu, harga yang biasa diterima para petani tembakau sudah terhitung sangat menguntungkan bagi mereka (wawancara dengan S, 19 Februari 2011).

HARGA JUAL TINGGI DI TENGAH ANEKA TANTANGAN

"Yang penting disyukuri apa adanya," ujar Asr, petani tembakau dari Jambu, Temanggung. Btk menambahkan,

"Ya, dicukup-cukupkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari." Ketika ditanyai perihal pendapatan mereka, para petani tembakau di Temanggung biasanya menjawab dengan normatif, mensyukuri rezeki seadanya yang sudah didapat. Meskipun demikian, data menunjukkan, penghasilan dari tembakau jauh lebih besar bila dibandingkan dari komoditas lainnya, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini (lihat hal berikutnya).

Data di atas menunjukkan penghasilan tembakau satu musim saja sudah bisa memenuhi pengeluaran sehari-hari bahkan hingga satu tahun penuh. Bila tembakau yang dipanen berkualitas bagus dan harga pasarannya sedang tinggi, pendapatan petani bisa lebih tinggi lagi. Memang, ada kasus-kasus khusus, seperti yang dialami Sjn yang pendapatan dari tembakaunya tidak setinggi tiga petani lainnya. Akan tetapi, ada pula Nrh yang lahan tembakau tegalannya sering menghasilkan *srintil*. Dengan lahan seluas lebih dari 1 ha, pada masa panen tahun lalu ia memperoleh Rp 225 juta.

Namun, tantangan dalam pengelolaan uang atau manajemen pengeluaran juga banyak dihadapi petani. Pola pembelanjaan yang terlalu boros menjadi persoalan tersendiri pascapanen tembakau di Temanggung. Rcb menuturkan:

> Kebiasaan buruk dari petani tembakau itu boros pada masa panen tembakau... misalnya kalau beli emas, tidak tahu harga (tidak mempertimbangkan harga), nanti saat membutuhkan (uang) dijual lagi juga tidak tahu harga, berapa saja dijual.

Sebagai pembanding, berikut dipaparkan pendapatan petani kopi, komoditas yang juga andalan Temanggung. Data tersebut merupakan penghasilan bersih petani kopi, setelah dikurangi ongkos produksi yang berkisar antara Rp 3-4 juta. Perlu juga menjadi catatan, panen kopi dilakukan setahun sekali. Pendapatan petani kopi juga berasal dari jasa seperti penggilingan kopi, atau istri yang bekerja. Pengeluaran Stt merupakan pengeluaran yang tertinggi di antara petani kopi lainnya karena ia memiliki putri yang masih kuliah. Penghasilan kopi Msd paling kecil lantaran selain lahannya paling sempit, lahan yang digarapnya itu juga hanya lahan sewaan. Begitu juga dengan Stt, 1,5 ha dari total lahan yang dikerjakannya merupakan lahan bagi hasil dengan perhitungan 60:40. Pendapatan Stt dari kopi di atas merupakan estimasi yang belum dikurangi biaya bagi hasil dari sebagian lahannya yang merupakan lahan bagi hasil.

Ketika ditanyai tentang pendapatan dan pengeluaran petani, Azs menjawab, *"Sebenarnya tidak cukup, namun, tergantung harganya; kalau di bawah Rp 15.000,00/kg tidak cukup."* Dari data tersebut juga terlihat bagaimana petani kopi amat membutuhkan penghasilan tambahan untuk menutupi pengeluaran rumah tangganya.

Pada rumah tangga di pedesaan, pengeluaran sosialnya relatif tinggi. Pengeluaran besar itu biasanya terjadi pada saat-saat *lair, seneng, loro, mati;* pada saat ada yang melahirkan, hajatan pernikahan, menjenguk orang sakit, dan menyumbang pada keluarga yang berduka karena kematian salah satu anggota keluarga (wawancara berkelompok di dusun Cepit, 21 Februari 2011). Pengeluaran untuk aktivitas ini, menurut para petani, cukuplah besar. Adapun untuk

kebutuhan makan sehari-hari, petani biasanya memiliki simpanan bahan makanan berupa beras maupun *inthil* olahan jagung. Untuk sayurnya bisa memetik di ladang sendiri (wawancara dengan Wld, 19 Februari 2011). Untuk makan relatif tidak terlalu banyak mengeluarkan uang, namun untuk kebutuhan sosial bentuk pengeluarannya berupa uang.

Tabel 3.4.
Pendapatan Petani Tembakau dari Usaha Tembakau dan Nontembakau di Temanggung

Wld (1 ha)	Thr (1 ha)	Btk (1/4 ha)	Sjn (1/2 ha)
Penghasilan tembakau Rp 30.000.000,00	Penghasilan tembakau Rp 29.377.500,00	Penghasilan tembakau Rp 11.000.000,00	Penghasilan tembakau Rp 7.000.000,00
Penghasilan cabe Rp 2.000.000,00	Penghasilan kopi Rp 7.700.000,00	Penghasilan cabe Rp 5.000.000,00	Penghasilan padi Rp 7.600.000,00
Penghasilan jual obat Rp 1.200.000,00/tahun	Penghasilan kubis Rp 7.670.000,00	-	-
Pengeluaran Rp 1.430.000,00/bulan	Pengeluaran ± Rp 1.500.000,00/ bulan	Pengeluaran Rp 500.000,00/bulan	-

Sumber: diolah dari hasil wawancara.

Tabel 3.5.
Pendapatan Petani Kopi dari Usaha Kopi dan Nonkopi di Temanggung

Stt (2 ha)	Wnn (0,5 ha)	Msd (0,3 ha)	Azs (1 ha)
Penghasilan kopi Rp 12.000.000,00	Penghasilan kopi Rp 8.250.000,00	Penghasilan kopiRp 3.000.000,00	Penghasilan kopi Rp 9.000.000,00
Penghasilan lain: istri PNS Rp 2.500.000,00	Penghasilan lain Rp 5.000.000,00 -	Penghasilan lain: istri jualan sayur keliling Rp 5.000,00- Rp 20.000,00/hari	Penghasilan lain: jasa penggilingan panggilan -
Pengeluaran Rp 2.500.000,00/bulan	Pengeluaran Rp 500.000,00/bulan	Pengeluaran Rp 900.000,00/bulan	Pengeluaran Rp 750.000,00/bulan

Sumber: diolah dari hasil wawancara.

Permasalahan utama yang dihadapi petani kopi dan tembakau di Temanggung adalah kepemilikan lahan yang

sempit. Rata-rata petani hanya memiliki lahan seluas 0,2-0,5 ha. Akibatnya, penghasilan petani kecil. Sebagian petani kopi mengakali sempitnya lahan yang dimiliki dengan menyewa lahan pada perusahaan perkebunan besar. Di Gesing ada lahan milik pemerintah yang disewakan kepada perusahaan dari Semarang. Lantaran kurang efektif, perusahaan menyewakan lagi lahan tersebut kepada petani setempat untuk digarap. Hasilnya, setelah digarap petani lahan itu menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan produktivitasnya pada saat masih digarap perusahaan (wawancara berkelompok dengan Stt dan Smn, petani kopi, 24 Februari 2011). Petani di daerah Plosogaden, Kecamatan Candiroto, juga menggarap lahan milik Perhutani dan hasilnya relatif bagus (wawancara berkelompok dengan Azs, petani kopi, dan pedagang perantara kopi, 27 Februari 2011). Petani kopi berharap lahan seperti ini bisa langsung disewakan pemerintah kepada petani (FGD, 26 Februari 2011).

Petani tembakau yang lahannya kecil menyiasati keadaan tersebut dengan menjadi pengrajin tembakau, yaitu petani yang mencampur tembakaunya dengan tembakau yang didatangkan dari luar daerah Temanggung (wawancara dengan Sjn, petani tembakau sawah, dan informan lainnya, 21 Februari 2011). Tembakau yang dihasilkan dari lahannya, apabila diolah tidak sampai satu keranjang. Maka, ia perlu mencampurkannya dengan tembakau yang didatangkan dari tempat lain agar hasilnya cukup banyak. Bila petani yang lahannya sempit itu tidak mengolah sendiri hasil panennya, tembakaunya akan dijual di ladang (wawancara dengan Rcb, petani tembakau, 23 Februari 2011). Semua

ini dilakukan untuk mendatangkan penghasilan yang lebih besar meskipun dalam kondisi lahan yang sempit.



Menggulung tembakau (foto: Humas Pemkab Temanggung)

Di samping itu, baik petani kopi maupun tembakau yang lahannya sempit tidak hanya menggantungkan pendapatannya pada dua komoditas tersebut. Petani juga melakukan intensifikasi pertanian pada lahannya. Dalam siklus tanamnya ada tanaman lain yang juga ikut ditanam. Untuk menopang hidupnya, petani kopi melakukan tumpang sari tanaman dan bekerja pada sektor lain. Tanaman sampingan yang ditanam di sela-sela kopi di antaranya kapulogo, pisang, petai, kakao, sukun, dan sengon (wawancara dengan Msd, petani kopi, 27 Februari 2011). Tanaman ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sambil menunggu musim petik. Di samping itu, penghasilan petani berlahan sempit tidak cukup jika menggantungkan

diri pada panen kopi. Petani kopi dengan lahan kecil biasanya memiliki pekerjaan lain seperti *mblandong*, tukang bangunan, atau pekerjaan di sektor informal.

Siklus kesejahteraan petani tembakau tidak hanya dipengaruhi masa tanam tembakau saja, namun juga terkait masa tanam lainnya. Oleh karena itu, sebelum atau sesudah masa tanam tembakau petani menanam komoditas lain di lahannya. Jika komoditas yang ditanam sebelum musim tembakau memberi hasil optimal, petani bisa terhindar dari berhutang untuk modal tembakau. Namun, jika tidak optimal, biasanya mereka akan bergantung kembali pada penghasilan tembakau yang relatif lebih besar dibandingkan komoditas lain. Atau, kalau lebih buruk lagi, bisa jadi mereka terbelit hutang yang semakin menumpuk. Sebagai contoh, belakangan petani di Desa Jambu, Kecamatan Tlahap, yang menanam kubis sebelum tembakau merasa khawatir tidak memiliki modal untuk menanam tembakau. Pada saat penelitian ini dilakukan, harga kubis jatuh ke tingkat Rp 250,00/kg. Tidak sedikit petani yang membiarkan kubisnya di ladang tidak dipanen. Bahkan, ada yang tanaman kubisnya hancur sama sekali karena serangan hama pijer dan upas embun (wawancara berkelompok dengan Ist dan Asr, petani tembakau, 28 Februari 2011). Hal ini menunjukkan betapa petani amat rentan, tidak terlindung dari ancaman-ancaman fluktuasi harga dan kegagalan panen.

Persoalan yang dihadapi petani kopi dalam tata niaga di antaranya adalah banyaknya tengkulak. Petani terdesak, sehingga harus memetik kopinya selagi masih hijau untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari (http://www.temanggungkab.go.id; wawancara dengan Thr, petani tembakau, 23 Februari 2011). Petik hijau juga disebabkan persoalan

keamanan (wawancara dengan Azs, petani kopi, 27 Februari 2011). Petani khawatir bila menunggu merah, maka kopinya akan dirampas pencuri, seperti yang terjadi di daerah Plosogaden. Hal ini menyebabkan menurunnya kualitas kopi yang dihasilkan. Petani kopi di Tlahap juga mengalami persoalan yang sama. Bahkan, petani Tlahap sempat mengajukan permintaan kepada pemerintah provinsi untuk memperoleh dana talangan agar bisa menunggu kopi mereka memerah, namun dana talangan ini tidak kunjung direalisasikan (wawancara dengan Thr, petani tembakau, 23 Februari 2011).

Untuk mulai menanam tembakau dibutuhkan modal yang relatif besar. Biasanya, petani mulai menyimpan sebagian hasil panen tahun kemarin dalam bentuk pupuk, baik itu pupuk kandang maupun pupuk kimia (wawancara dengan Wld, petani tembakau, 19 Februari 2011). Namun, untuk pengolahan lahan dan biaya lainnya, petani tembakau tidak jarang mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Alternatif untuk memenuhi biaya produksi ini biasanya adalah meminjam kepada juragan/pedagang tembakau (semua informan yang ditanyai menyatakan demikian). Sistem pinjaman ini dikenal dengan *nglimolasi,* yaitu pinjaman dengan bunga 50%.[1] Misalnya, bila meminjam uang Rp 1 juta harus mengembalikan sebesar Rp 1,5 juta pada saat panen tembakau tiba. Lingkaran hutang dengan bunga tinggi ini menjerat dan memangkas sebagian besar penghasilan petani, akibatnya kesejahteraan ekonomi mereka merosot. Bahkan, ada pemberi pinjaman licik yang bermaksud mengambil

1 Sekarang *rate* bunganya bervariasi, mulai dari *nelulasi* (tiga belasan), yang meminjam Rp 1.000.000,00 mesti mengembalikan Rp 1.300.000,00, sampai *mitulasi* (tujuh belasan), hutang Rp 1.000.000,00 kembali Rp 1.700.000,00. Angka Rp 1 juta hanya ilustrasi, nilai hutang riil petani biasanya di atas Rp 1 juta.

alih tanah yang dimiliki petani (wawancara dengan PPL, 23 Februari 2011). Pada saat panen tembakau dan petani memiliki uang berlimpah, pemberi pinjaman menyarankan pada petani untuk tidak terburu-buru membayar hutang-nya. Namun, pada saat petani tidak punya uang, pemberi pinjaman menagihnya dengan tujuan dapat menyita tanah milik petani yang tidak bisa membayarnya.

Meminjam uang ke bank dirasa terlalu rumit oleh petani. Mereka pun menganggap prosedur pembayarannya tidak fleksibel. Kalau meminjam uang pada juragan tembakau, mereka tidak perlu mencicil karena semua pinjaman itu akan langsung dilunasi pada saat panen tembakau. Opsi lain adalah meminjam pada institusi keuangan formal dengan menggadaikan properti miliknya seperti kendaraan. Menjual perhiasan juga merupakan cara petani untuk memenuhi biaya produksi. Selain itu, meminjam kepada petani yang memiliki lahan yang luas menjadi salah satu alternatif lain.

Petani yang meminjam uang kepada juragan tembakau memiliki kewajiban untuk menjual tembakau hasil panennya pada juragan yang meminjaminya uang tersebut (wawancara dengan Thr, petani tembakau, 23 Februari 2011). Itu dilakukan dengan harga yang masih bisa dinegosiasikan, meski tidak jarang petani dirugikan karena harga ditentukan oleh sang juragan. Namun, bagi sebagian petani, ada semacam kebanggaan apabila mendapatkan pinjaman dari juragan tembakau, karena petani tersebut mendapat kepastian bahwa hasil panennya akan dibeli oleh si juragan. Sistem yang berawal dari persoalan permodalan ini, ujung-ujungnya akan menjerat petani, sehingga menempatkan

mereka pada kedudukan yang lemah di dalam tata niaga tembakau.

Baik petani kopi maupun petani tembakau kurang merasakan adanya bantuan permodalan saat akan melakukan produksi. Karena itu menjadi lumrah bagi petani untuk pergi ke juragan/pedagang demi meminjam uang. Sistem perbankan belum memiliki mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan dan kultur petani. Pada masa pascapanen, harga diserahkan begitu saja kepada pasar tanpa ada proteksi terhadap petani.

Namun, yang diinginkan petani bukan berarti penjualan melalui mekanisme harga pemerintah yang kerap justru membatasi keuntungan hasil panen (wawancara dengan Asr, petani tembakau, 28 Februari 2011). Yang dirasa dibutuhkan adalah kebijakan harga yang menjamin batas bawah agar petani tidak merugi. Wacana yang digalakkan mengenai pertanian—contohnya tentang kedaulatan pangan—sama sekali belum menyentuh kebutuhan dan berbagai persoalan riil yang selama ini dihadapi petani. Akibatnya, terkesan ada jurang curam di antara harapan pemerintah dan kenyataan yang dihadapi petani.

MERAIH HARAPAN DENGAN BERBAGAI SIASAT

Data memperlihatkan bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PDRB Kabupaten Malang. Di antara berbagai komoditas pertanian tersebut, yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi adalah tembakau. Harga jual tembakau di pasaran jauh lebih tinggi daripada

komoditas-komoditas lainnya. Berikut ini kita dapat melihat data perbandingan tembakau dengan komoditas lainnya. Walaupun luas lahannya sama, perbedaan harga komoditas memberikan total pendapatan yang berbeda.

Tabel 3.6.
Perbandingan Pendapatan Buruh Tani dan Petani Pemilik Lahan Tembakau, Padi, dan Tebu di Kabupaten Malang

Indikator	Buruh tani			Petani pemilik lahan (±1ha)		
	Tembakau	Padi	Tebu	Tembakau	Padi	Tebu
Pendapatan (Rp)	15.000/ lahan	15.000/ lahan	15.000-25.000/ lahan	60 juta/ panen	14 juta/ panen	10 juta/ panen

Sumber: diolah dari hasil wawancara.

Jumlah pekerja lahan ikut mempengaruhi pemasukan hasil panen dari tiap-tiap petani, selain keuntungan juga selalu mengikuti harga pasar maupun harga pengepul yang fluktuatif. Sebagai perbandingan sederhana, untuk luas lahan sebesar 1 ha pada tahun 2010 keuntungan kotor (belum dipotong modal) penjualan padi kurang lebih Rp 14 juta. Dengan luas lahan yang sama, hasil penjualan tebu kurang lebih sebesar Rp 10 juta, sementara hasil penjualan tembakau sekurang-kurangnya Rp 60 juta (wawancara dengan Mm, 16 Februari 2011; Fz, 26 Februari 2011; Ar, 27 Februari 2010). Hasil inilah yang biasanya dipakai untuk membiayai kebutuhan keluarga hingga masa panen berikutnya datang. Penting untuk diketahui, setiap komoditas memiliki masa panen yang berbeda, sehingga pendapatan hasil panen pun bisa beragam, ada yang hanya satu kali per tahun, adapula yang lebih.

Menurut penuturan Kr dan Tu (wawancara, 22 Februari 2011), upah buruh tani tembakau saat ini di Jatiguwi

sebesar Rp 15.000,00/lahan dan rata-rata seorang buruh tani sanggup menggarap 2 lahan/hari. Dengan demikian, penghasilan bulanan yang bisa didapat seorang buruh tani sebesar Rp 900.000,00. Selain pekerjaan rutin semacam ini, ada pula pekerjaan yang sifatnya sewaktu-waktu dan dibayar sesuai waktu kerja. Misalnya, pekerjaan *mbrujul* atau mempersiapkan lahan untuk ditanami (termasuk membajak) yang biasanya diupah sebesar Rp 900.000,00/ha. Normalnya, pekerjaan ini dapat diselesaikan selama 10 hari dan dikerjakan oleh 2-3 orang (wawancara dengan An, istri petani tembakau, 25 Februari 2011).

Selain itu, selama masa panen tembakau, pekerjaan-pekerjaan pascapanen juga mendatangkan rezeki tersendiri; pekerjaan merajang tembakau, misalnya, diupah Rp 20.000,00-Rp 30.000,00/kuintal tergantung dari kualitas pekerjaan. Dengan jumlah petani tembakau yang cukup besar di Jatiguwi, selama musim tembakau tawaran untuk merajang dan menjemur tembakau akan silih berganti berdatangan. Buruh tembakau yang mengerjakan lahan dengan bentuk kerja sama 1:3 akan mendapat jatah panen tembakau sebanyak 1-2 kuintal. Apabila tembakau ini dijual dengan harga pasar Rp 40.000,00/kg (harga minimum) maka bisa menghasilkan Rp 4-8 juta (wawancara dengan Tu, 25 Februari 2011).

Adapun untuk buruh tani padi, upah harian yang diterima hampir sama dengan buruh tembakau, yaitu sebesar Rp 15.000,00/lahan. Seorang buruh tani umumnya mampu mengerjakan 2 lahan/hari. Ksm (wawancara, 26 Februari 2011) sanggup mengerjakan 2 lahan/hari, namun pada musim panen, akibat kurangnya tenaga petani di desanya, ada kalanya ia mengerjakan 3 lahan/hari. Jadi, dalam satu

bulan penghasilan Ksm Rp 900.000,00. Lalu, pada musim panen Ksm bisa mendapatkan jatah beras yang bisa dipakai untuk kebutuhan keluarganya selama 1-3 bulan. Namun, menurut penuturannya, di luar masa panen ada kalanya ia tidak mendapat pekerjaan tani sama sekali. Rm, seorang petani lain, mengaku pada saat-saat seperti ini ia terkadang memotong bambu untuk kebutuhan bangunan. Pekerjaan ini diupah Rp 50.000,00-Rp 60.000,00/hari.

Ketika bekerja sebagai buruh tani tebu, Rm biasa menerima upah Rp 20.000,00-Rp 25.000,00/lahan. Umumnya, dalam sehari para pekerja mampu menggarap 2 lahan, namun Rm memilih untuk mengerjakan 1 lahan/hari. Ia menghindari pekerjaan yang terlalu padat karena ia juga berkewajiban untuk mengerjakan sawah milik orang tuanya yang luasnya kurang lebih 0,25 ha dan lahan rekannya seluas 0,25 ha. Bisa dikatakan, pada siang hari ia mendapat Rp 15.000,00. Ditambah dengan pekerjaan lainnya, Rm bisa menghasilkan Rp 1.050.000,00/bulan. Di luar pekerjaan tersebut, ia juga memiliki ternak 2 ekor sapi. Rm tidak menghitung beternak sebagai pemasukan rutin. Beternak umumnya baru bisa memberikan hasil setelah sapi dipelihara selama 6 bulan-2 tahun. Rm pernah mendapat hanya Rp 1,7 juta, yang dianggapnya sebagai keuntungan minim, ketika menjual sapi yang baru dipeliharanya selama 6 bulan. Sedangkan sapi yang telah dipelihara selama 2 tahun, menurutnya, akan mendatangkan keuntungan Rp 4,4 juta. Melihat jangka waktu yang dibutuhkan untuk membesarkan sapi, Rm (wawancara, 26 Februari 2011) lebih melihat beternak sebagai upaya menabung.

Alasan utama para buruh tani ini menggeluti sektor pertanian tak lain lantaran hidup mereka tak terpisahkan de-

ngan sektor tersebut. Tentu saja, mereka tinggal di wilayah dengan lahan yang amat potensial. Sayangnya, tidak memiliki lahan menempatkan mereka pada posisi yang sulit. Selain itu, secara turun-temurun mereka tak memiliki akses ke dunia pendidikan. Umumnya, para buruh adalah lulusan SD, paling tinggi SMP, sehingga jika ingin masuk ke pasar tenaga kerja, yang tersedia hanya profesi di level paling bawah—baik dari sisi bentuk pekerjaan maupun upahnya.

Akan tetapi, tidak sedikit pula ditemukan buruh tani yang memang memiliki kecintaan terhadap profesinya, seperti Rm. Baginya, menjadi buruh tani adalah pekerjaan yang memberikan kemudahan mengatur waktu dan jika terus ditekuni pekerjaan ini memiliki masa depan yang cerah, bahkan memberikan kemungkinan mobilitas vertikal; diawali sebagai buruh, lama kelamaan menjadi petani penggarap, atau bahkan pemilik lahan.

Tabel 3.7.
Pendapatan Buruh Tani dari Sektor Nonpertanian di Malang

Pekerjaan nonpertanian	Pendapatan (Rp)
Memotong bambu	50.000/hari*
Menggarap lahan padi	450.000/bulan
Beternak sapi	1.700.000** - 4.400.000***

Sumber: diolah dari hasil wawancara.
** Pekerjaan bersifat sampingan tidak rutin dilakukan, jadi tidak ada total pendapatan bulanan.*
*** Laba dari penjualan sapi yang telah dirawat selama enam bulan.*
**** Laba dari penjualan sapi yang telah dirawat kurang lebih dua tahun.*

Agak sulit bagi para buruh tani ini apabila diminta untuk merinci pengeluaran bulanan mereka. Mereka menganut pandangan hidup "mensyukuri rezeki yang ada pada hari ini", sehingga mereka akan selalu menggunakan pendapat-

an berdasarkan tingkat urgensi. Misal, antara listrik atau uang sekolah anak, mereka akan membayar mana yang lebih dekat jatuh temponya, bukan berdasarkan perhitungan bahwa dalam satu bulan mereka harus membayar sejumlah kebutuhan, sehingga sudah terprediksi berapa uang yang harus diperoleh. Oleh karena itu, jika ditanyakan apa saja pengeluaran dalam sebulan, para buruh tidak mengetahui karena tidak bisa mengingat secara pasti apa saja yang biasa dibayarkan dalam sebulan. Namun, apabila diminta memberi hitungan secara kasar, alokasi rutin adalah untuk listrik rumah, pendidikan anak, transportasi, belanja dapur, membeli rokok, uang saku anak, arisan lingkungan. Sedangkan pengeluaran tak terduga adalah untuk memberikan uang kepada keluarga, bingkisan pernikahan, berobat, dan sebagainya.

Angka-angka pengeluaran dan pendapatan yang dijabarkan di atas adalah perkiraan minimum. Di luar itu, ada faktor-faktor yang memungkinkan berkurang dan bertambahnya pendapatan buruh tani, antara lain gagal panen, naik-turun harga pasar, dan kondisi cuaca. Berdasarkan perkiraan kasar tersebut, buruh tembakau dan buruh padi masih mungkin memiliki sisa penghasilan, dengan penghasilan buruh tembakau lebih besar daripada buruh padi. Buruh tebu penghasilannya habis terpakai, bahkan dalam kasus yang diperlihatkan, malah tekor. Dalam kasus buruh tebu Rm, kekurangannya ditambal oleh pendapatan istri. Ia juga berupaya beternak dan menggarap lahan padi untuk menambah penghasilan.

> Kalau keluhan-keluhan *sih* ada, tetapi yang penting beras untuk hidup sehari-hari masih ada.... Yang

Tabel 3.8.
Perbandingan Pengeluaran Rutin Buruh Tani Tembakau, Padi, dan Tebu di Malang

Komoditas	Pemasukan		Pengeluaran	
	Jenis	Jumlah (Rp)	Jenis	Jumlah (Rp)
Tembakau	Rutin	900.000/bulan	Belanja dapur	300.000
	Hasil panen*	750.000/bulan	Uang sekolah anak	200.000
			Uang jajan anak	600.000
			Listrik	100.000
			Minyak tanah	85.000
			Bensin	45.000
			Arisan	30.000
			Rokok	75.000
Total		1.650.000		1.430.000
Padi	Rutin**	600.000/bulan	Belanja dapur	150.000
	Sampingan	50.000/hari	Listrik	30.000
			Bensin	45.000
			Arisan	30.000
			Minyak tanah	65.000
Total		650.000		320.000
Tebu	Rutin	600.000/bulan	Belanja dapur	250.000
	Padi	450.000/bulan	Sekolah anak	15.000
			Listrik	50.000
			Bensin	45.000
			Minyak tanah	65.000
			Komunikasi	20.000
			Arisan	15.000
			Susu anak	300.000
			Cicilan motor	500.000
Total		1.050.000		1.260.000***

Sumber: diolah dari hasil wawancara.
** Hasil panen diasumsikan dari total panen produk tembakau dan nontembakau dibagi 12 bulan.*
*** Diasumsikan buruh tani tidak mendapat pekerjaan setiap hari (wawancara dengan Kasmin, 26 Februari 2011).*
**** Pengeluaran melebihi pemasukan; kelebihan pengeluaran dibantu penghasilan istri yang bekerja di pabrik.*

> penting *barokah*... Ya, kalau semuanya dihitung-hitung, tidak berani memikirkannya. (Wawancara dengan Ksm, 26 Februari 2011)

Kutipan di atas memperlihatkan, buruh tani bukannya tidak bisa menghitung pengeluarannya. Ksm persisnya memilih untuk tidak menghitung pengeluarannya karena berdasarkan perkiraan sepintas, pendapatannya belum tentu bisa menutupi pengeluaran keluarganya. Ia tidak berani merincinya lebih jauh. Sebagai strategi mengatasi kendala tersebut, ia melakukan "tambal-sulam", yaitu menghabiskan terlebih dahulu uang pendapatan rutin, nanti sekiranya pendapatan tersebut sudah habis baru Kasmin akan mencari pekerjaan sampingan.

> Tembakau itu bagi orang tani diumpamakan tabungan. Seumpama saya menanam tembakau, tidak mungkin langsung dijual. Kita tunggu sampai harganya mahal, kalau sudah mahal baru dikeluarkan. Buat saya itu namanya tabungan, dengan jalan menanam tembakau. (Wawancara dengan Tun, buruh tani, dalam FGD, 21 Feb 2011).

Begitulah bagaimana petani tembakau memaknai komoditas yang ditanamnya. Tembakau identik dengan tabungan, simpanan. Simbol keamanan ekonomi. Ungkapan Tun menggambarkan begitu berharganya komoditas tembakau dalam menggenjot kehidupan petaninya. Ketika seorang petani ditanya apakah menanam tembakau sulit dan kurang menguntungkan, jawaban yang muncul umumnya adalah kembali kepada keahlian masing-masing. Untung-rugi

menanam tembakau bergantung pada pengetahuan dari petani untuk bertindak sesuai kondisi musim dan tanah. Apabila sudah memiliki pengetahuan ini, kerugian dapat diminimalkan. Selain itu, imbalan harga hasil panen yang tinggi merupakan daya tarik yang kuat untuk menanam tembakau. Meski ada kalanya musim tidak bersahabat yang membawa pada gagal panen, para petani tidak gentar untuk kembali menanam tembakau (wawancara dengan Sgn, penggarap lahan tembakau, 23 Februari 2011).

Tabel 3.9 memperlihatkan perbandingan perkiraan pendapatan total petani tembakau, padi, dan tebu per bulan per musim di Malang. Pendapatan tertinggi masih dipegang oleh petani tembakau, meski apabila dilihat dengan lebih seksama sumber penghasilannya tidak seutuhnya hasil bertani. Walaupun sudah menanam tembakau lebih dari 25 tahun, Ar belakangan lebih suka menyebut dirinya sebagai wiraswasta (wawancara dengan Ar, 27 Februari 2011), karena untuk mengantisipasi kerugian menanam tembakau, ia lebih banyak membeli tembakau dari petani lain daripada menanam di lahan sendiri.

Dengan pengalaman sebagai penanam dan penikmat tembakau, Ar sudah mengerti betul cara memilih tembakau yang baik. Pada musim-musim sewaktu banyak orang menanam tembakau, Ar akan mengurangi jumlah tembakau yang ditanamnya, bahkan tidak menanam sama sekali, karena berdasarkan logika pasar ketika *supply* komoditas terlampau banyak, harga dengan sendirinya akan turun. Jadi, daripada merugi karena penjualan hasil tembakau yang ditanamnya tidak sepadan dengan modal yang dikeluarkannya, Ar lebih memilih untuk membeli tembakau milik orang lain dan menjualnya secara eceran di kios tembakau miliknya di

pasar. Mengecer tembakau memberi pemasukan yang signifikan bagi perekonomian keluarganya. Dalam satu hari, sekiranya permintaan sedang banyak, Ar bisa menjual sampai dengan 20 kg tembakau. Namun, di saat sedang sepi ia hanya akan menjual kira-kira 5 kg tembakau. Meskipun demikian, dengan menjual 5 kg tembakau/hari saja, dalam sebulan keuntungan minimum yang didapatkannya bisa mencapai Rp 4,5 juta, suatu angka yang besar bila dibandingkan dengan pengecer komoditas lain di pasar.

Adapun Mm, selain memiliki lahan sekitar 1,2 ha ia juga menyewa beberapa sawah seluas 2-3 ha, sehingga ketika dirata-rata pendapatan per bulannya dari hasil pertanian mencapai Rp 3 juta. Di luar bertani, Mm juga aktif memimpin sebuah kelompok tani. Ia diberi tanggung jawab mengurus pupuk bersubsidi dari pemerintah agar bisa didistribusikan kepada petani yang tergabung dalam kelompok taninya. Mm menyediakan sebidang lahan di rumahnya sebagai kios kecil tempat penjualan pupuk tersebut. Mm tidak pernah menyebutkan secara pasti berapa besar pendapatannya dari kios pupuk ini, namun sebagai perkiraan minimum, setidaknya ia mendapat Rp 1 juta. Mm memiliki bekal pendidikan agama yang baik. Ia adalah lulusan sebuah pondok pesantren di Kediri. Dengan bekal ini dan jaringan organisasi yang mantap (PC NU), ia ditunjuk untuk menjadi penyuluh agama untuk Kecamatan Ngajum. Dari pekerjaan ini, diasumsikan Mm memperoleh pemasukan sebesar Rp 2,5 juta.

Fz, sebagai perbandingan, memiliki lahan sendiri seluas 1 ha. Selain itu, ia dipercayakan untuk mengelola lahan orang lain sebanyak 10 ha. Penghasilan yang diterima dari menggarap lahan sendiri dengan mengelola lahan orang lain

Tabel 3.9.
Perbandingan Pendapatan Petani Tembakau, Padi, dan Tebu di Malang

Komoditas	Pemasukan (per bulan/musim)		Pengeluaran(per bulan/musim)	
	Jenis	Jumlah (Rp)	Jenis	Jumlah (Rp)
Tembakau	Tembakau	1,6 juta/bulan	Belanja dapur	300.000
	Sawah	1 juta/bulan	Uang sekolah anak	200.000
	Mengecer tembakau	4,5 juta/bulan	Uang jajan anak	600.000
			Listrik	150.000
			Minyak tanah	100.000
			Bensin	200.000
			Arisan	30.000
			Rokok	210.000
Total		7.100.000		1.790.000
Padi	Panen**	3 juta /bulan	Belanja dapur	150.000
	Koprasi tani	1 juta/bulan	Listrik	100.000
	Penyuluh agama	1,5 juta/bulan	Bensin	45.000
			Arisan	30.000
			Minyak tanah	65.000
			Biaya hidup anak(universitas)	1.500.000
			Biaya hidup anak (SMP)	500.000
			SPP	300.000
			Arisan	30.000
Total		5.500.000		2.720.000
Tebu	Panen	5 juta/bulan	Belanja dapur	250.000
			Sekolah anak	15.000
			Listrik	100.000
			Bensin	60.000
			Minyak tanah	85.000
			Komunikasi	50.000
			Arisan	15.000
			Susu anak	300.000
			Lain-lain	500.000
Total		5.000.000		1.375.000

Sumber: diolah dari hasil wawancara.

tentu tidak sama. Berbeda dengan lahannya sendiri, lahan yang ia garap tidak mengambil bentuk kemitraan, karena umumnya petani dengan lahan besar sudah memiliki jalur niaga sendiri. Yang menjadi tanggung jawab Fz (wawancara, 16 Februari 2011) dalam menggarap lahan orang lain itu adalah masalah pengelolaan lahan dan pupuk, kemudian hasil panen dibagi dua antara pemilik lahan dan Fz sebagai penggarap. Fz tidak memiliki pekerjaan sampingan maupun usaha di luar bertani tebu. Oleh karena itu, pendapatannya murni dari hasil panen tebu. Stabilitas pendapatannya sangat bergantung pada hasil panen. Apabila panen baik, pendapatannya baik pula. Apabila panennya kurang baik, otomatis pendapatannya juga ikut menurun.

Pengalaman panjang menekuni bidang usaha tani, membuat para pemilik lahan dari tiap komoditas yang diteliti memiliki kiat-kiat untuk bertahan pada masa-masa harga pasar sama sekali tidak bersahabat. Ar misalnya, pada awalnya ia hanyalah petani tembakau, namun didorong oleh rasa ingin tahu di balik pergerakan harga tembakau, ia lantas mulai menjajaki profesi pengepul dan pengecer tembakau. Berikut pemaparannya.

> Waktu sebelum krisis moneter 1997-1998, tembakau sini harganya antara Rp 3.500,00-Rp 4.000,00 (per kg). Tahun 1999 awal, harga tembakau langsung naik menjadi Rp 30.000,00 (per kg), naik 10 kali lipat. Waktu itu saya menanam juga, tapi tidak banyak. Tahun 1999, tidak mengerti krisis moneter. Tahun 2000 harga tembakau turun langsung dari Rp 30.000,00 jadi tinggal Rp 11.000,00 (per kg)... Tidak jelas penyebabnya. Ya, pasar memang begitu.

Tidak jelas. Tahun 2001 harga tetap segitu, terus sampai 2004. Harga *palingan* naik sekitar Rp 2.000,00-Rp 3.000,00 (per kg), baik tembakau lama maupun baru. Itu berlangsung terus sampai akhir 2004. Setelah 2004, petani seperti... jenuhlah, istilahnya. Tidak ada naiknya. Ini bagaimana solusinya? Akhirnya *kan* petani banyak yang tidak tanam. Nah, mulai 2005 harga naik terus, bertahap, dari Rp 3.000,00, Rp 4.000,00,... dan tahun ini mencapai puncaknya, Rp 70.000,00/kg. Nah, setelah puncaknya biasanya turun lagi. Tahun 1977 juga pernah seperti ini, dari harga tembakau Rp 500,00 lalu turun menjadi Rp 100,00. (Wawancara dengan Ar, 27 Februari 2011)

Dalam penuturannya yang santai namun padat, Ar sesungguhnya sedang melakukan analisis pasar dengan caranya sendiri. Berangkat dari ingatan yang kuat terhadap kejadian-kejadian masa lalu terkait dengan naik-turunnya harga tembakau, ia mampu menarik pelajaran dan membuat semacam jaring pengaman untuk dirinya sendiri. Secara sederhana, ia melihat dalam penjualan tembakau akan selalu ada masa-masa puncak dan setelah itu anjlok, drastis. Merasakan jatuhnya harga tembakau pada tahun 2000, ia merasa penghasilan sebagai petani tembakau tak cukup untuk menjamin keamanan ekonominya. Oleh karena itu, sejak 2004 ia mulai merintis usaha menjadi pengepul dan pengecer tembakau.

Begitulah potret kehidupan petani—khususnya penanam tembakau—di Kabupaten Malang. Meski harganya tidak selalu tinggi, daya jualnya tetap lebih kuat dibandingkan

dengan komoditas lainnya, selain juga, menurut Ar, untung-rugi sang petani berpulang dari minat mereka yang menanamnya. Minat ini akan memacu seseorang untuk selalu mencari pengetahuan yang lebih tentang tembakau, yang nantinya akan memberinya keterampilan, ketekunan, sekaligus kebijaksanaan; terutama bahwa menanam tembakau tidak selalu sukses secara konstan. Ada kalanya bisa gagal—bisa dari faktor internal maupun eksternal (wawancara dengan Ar, 20 Februari 2011). Petani di Jatiguwi yang berkata bahwa menanam tembakau berisiko dan kurang menguntungkan adalah orang-orang yang belum menguasai teknik menanam. Sebaliknya, bagi yang sudah sukses menanam tembakau pasti akan menjawab menanam tembakau tidak sulit (pengamatan dalam FGD di Jatiguwi, 21 Februari 2011).

Melihat sosok seperti Ar adalah melihat bagaimana tembakau sudah melebur, menjadi bagian dari darah daging petani di kabupaten Malang. Para petani tembakau ini adalah penikmat tembakau, baik dari tembakaunya sendiri maupun dari rokok yang dijual bebas. Mereka sangat paham dengan rasa gurih dan khasiat yang bisa mereka dapatkan dari tembakau. Biaya kesehatan yang dikeluarkan akibat penggunaan rokok, bagi mereka hanyalah sesuatu yang kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan bagaimana kehidupan mereka dijamin oleh tanaman ini (wawancara dengan Ar, 19 dan 27 Februari 2011).

KEUNTUNGAN TINGGI, JIKA PROBLEMATIKA DAPAT DIATASI

Untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai tingkat kesejahteraan petani tembakau di Pamekasan, berikut perbandingan tingkat kesejahteraan petani tembakau dengan petani garam, serta antara buruh tani dengan petani pemilik lahan.

Tabel berikut menggambarkan kenyataan bahwa pendapatan buruh tani, baik buruh tani tembakau maupun garam, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, pada masa tanam dari bulan April hingga Oktober, selain menggarap lahan yang disewanya, para buruh tani tembakau juga menjadi buruh di lahan orang lain; mulai dari menjadi pengolah tanah, pemetik pucuk, pembasmi hama, hingga penyiram. Tiap-tiap pekerjaan tersebut diupah Rp 15.000,00/setengah hari kerja. Selama masa tanam tersebut, buruh tani tembakau bersama seluruh anggota keluarga, istri dan anak-anaknya, menjadi buruh di lahan orang. Dari sinilah mereka memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Energi besar datang pada saat panen raya. Para buruh tani akan memperoleh penghasilan ekstra karena setiap bagian proses pengolahan tembakau yang kompleks membutuhkan tenaga. Setiap hari, setiap jam tanpa jeda hingga sebulan penuh, semua orang akan terserap untuk mengurusi komoditas ini (wawancara dengan Mhd, 22 Februari 2010). Tiap pelaku dalam tata niaga tembakau biasanya sangat sibuk di desanya masing-masing selama sebulan panen raya. Para petani akan melibatkan saudara, tetangga, dan teman di satu desa, meski ada juga yang mengambil tenaga dari

luar desa kalau benar-benar kekurangan. Pada prinsipnya, setiap gerak dalam tembakau adalah rupiah.

Tabel 3.10.
Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Petani Pemilik Lahan dengan Buruh Tani Tembakau dan Garam di Pamekasan

Indikator	Buruh tani		Petani pemilik lahan (>1ha)	
	Tembakau	Garam	Tembakau	Garam
Pendapatan	Rp 1,5 juta untuk ½ ha lahan garapan dengan patokan harga Rp 20 ribu/kg	Rp 2 juta untuk ½ ha lahan garapan dengan patokan harga Rp 250 ribu/ton	Rp 6 juta untuk 1 ha lahan dengan patokan harga Rp 20 ribu/kg	Rp 8 juta untuk 1 ha lahan dengan patokan harga Rp 250 ribu/ton
Pengeluaran	Rata-rata Rp 700 ribu/bulan	Rata-rata Rp 700 ribu/bulan	Rata-rata Rp 1,5 juta/bulan	Rata-rata Rp 1,5 juta/bulan
Tambahan penghasilan	Nelayan, petani padi/jagung, perajang, tukang ojek, buruh pabrik	Nelayan, petambak ikan	PNS, perangkat desa, pedagang, penyalur	PNS, perangkat desa
Pemilikan aset	Lantai plester semen, sebagian tembok bilik, tak punya jamban, sepeda motor tua (harga ± Rp 1 juta), TV tabung, radio	Lantai plester semen, sebagian tembok bilik, tak punya jamban, sepeda motor tua (harga ± Rp 1 juta), TV tabung, radio	Lantai keramik, tembok semen, berjamban, sepeda motor baru, mobil	Lantai keramik, tembok semen, berjamban, sepeda motor baru, mobil
Tingkat pendidikan anak	SMP-SMA	SMP-SMA	SMA-sarjana	SMA-sarjana

Sumber: diolah dari hasil wawancara dan FGD.

Mencari penghasilan tambahan juga dilakukan oleh para petani pemilik lahan tembakau maupun garam. Terlebih, mereka memiliki lebih banyak waktu luang di luar urusan pertanian tembakau ataupun garam karena biasanya lahan yang mereka miliki disewakan kepada buruh tani. Waktu di luar bertani ini mereka manfaatkan untuk melakukan pekerjaan lain, mulai dari pekerjaan sebagai pegawai negeri,

perangkat desa, hingga pedagang. Dari pekerjaan sebagai pegawai negeri, mereka biasanya telah memperoleh penghasilan rutin tiap bulan. Adapun penghasilan yang diperoleh dari hasil pembagian keuntungan pertanian biasanya dianggap sebagai bonus (tambahan penghasilan) saat panen raya. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan petani pemilik lahan tembakau dengan pemilik lahan garam sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja, kalau saat musim panen terdapat terik matahari yang cukup, penghasilan yang diperoleh oleh petani tembakau akan lebih besar daripada petani garam. Saat gagal panen, petani tembakau lebih merugi dibandingkan petani garam.

Namun, pendapatan dari hasil pertanian memang tidak pernah stabil. Dengan pola tanam tradisional, dua komoditas ini masih sangat bergantung pada faktor cuaca. Jika mulai April hingga Oktober tidak ada hujan, hasil panen tembakau maupun garam akan sangat baik. Tetapi, jika terjadi *over production* lantaran hasil panen melimpah, harga garam maupun tembakau bisa merosot. Kalau di antara keduanya diperbandingkan, harga tanaman tembakau sebenarnya lebih tidak stabil dibandingkan dengan garam. Ini karena lebih banyak faktor yang mempengaruhi kualitas dan harga tembakau, mulai dari pemeliharaan tanah, pemupukan, perawatan, hingga pembersihan hama; semua ini sangat menentukan kualitas dan harga tembakau.

Jika membandingkan keuntungan yang diperoleh dari komoditas tembakau dengan garam, bertani tembakau memang memiliki risiko merugi yang lebih besar, terutama dari ancaman cuaca yang tidak menentu. Saat *la nina* tiga tahun berturut-turut belakangan, petani tembakau banyak merugi; jauh lebih besar modal daripada hasil penjualannya.

Ini karena para petani tembakau umumnya tidak memiliki gudang penyimpanan yang baik, sehingga tembakau rajangan harus segera dijual, meski dengan kualitas yang buruk. Sementara, para petani garam biasanya mempunyai gudang penyimpanan yang layak. Saat hujan di musim kemarau, mereka dapat menyimpannya untuk dijual kemudian saat harga kembali naik.

Tata niaga tembakau yang lebih rumit dan membutuhkan banyak komponen pekerjaan juga meningkatkan biaya penyiapan komoditas ini. Tata niaga garam lebih sederhana, hanya terdapat tengkulak dan kuli angkut saja di antara petani dan pembeli. Di samping itu, modal bertani tembakau sangat besar, meski dengan catatan bahwa penghasilannya juga besar. Berikut pendapat seorang buruh tani tembakau.

> Karena banyaknya proses yang harus dikerjakan dan setiap gerak berarti uang, maka, penghasilan bersih petani tembakau sebenarnya tidak jauh berbeda dengan petani garam, bahkan bisa dikatakan lebih rendah. (Wawancara dengan Mhd, 22 Februari 2011)

Kendati demikian, di sisi lain ini juga berarti lebih banyak lapangan pekerjaan yang dapat disediakan oleh tembakau. Dengan kata lain, komoditas ini dapat memberikan stamina pada perekonomian Pamekasan. Kalau saja tata niaga tembakau tidak berbelit-belit dan menyulitkan para petani, tanaman ini mungkin akan membentuk wajah Pamekasan yang lebih segar dan hidup, seperti yang telah kita jumpai pada daerah-daerah yang lain.

4

PETANI DALAM SISTEM PERNIAGAAN TEMBAKAU

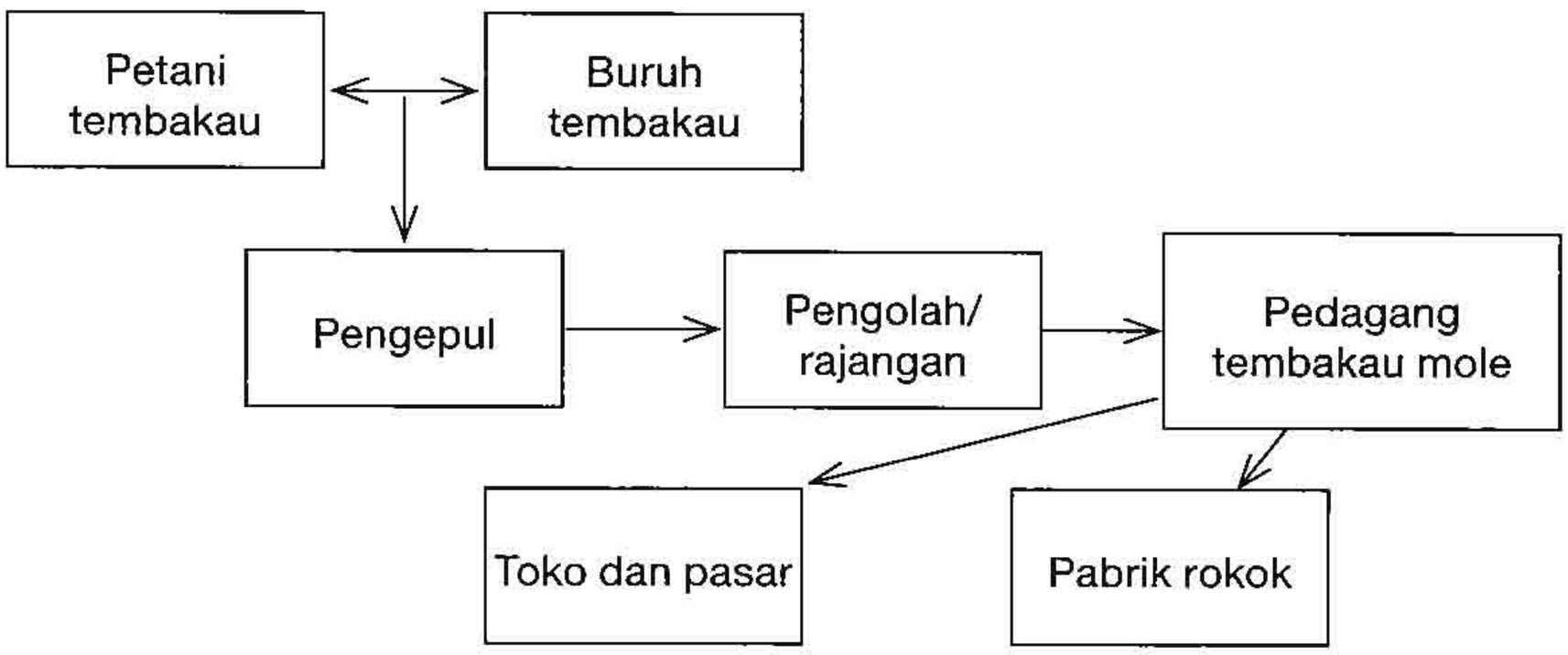
SISTEM YANG LEBIH ADIL

Di Sumedang, perniagaan tembakau berjalan lebih *fair*. Pada saat panen, tembakau dijual dalam bentuk batangan ke pengepul. Pengepul inilah yang memiliki kewenangan kapan tembakau boleh dipetik. Setelah itu, tembakau dijual ke pengolah untuk dilakukan pengasapan dan perajangan. Tembakau dijemur hingga menjadi tembakau *mole*, berikutnya dijual ke pasar tembakau yang ada di Tanjungsari atau dijual ke pabrik rokok. Tembakau yang dijual ke toko biasanya berbentuk kemasan kecil (*packing*), yang nantinya dipakai sebagai bahan rokok lintingan.

Hubungan yang terjadi antara berbagai pihak tersebut bersifat setara. Hubungan buruh dengan petani pemilik lahan lebih bersifat fungsional dan mutualistis. Terkadang, petani pemilik lahan juga menjadi buruh tembakau untuk petani tambakau lain. Pola hubungan petani dan pengepul

pun sama tinggi. Harga tembakau sangat ditentukan oleh baik-buruknya kualitas tembakau. Jika hasil panen tembakau baik, yang menentukan harga adalah petani, sedangkan pengepul akan melakukan penawaran dari harga yang dijual. Biasanya selisih harga jual sekitar Rp 5.000,00 hingga Rp 10.000,00/kg. Jika kualitas hasil panen jelek, yang menentukan harga adalah pengepul. Jadi pola hubungan petani dan pedagang lebih dipengaruhi kualitas panen. Jika kualitas panen baik, posisi tawar lebih tinggi pada petani. Namun jika kualitas panen buruk, posisi tawar lebih tinggi pada pengepul. Hal demikian juga berlaku untuk penawaran tembakau dari pengepul ke pengolah hasil tembakau dan industri rokok.

Bagan 4.1.
Alur Perdagangan Tembakau di Sumedang



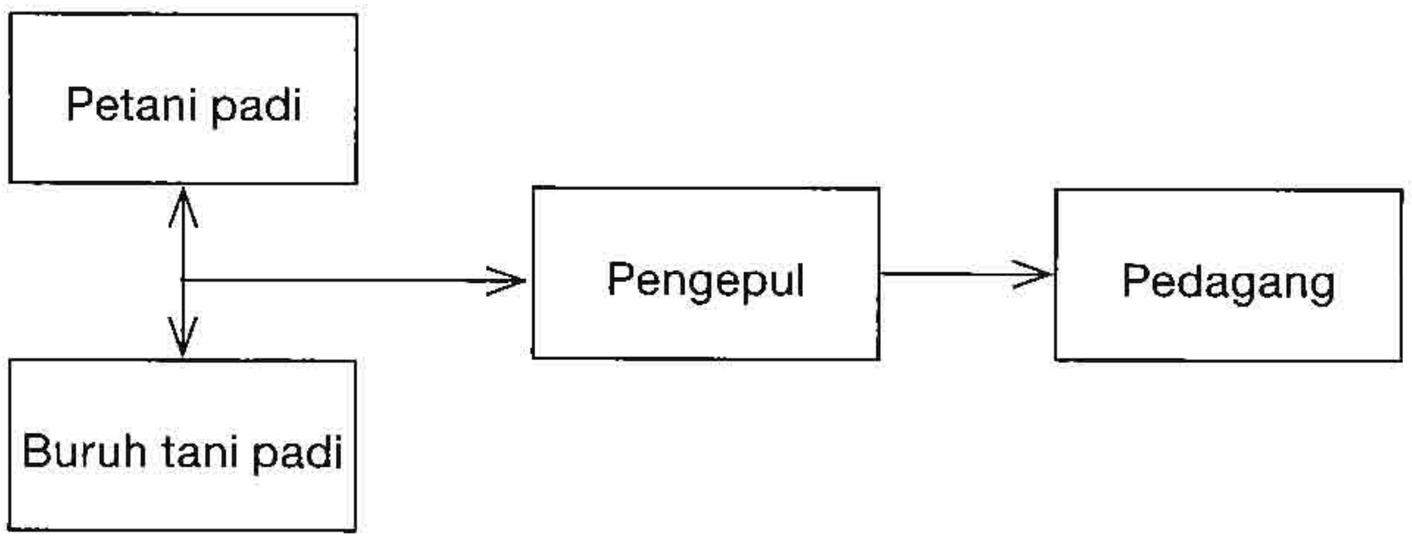
Sumber: diolah dari hasil wawancara.

Mereka yang bekerja sebagai buruh tani tembakau, kebanyakan adalah kerabat dekat atau tetangga pemilik lahan. Sangat jarang, bahkan tidak pernah, buruh tembakau di-

datangkan dari luar desa. Dulu pernah ada buruh borongan dari luar desa yang dikenal dengan istilah buruh musiman, tapi seiring dengan pertumbuhan ekonomi, semakin sedikit orang yang berminat menjadi buruh tani.

Hampir sama dengan petani tembakau, hubungan kerja petani padi dan buruh tani pun bersifat fungsional dan relatif *fair*. Mereka yang menjadi buruh adalah para tetangga dan kerabat dekat, bukan orang dari luar daerah. Akan tetapi, sistem pembayaran buruh tani padi agak berbeda dengan tembakau. Buruh petik tanaman padi dibayar padi, sedangkan buruh petik tembakau dibayar uang. Mata rantai niaga padi tidak sepanjang tembakau. Dari petani, padi dijual ke pengepul atau pedagang, atau disimpan untuk digiling menjadi beras (wawancara dengan Ads, 19 Februari 2011).

Bagan 4.2.
Alur Perdagangan Padi di Sumedang



Sumber: diolah dari hasil wawancara.

Menariknya, ada suatu nilai positif yang berkembang di kalangan petani tembakau. Petani tembakau dikenal lebih jujur dan dapat dipercaya daripada petani lain. Pem-

beri modal seperti pengusaha toko obat-obatan dan pupuk menaruh kepercayaan yang besar kepada para penanam tembakau ini. Narasumber Skr, pemilik sebuah toko pertanian, sering meminjamkan modal kepada petani tembakau dengan memberikan hutang obat-obatan, pupuk, dan lainnya, dan selama ini mereka tidak bermasalah dalam pembayarannya. Kalau harga tembakau jelek sehingga petani belum bisa membayar hutang, Skr memahaminya. Bahkan, untuk menjaga kepercayaan kepada pihak pemberi hutang, petani tembakau rela bila harus menjaminkan sepeda motor kepada pemberi hutang tersebut. Hal ini sempat ditolak oleh Skr karena dia cukup memahami dan mengerti kesulitan yang dialami petani tembakau, dan yakin bahwa hutangnya akan tetap bisa dibayar (wawancara dengan Skr, 17 Februari 2011).

TENGKULAK: DIBENCI DAN DIRINDU

Petani di Mranggen, Demak, dalam kedudukannya sebagai yang lemah dan tak memiliki daya tawar, pertama-tama berurusan dengan tengkulak. Tengkulak, dalam bisnis pertembakauan di Demak, adalah pelaku yang tidak disukai oleh petani. Mereka mematok harga. Kerap, harga tersebut amat memukul petani; sama sekali tidak mengindahkan kesulitan petani, termasuk dalam risiko-risiko menanam yang mereka hadapi. Namun, tanpa kekuatan, petani lebih sering pasrah, menerima begitu saja harga yang dipatok tengkulak. Pada saat panen di musim penghujan, misalnya, tengkulak menganggapnya sebagai momen yang tepat untuk mengintimidasi petani. Walaupun kualitas tembakau masih bagus,

tengkulak mematok harga yang rendah, menganggap mutu tembakau petani jelek karena telah dipengaruhi hujan. Dan lagi, tengkulak sering kali merugikan petani dengan mengambil tembakau tanpa uang muka, hanya meninggalkan catatan, atau yang sering disebut *garet*. Sering kali, petani tersebut akhirnya tidak dibayar. Hampir pasti setiap tahun ada *garet* beredar, meski berganti-ganti *bakul* (tengkulak).

> *Lagune bakul mbako niku nggih ngoten. Eleke bakul mbako niku nggih ngoten* [kebiasan tengkulak tembakau itu ya seperti itu. Jeleknya tengkulak tembakau ya seperti itu]. Misalnya, harga laku Rp 1 juta hanya diberi Rp 500.000,00. Katanya, kekurangannya akan diberikan nanti. Ketika ditagih kekurangannya pada saat musim tembakau sudah habis, dijawab tembakaunya sudah habis dan gudang belum membayar, "*Masak* suruh bayar kamu". Padahal pernah ada yang tanya ke gudang, gudang sudah membayar. Kadang, para tengkulak itu juga membangun rumah ketika ditagih petani. (Wawancara dengan Mn, 19 Februari 2011)

Orang seperti Mn tidak pernah melakukan protes berkaitan dengan hal itu. Pertimbangannya, karena merasa uangnya tidak seberapa, malah khawatir nantinya akan ribut. Sementara itu, antara tengkulak dengan petugas gudang pabrik rokok juga seringkali tercipta hubungan yang timpang, tidak menguntungkan tengkulak. Ketika tengkulak memasukkan tembakau ke pabrik, misalnya, berat tembakau di dalam keranjangnya biasanya mencapai 50 kg. Dari satu keranjang yang beratnya 50 kg itu, petugas pabrik

mengambil gulungan di bagian tengah[1] seberat 5 kg, sehingga saat ditimbang tengkulak akan rugi. Untuk tembakau murah, bagian yang diambil bahkan bisa sampai 7-8 kg (wawancara dengan Nim, 20 Februari 2011). Tetapi menurut pihak pabrikan, hal ini bukanlah semacam pola umum atau kebijakan resmi pabrikan. Jika betul terjadi, ini adalah perbuatan oknum, yang bisa terjadi di manapun, bukan khas pabrik rokok (wawancara dengan salah seorang eksekutif sebuah pabrik rokok, 7 Juli 2011).

Para tengkulak tembakau di wilayah ini kebanyakan perempuan. Alasannya, tengkulak perempuan sangat *kewes* (pantas dan terampil). Misalnya, menurut penuturan Nim, pada saat tembakau harganya anjlok perempuan dapat lebih luwes berhadapan dengan petani yang bersedih. Para tengkulak perempuan ini mendatangi petani, mengambil tembakau petani, dan para pemilik tembakau tidak mempersoalkan, bahkan jika hanya diberi *garet* atau uang yang tak seberapa, kira-kira 25% dari total harga. Akan tetapi, sedikit sekali yang kemudian dilunasi oleh tengkulak. Jika sudah satu tahun tidak dilunasi, sudah menjadi pemahaman umum bahwa sisa uang petani yang masih ada pada tengkulak itu tidak akan dibayar. Alasannya senderhana, *"Tembakau tahun kemarin kok ditagihnya sekarang, ya sudah lewat"* (wawancara dengan Nim, 24 Februari 2011).

Di antara sesama tengkulak terdapat pula persaingan keras. Oleh karena itu, hampir semua narasumber yang ditanyai menganggap bisnis pertembakauan seperti ling-

---

1 Tembakau dalam keranjang diambil bagian tengahnya sebagai sampel untuk pengecekan kualitas dan keaslian tembakau. Pengecekan ini diperlukan karena biasanya ditemui praktek pencampuran tembakau, yaitu tembakau yang baru dipanen dicampur dengan tembakau panen musim lalu atau tembakau dari daerah lain yang kualitasnya berbeda. Pencampuran ini berpengaruh pada kualitas tembakau.

karan setan—*saking* banyaknya tindakan yang keterlaluan, tidak bisa dimaafkan dari sudut etika dan norma agama, namun terus dijalankan tengkulak dengan enteng dalam perniagaan tembakau.

Grader merupakan pihak yang memiliki peran penting dalam perniagaan tembakau di Mranggen, Demak. Ia adalah orang yang dipercaya untuk menguji kualitas tembakau yang akan dibeli pabrik rokok. Syarat seorang *grader* adalah kemampuan dalam menentukan kualitas tembakau dengan cepat, termasuk juga kapasitas untuk membedakan asal daerah tembakau kering tertentu dengan cara mengendusnya atau melihat warnanya. Dengan kemampuan yang demikian khas, dan juga jalinan kepercayaan yang intim dengan perusahaan rokok, tak mengherankan jika *grader* menjadi profesi ekskusif yang biasanya dijabat secara turun-temurun, diwariskan dari orang tua kepada anak atau menantunya.

Tengkulak di Mranggen berperan dalam menghimpun tembakau dari petani yang akan dijual ke pabrik rokok. Dalam kasus tertentu, petani bisa juga menjual langsung tembakaunya ke *grader*. Salah seorang *grader* mengaku pernah menerima penjualan langsung dari petani, namun ia memberikan harga yang sama dengan yang diberikan tengkulak kepada petani. Ia beralasan, *"Ya* (kalau tidak begini, pen.), *nanti tengkulak makan apa?"* (Wawancara dengan Al, 25 Februari 2011). Di sisi lain, ketika petani mengeluhkan pertanian tembakau, dan ada gejala tidak akan bertanam tembakau, maka sebagaimana yang dikatakan Nga (wawancara, 23 Februari 2011):

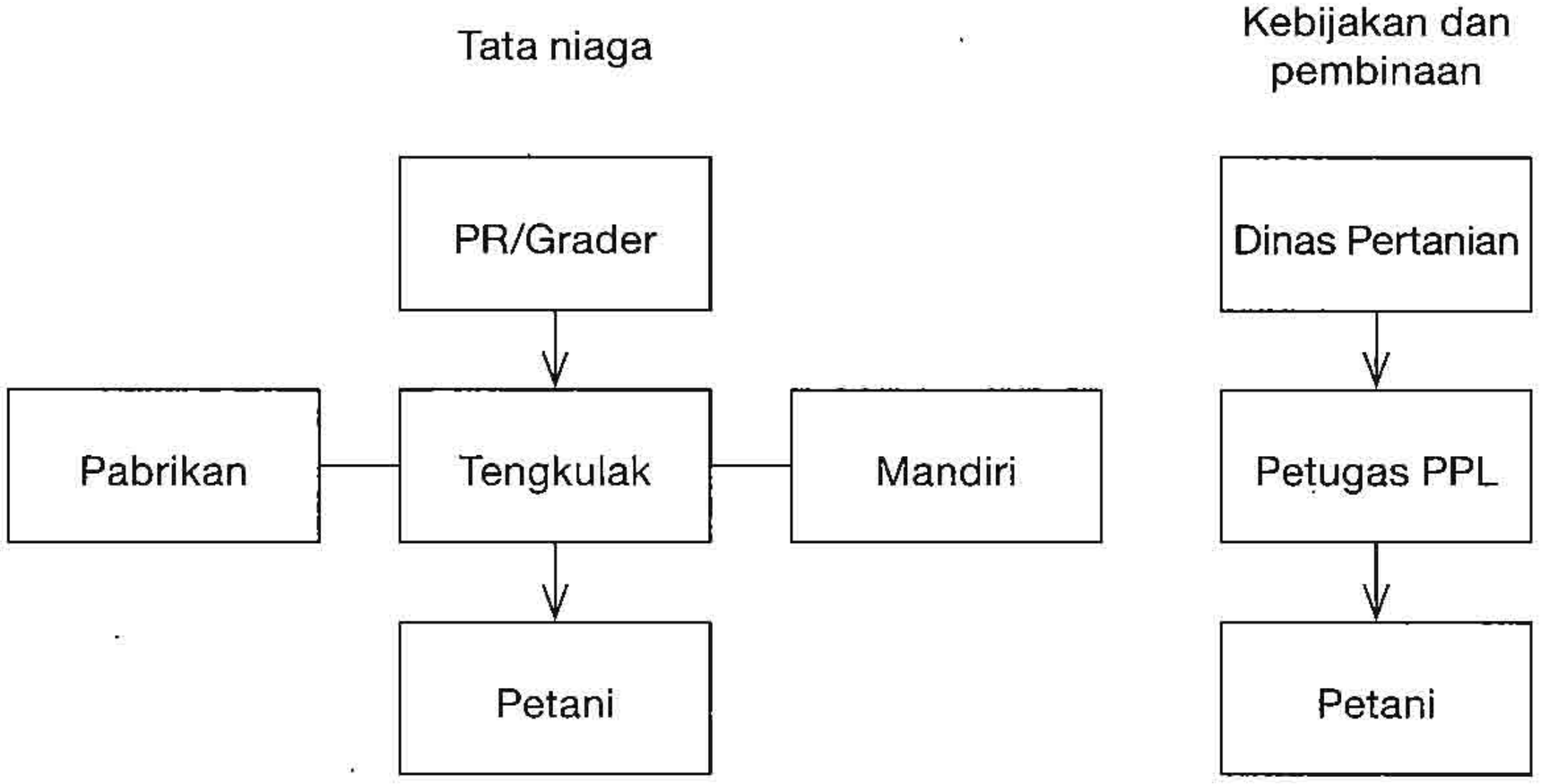
Pihak gudang akan mengambil sikap. Kalau seandainya daerah tertentu terlihat tidak akan bertanam tembakau, atau lebih sedikit dari tahun sebelumnya, maka biasanya ada orang yang diindikasi dari pabrik keliling desa untuk membujuk petani tetap menanam tembakau. Dihembuskan nanti harganya akan bagus, sehingga petani bertanam tembakau lagi.

Pada sisi yang lain, dalam konteks relasi vertikal, menyebut negara di antara para petani di Mranggen akan menuai keluhan; perasaan tidak diperhatikan. Lewat persentuhan mereka dengan Dinas Pertanian setempat, atau aparat petugas penyuluh yang terjun langsung ke lapangan, atau kebijakan bupati, seperti anjuran untuk beralih ke tanaman nontembakau; para petani mendapati kesan bahwa pemerintah abai terhadap persoalan riil yang mereka hadapi.

Pemerintah daerah, menurut para narasumber, hanya melaksanakan tugas-tugas kewajiban administratifnya semata. Misalnya, memberikan penyuluhan teoretis bagaimana agar tanaman pertanian menghasilkan kualitas yang bagus. Namun, di hadapan relasi tata niaga yang timpang dan eksploitatif yang jelas-jelas merugikan petani selama bertahun-tahun, Disperindag Kabupaten bahkan tidak bisa berkutik sama sekali. Bergeming. Diam. Mengesankan sikap tidak mau tahu dan tidak mau ikut campur.

Adapun secara horisontal, dalam relasi yang terbangun di antara sesama petani, sejauh penelitian ini dilakukan, hampir tidak ditemukan masalah. Malah secara sosial, mereka sangat terasah keselarasan dan solidaritasnya pada saat menaman tembakau, mengingat segala risiko akan ditanggung bersama.

Bagan 4.3.
Hubungan Vertikal Petani di Mranggen, Demak



Sumber: diolah dari hasil wawancara.

Pada sesi FGD muncul keinginan para petani Mranggen untuk bersatu membentuk semacam koperasi tembakau, agar mereka bisa memiliki daya tawar terhadap tengkulak maupun pabrik rokok. Koperasi itu nantinya bisa membangun gudang tembakau, sehingga para petani bisa memasok langsung ke gudang tersebut. Harapannya, nasib petani akan semakin diperhatikan. Patani juga akan semakin mampu mengontrol harga tembakau; bukan seperti sekarang, petani tak pernah bisa memahami apa alasan yang membuat harga tembakau jatuh.

RENTANNYA POSISI PETANI DALAM SISTEM PERNIAGAAN YANG KOMPLEKS

Di antara petani tembakau di Temanggung, bisa dibedakan antara petani lahan kecil dengan buruh tani. Petani

lahan kecil adalah orang setempat, sementara buruh tani bisa didapatkan dari desa tetangga sekitar maupun dari luar Kabupaten Temanggung. Pada masa mulai tanam dan panen tembakau penyerapan tenaga kerja sangat besar, sehingga tidak mampu dicukupi pasar tenaga kerja dari dalam Temanggung saja, seperti disampaikan Wld, petani tembakau, *"Pada musim labuh mencangkul* (musim/saat mulai mencangkul, pen.) *itu sulit mencari tenaga lokal saja, karena berbarengan."*

Pada masa panen, jam kerja pemrosesan tembakau juga tinggi, mulai dari petik, dibawa ke rumah untuk digulung dan diperam (*diiyemke*) agar daun menjadi layu, kemudian dirajang dan dijemur. Proses pengerjaan pengolahan tembakau ini bisa berlangsung dari pagi sampai dini hari, dengan jeda waktu istirahat yang terbatas. Tenaga kerja yang diserap bisa meliputi sejumlah wilayah dari luar Temanggung, seperti Magelang, Wonosari, Banjarnegara, Wonosobo, dan Sukorejo (wawancara dengan Nrh, petani tembakau; Imb, petani tembakau; ketua APTI Jateng). Biasanya, tenaga kerja yang didatangkan dari luar daerah ini menginap di tempat petani yang mempekerjakannya sekaligus yang menaggung biaya makan dan kebutuhan sehari-hari mereka (wawancara dengan Mth, petani tembakau, 21 Februari 2011).

Dalam sistem pertanian tembakau di Temanggung, petani bersentuhan dengan pupuk. Salah satu pupuk yang cukup dikenal di kalangan petani adalah *Fertila*. Pupuk ini konon memiliki pengaruh signifikan pada peningkatan kualitas tembakau. Fertila merupakan pupuk yang kerap direkomendasikan. Sayangnya, harga pupuk ini relatif mahal, Rp 750.000,00/kuintal, dengan kebutuhan untuk satu

hektar bisa mencapai 4,5 kuintal (wawancara dengan Wld, petani tembakau, 19 Februari 2011). Banyak petani yang meyakini bahwa pemakaian pupuk ini bisa mempengaruhi harga jual tembakau karena biasanya tembakau yang bagus diidentikkan dengan pemakaian Fertila (wawancara dengan Thr, petani tembakau, 23 Februari 2011; Nrh, petani tembakau, 20 Februari 2011).



Menjemur tembakau (foto: Humas Pemkab Temanggung)

Untuk menyiasati kebutuhan pupuk yang harganya mahal tersebut, petani biasanya menurunkan kuantitas pupuk yang dibutuhkan. Pupuk untuk 0,5 ha dicukupkan untuk lahan 1 ha (wawancara dengan Wld, petani tembakau, 19 Februari 2011). Selain itu, ada juga petani kreatif dari Banaran Tlilir, Nrh, yang mencampur sendiri pupuk subsidi pemerintah dengan berbagai kandungan untuk mendapatkan kualitas yang sama dengan Fertila. Nrh merasa berhasil dengan campuran pupuknya. Bahkan, sering kali tembakau

srintil muncul dari lahannya meskipun secara ilmiah belum diuji kandungan pupuk campurannya tersebut.

Selain itu, pedagang kecil atau biasa disebut *gaok* merupakan aktor penting dalam perniagaan tembakau Temanggung. *Gaok* menjembatani petani dengan pedagang besar dengan mengumpulkan tembakau dari petani ke gudang pedagang besar. Dahulu, pembelian dilakukan dengan menggunakan *girik*, semacam nota kesepakatan harga, dan tidak ada pembayaran langsung. Tembakau petani dibawa oleh *gaok* ke gudang pedagang besar. Biaya transportasi dan kuli ditanggung oleh petani. Apabila sudah terjadi kesepakatan harga antara *gaok* dengan pedagang besar, *gaok* akan menginformasikan kesepakatan harga kepada petani. *Gaok* nakal tidak akan menginformasikan kepada petani harga kesepakatan yang sebenarnya, sehingga ia bisa mengambil untung dari selisih harga (wawancara dengan Mtl, pedagang, 16 Februari 2011). Pola perdagangan ini lambat laun mengalami penurunan karena semakin banyaknya pedagang yang berebut barang. Selain itu, petani lebih memilih memberikan barang kepada pedagang yang mau membeli barangnya dengan uang tunai.

Posisi tawar petani di hadapan pedagang (tengkulak, pengepul) relatif lemah. Pedagang sudah mengikat petani dengan hutang modal, sehingga petani harus menyetor tembakaunya kepada pedagang yang memberi hutang. Petani tidak memiliki posisi untuk menentukan harga karena pembelinya terbatas. Hal ini memaksa petani untuk menjual tembakaunya kepada pedagang pemberi hutang. Selain itu, apabila transaksi jual beli antara pedagang dan petani tidak dilakukan dalam bentuk tunai (berdasarkan *girik*) atau tunai namun belum lunas, pembayaran atau sisa pem-

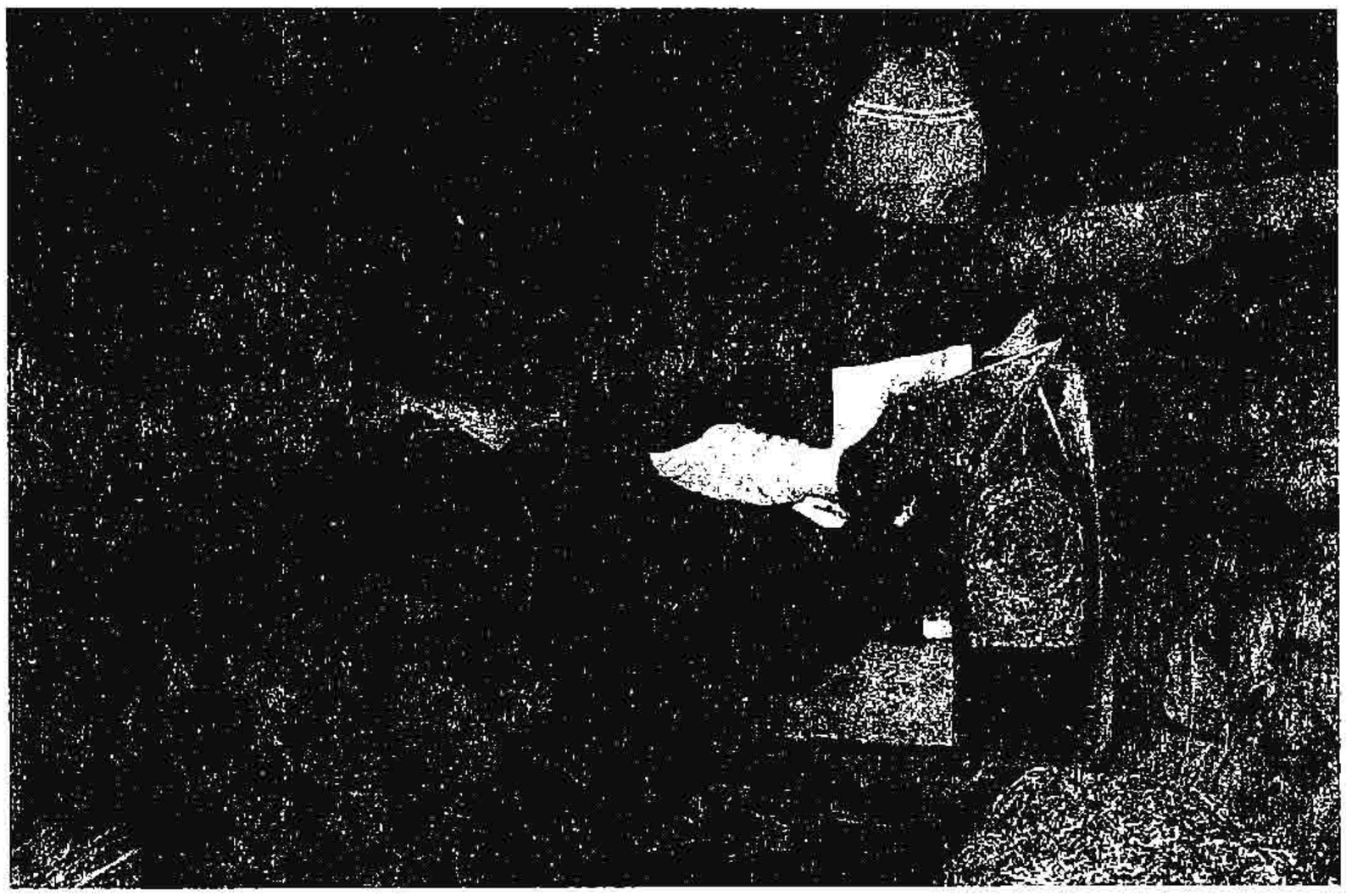
bayaran yang menjadi hak petani seringkali tidak dipenuhi oleh pedagang. Petani tidak bisa berbuat apa-apa, sebagaimana diceritakan Rcb:

> Petani kalau tembakaunya dibeli pedagang di sawah *(sistem ijon, pen.)* dan tidak dibayar dengan *cash,* kalau harga ternyata jatuh, maka jangan berharap akan dibayar. Paling hanya akan dijanjikan terus dan tidak akan dibayar.

Pedagang besar yang memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota), sebagai tanda untuk memiliki akses setor ke gudang pabrik, merupakan saluran resmi petani untuk menjual barangnya kepada pabrik. Petani tidak bisa menjual barangnya secara langsung ke pabrik, melainkan hanya melalui pedagang yang memiliki KTA (wawancara dengan Mtl, pedagang, 16 Februari 2011). Hanya petani yang memiliki tembakau *srintil* yang kadang didatangi pihak pabrik (wawancara dengan Nrh, petani, 20 Februari 2011). Pedagang besar yang ber-KTA inilah yang biasanya juga memberikan pinjaman kepada petani dengan sistem *nglimolasi* atau pinjaman yang memiliki bunga sebesar 50%. Pedagang besar yang menjalin hubungan dengan petani langsung memberikan pinjaman sebagai pengikat agar menjual tembakaunya kepada mereka. Jadi, selain mendapatkan keuntungan dari bunga yang dibayar petani, pedagang besar juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tembakau yang disetor petani.

Pedagang besar ber-KTA berhubungan dengan pabrik melalui *grader* resmi yang ditunjuk pabrik sebagai juru nilai kualitas tembakau yang dibawa pedagang. Pedagang ber-

KTA membawa sampel yang disebut *moster* dari tembakau yang akan disetornya sehari sebelum barang disetor. Kemudian *grader* menilai harga dari sampel yang dibawa oleh pedagang. Harga dituliskan pada kertas pengikat *moster*, besoknya barang dalam jumlah besar baru disetorkan ke gudang. Proses ini tidak terjadi di gudang resmi pabrik, namun di rumah atau gudang *grader* (wawancara dengan Mtl, pedagang, 16 Februari 2011).



Perajangan tembakau (foto: Humas Pemkab Temanggung)

Di gudang, barang yang ada di keranjang akan dicocokkan lagi dengan sampel. Tukang cocok gudang merupakan orang kepercayaan *grader*. Tukang cocok akan duduk di persimpangan gudang, kemudian seorang petugas akan menyerahkan sampel tembakau dan seorang tukang *tumplek* tembakau gudang akan menumpahkan (*numplek*) isi tembakau dari keranjang. Tukang cocok lalu mengambil tembakau *tumplek* dan mencocokkannya dengan contoh

tembakau yang ada di tangannya. Hal ini dilakukan pada setiap keranjang dengan contohnya masing-masing. Jika cocok, maka barang akan masuk gudang, dan jika tidak cocok, maka barang akan *out*, tidak bisa masuk ke gudang. Setelah semua proses dilalui, maka pencairan uang akan dilakukan melalui cek. Pedagang mencairkan uangnya ke bank untuk membayar pedagang pengepul atau petani.

Pada proses ini tukang cocok bisa bermain mata dengan pedagang yang ingin barangnya lolos ke gudang. Pedagang dan tukang cocok telah bertemu sebelumnya untuk bernegosiasi agar barangnya masuk, meskipun tembakau yang dibawanya tidak sesuai dengan contoh yang dibawa. Mantan ketua APTI Temanggung Ahmad Fuad (dalam Lipsus Kompas.com, 2010) membenarkan adanya praktik ini. Menurutnya:

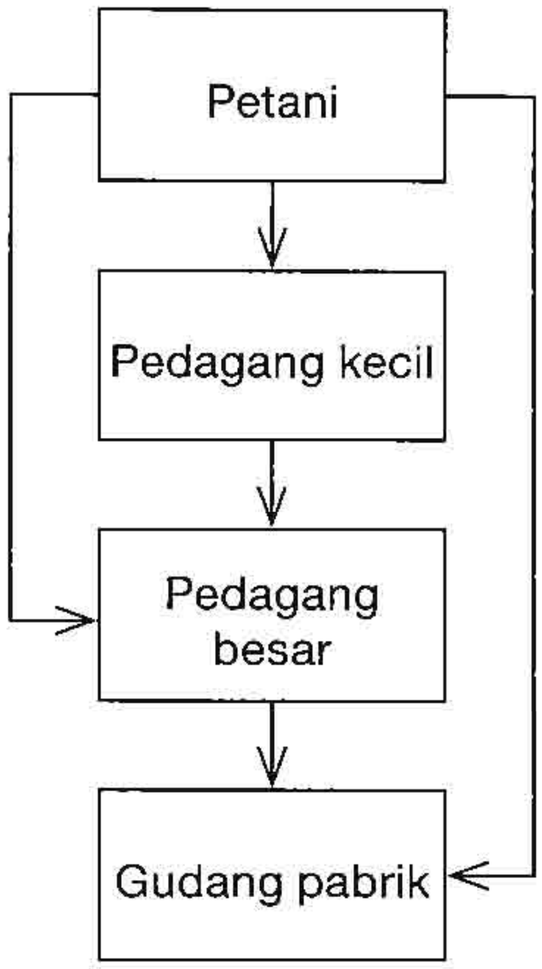
> Ada pedagang yang nakal, melakukan "permainan" dengan tukang cocok. Biasanya permainan di sini, misalnya pedagang menemui tukang cocok, *ngasih* berapalah, Rp 10 juta misalnya. Minta diloloskan, walaupun tembakau yang dibawa berbeda dengan sampelnya.

Ditambah lagi, tembakau yang diangkut ke gudang dengan mengunakan truk biasanya berjumlah amat besar. Jika proses penurunan tembakau dari truk ingin cepat, tukang angkut gudang yang menurunkan barang dari truk harus diberikan uang. Biasanya untuk *tumplek* pedagang membayar Rp 5.000,00 untuk setiap keranjang agar tukang *tumplek* mendahulukan atau menyegerakan *numplek* barang

yang dibawa pedagang (wawancara dengan Mtl, pedagang, 16 Februari 2011).

Penilaian tembakau oleh *grader* dilakukan dengan metode penciuman (aroma), *cekel* (pegangan), dan warna tembakau secara subjektif berdasarkan ilmu *titen* (hafal) sang *grader*. Tak terhindarkan, mereka yang membawa tembakau harus menghindari perbuatan yang bisa merusak suasana hati *grader*. Bila *mood grader* jelek, hal itu bisa-bisa mempengaruhi penentuan harga yang mesti diterima petani atas tembakaunya (wawancara dengan Thr, petani tembakau, 23 Februari 2011).

Bagan 4.4.
Alur Perdagangan Tembakau di Temanggung



Sumber: diolah dari hasil wawancara.

Berbeda dengan pertanian tembakau, pekerja dalam pertanian kopi di Temanggung biasanya didapat dari daerah

sekitar lahan kopi. Pemeliharaan lahan kopi tidak membutuhkan pekerja dalam jumlah yang banyak, sehingga biasanya dikerjakan sendiri oleh petani (wawancara dengan Azs, petani kopi, 27 Februari 2011). Namun, ada juga pekerjaan yang memerlukan pekerja seperti memupuk, menebang batang yang tidak produktif (*rempel*), sampai memanen hasilnya. Selain pekerja, dalam siklus kopi ada pengolah kopi menjadi *ose* (biji kopi yang sudah terkelupas dari kulitnya). Pada proses ini biasanya petani menyerahkan kopinya pada pemilik penggilingan untuk diproses menjadi *ose*. Biaya penggilingan tersebut bisa dibayarkan dalam bentuk kopi dengan perhitungan kopi *ose* yang dihasilkan atau dibayarkan dalam bentuk uang (wawancara dengan Wnn, petani dan pedagang kopi, 24 Februari 2011).

Pedagang perantara merupakan rantai selanjutnya dalam siklus pertanian kopi. Pedagang ini yang berkeliling membeli kopi dari petani untuk kemudian dijual pada pedagang besar atau eksportir. Namun, ada juga pola perdagangan yang tidak melalui pedagang perantara. Petani melalui kelompok tani menjual barangnya secara langsung kepada eksportir dan pabrik kopi bubuk. Sayang, petani tidak menerima uang secara langsung setelah menyerahkan barangnya pada kelompok tani. Kelompok tani menerima uang setelah barang masuk ke gudang eksportir, baru kemudian kelompok tani mendistribusikan uangnya pada petani (wawancara dengan sekretaris APEKI, 25 Februari 2011). Sebenarnya sistem ini memberikan harga yang sedikit lebih baik bagi petani dibanding menjual kepada tengkulak karena memutus jalur pemasaran yang panjang. Namun, penerimaan uang yang lama menjadi kendala bagi petani.

Yang perlu menjadi catatan, pertanian kopi biasa dikacaukan oleh pencuri kopi (wawancara dengan Stt dan Smn, petani kopi di Kandangan; Azs, petani kopi di Candiroto). Petani sangat khawatir dengan ulah pencuri kopi ini sehingga kerap memanen kopinya sebelum benar-benar merah agar tidak dicuri. Dampaknya, kualitas kopi menurun dan mempengaruhi harga jual kopi. Petani Gesing, menurut penuturan Sumarno, memberikan sebagian rezekinya saat panen kepada preman-preman yang dikenal suka mencuri kopi. Langkah ini diambil untuk mencegah pencurian kopi.

TRUST SEBAGAI PENOPANG

Di Malang, petani tembakau masih jarang yang terikat kemitraan dengan pabrik rokok. Implikasinya, terbentuklah rantai niaga yang lebih sederhana dibandingkan dengan sejumlah wilayah yang telah kita lihat sebelumnya. Interaksi hanya terjadi di antara petani, pengepul, dan pengecer. Selanjutnya menjadi tanggung jawab pengecer dan pasar.

Ada pemilik lahan yang terjun sendiri untuk menanam dan merawat tembakaunya, tetapi ada pula pemilik lahan yang tidak terlibat dalam mengurus lahannya, hanya menerima hasil panen dan menyerahkan pengaturan lahan kepada penggarap. Penggarap tidak memiliki lahan sendiri. Ia hanya dipercaya untuk mengelola lahan orang lain. Dalam mengelola lahan tersebut, penggarap dibantu oleh para buruh tani. Penggarap dan buruh bekerja bersama dari proses pratanam hingga pascapanen. Di Desa Jatiguwi, Malang, buruh lahan juga dipercaya untuk memproses tembakau

pascapanen dengan ikut merajang. Tembakau yang telah selesai dirajang akan dibagikan untuk penggarap dan pemilik lahan. Setelah itu barulah masing-masing pihak (pemilik lahan dan penggarap) bisa menjual tembakaunya.

Di Desa Jatiguwi, yang merupakan salah satu sentra pertanian tembakau di Malang, ada beberapa kategori petani tembakau, dengan dasar pemilikan lahan, yaitu:[2]

- Buruh tani lepas, yaitu petani yang tidak memiliki lahan sendiri dan tidak memiliki modal untuk menyediakan pupuk. Mereka hanya dapat bekerja pada lahan-lahan yang pada waktu tertentu membutuhkan tenaga untuk menanam bibit, memupuk, dan memanen. Umumnya untuk bertahan hidup para petani jenis ini bekerja di beberapa lahan sekaligus. Sistem upahnya adalah harian.
- Buruh tani tetap, yaitu pekerja tani ini sama halnya dengan buruh tani lepas, tidak memiliki lahan maupun modal untuk membeli pupuk. Bedanya, mereka memiliki ikatan dengan pemilik lahan. Umumnya mereka tidak hanya terlibat dalam proses penanaman, pemupukan, melainkan juga pratanam sampai pascatanam. Upah yang mereka terima berbentuk hasil panen (tembakau) yang kisarannya sebesar 25% dari total hasil panen.
- Petani penggarap, adalah petani yang tidak memiliki lahan sendiri tetapi mampu menyediakan modal untuk membeli pupuk dan bertangung jawab atas segala bentuk proses penggarapan lahan dari masa pratanam sampai masa pascapanen. Bentuk upah yang diterima adalah separuh dari hasil panen yang dikerjakannya. Mereka

2 Kategorisasi ini merupakan kesimpulan peneliti yang disusun berdasarkan hasil wawancara dengan para petani yang menjadi narasumber dalam penelitian ini.

inilah yang umumnya mempekerjakan buruh tani lepas pada masa menanam, memberi pupuk, dan memanen.

- Petani pemilik/pemilik lahan, adalah individu yang memiliki sebidang lahan untuk digarap. Proses penggarapan kebanyakan dipercayakan sepenuhnya kepada petani penggarap. Namun sebagian yang menyempatkan diri datang ke lahan dan terlibat sesekali dalam pekerjaan tani dan hadir saat panen. Pada masa pratanam, petani pemilik ini menyediakan bibit dan juga menyediakan pupuk (tergantung jenis kerjasamanya dengan petani penggarap). Penghasilan petani pemilik berupa tembakau/hasil jual tembakau pada masa panen.
- Petani kontrak lahan, adalah jenis petani yang tidak memiliki lahan namun mengontrak lahan untuk digarap. Kewajiban petani ini adalah membayar kontrak lahan per tahun kepada pemilik lahan. Selanjutnya untuk proses penggarapan lahan, mereka akan mencari petani penggarap dan buruh tani tetap/lepas. Mereka hanya bekerja untuk memastikan bahwa lahan yang dikontraknya dikelola dengan baik. Petani ini menerima hasil berupa panen tembakau.

Aspek lain yang berkaitan dengan kategorisasi tersebut adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan penggrap lahan (baik petani penggarap maupun buruh tani tetap). Dalam bentuk kerjasama itu dikenal istilah 1:3 dan 2:2. Hal itu melambangkan porsi pekerjaan dan hasil yang akan didapat oleh masing-masing pihak yang melakukan kerjasama. Untuk 1:3 berarti buruh tani tetap hanya menggarap lahan dan tidak menanggung pupuk serta menyerahkan 75% dari hasil panen kepada pemilik lahan. Sedangkan untuk 2:2, dikenal pula sebagai *paro*, pengelolaan lahan

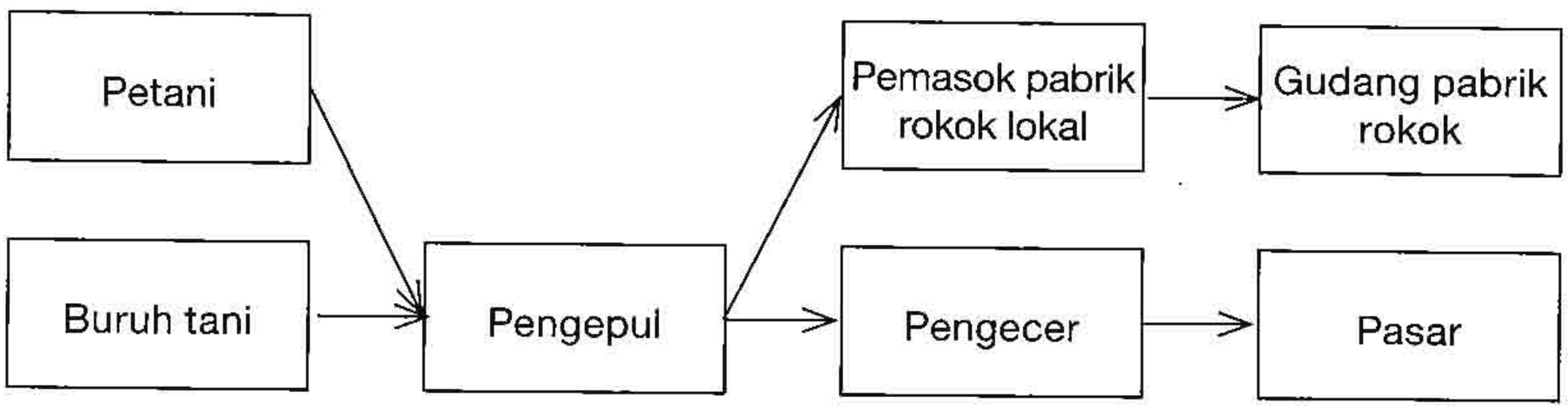
dan modal pupuk dibebankan pada penggarap, sementara hasil panen dibagi rata, masing-masing 50% untuk penggarap dan pemilik lahan.

Mereka yang bekerja dalam sektor pertembakauan di Malang biasanya terikat hubungan kerabat atau tetangga satu sama lain. Di Jatiguwi, misalnya, walaupun bukan desa besar, namun banyak penduduknya yang lahir dan besar di sana hingga saat ini, sehingga pertalian dengan orang sekitar sangat erat, bahkan dari generasi pertama hingga ketiga. Umumnya, pemilihan pekerja didasarkan pada hubungan kekerabatan (sepupu, keponakan, atau saudara kandung) dan baru tetangga. Hal ini berbeda dengan sistem pertanian padi di Desa Ngasem, yang karena keterbatasan jumlah buruh taninya mendorong para pemilik lahan atau petani penggarap untuk mencari bantuan dari wilayah lain saat mendekati masa-masa panen. Adapun pola hubungan kerja yang terjalin dalam pertanian tebu di Pakisaji hampir sama dengan pertanian padi di Ngasem. Namun, jumlah pekerja pertanian di Pakisaji masih lebih banyak daripada di Ngasem. Oleh karena itu, landasan pemilihan tenaga kerja tani, baik buruh maupun penggarap, akan lebih diprioritaskan pada tetangga, sebelum mencari tenaga tambahan dari desa maupun kecamatan lain.

Ada dua alur penjualan tembakau di Desa Jatiguwi, Malang. Pertama, dengan mendatangi tengkulak lokal di Jatiguwi. Dalam hal ini, ada beberapa nama yang sudah dikenal sebagai tengkulak. Kedua, dalam beberapa tahun belakangan ini, ada kecenderungan petani didatangi oleh tengkulak dari luar Desa Jatiguwi. Nama Desa Jatiguwi sebagai penghasil tembakau sudah cukup dikenal tengkulak dari kabupaten atau kecamatan lain. Ketika musim panen

tiba, pembeli dari luar itu sudah berdatangan ke rumah-rumah petani untuk membeli tembakau secara langsung (wawancara dengan Trj, 23 Februari 2011). Pemilik tembakau tinggal memilih harga mana yang paling kompetitif. Jadi, proses penjualan tembakau tidak hanya berlangsung melalui kalangan terbatas (melalui tengkulak lokal). Ada juga penggarap dan buruh tani yang didatangi oleh pembeli tembakau pascapanen. Pembeli ini cukup beragam latar belakangnya, mulai dari pihak pabrik rokok lokal sampai perorangan (pengkonsumi tembakau) yang membeli tembakau secara eceran. Berbeda dengan di Temanggung, Demak, dan Pamekasan, perdangan tembakau di Jatiguwi masih sederhana sebab hanya melibatkan petani dan tengkulak. Eksistensi *grader* tidak begitu nampak dalam perniagaan tembakau di Jatiguwi.

Bagan 4.5.
Alur Perdagangan Tembakau di Malang



Sumber: diolah dari hasil wawancara.

Satu aspek menarik yang mewarnai perdagangan tembakau di Jatiguwi adalah terjalinnya kepercayaan (*trust*) yang baik antara petani dengan pengepul. Hal ini karena

adanya ikatan personal di antara mereka, baik yang terjalin melalui kekerabatan atau ketetanggaan.

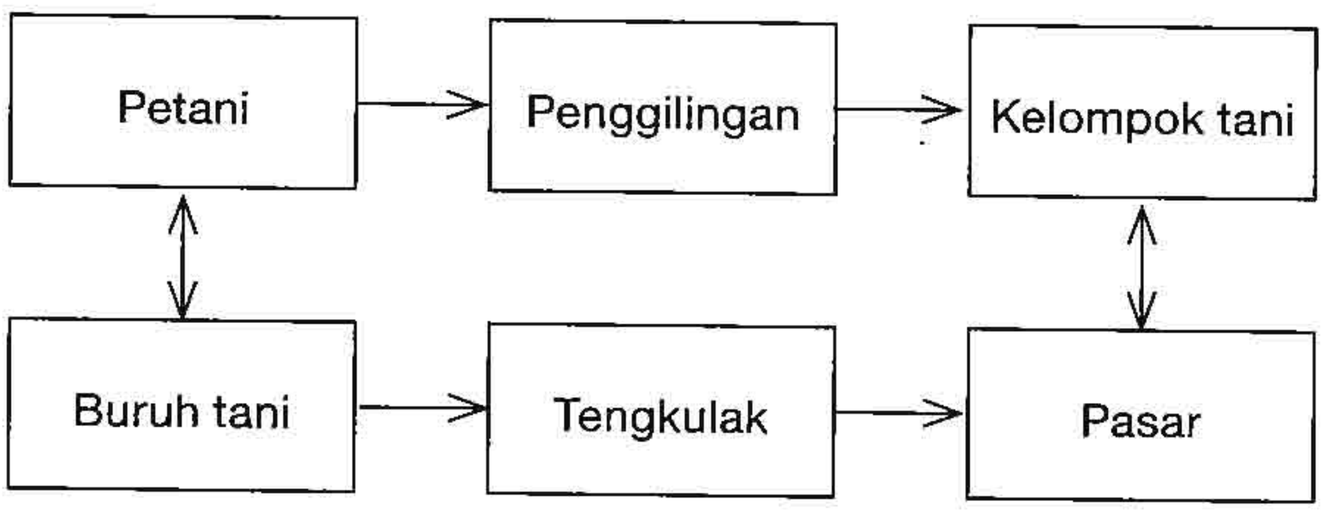
Harga tembakau di Jatiguwi ditentukan oleh pengepul yang mengikuti harga pasar. Selain itu, dengan banyaknya pembeli eceran yang datang ke desa pada musim panen, petani bisa menjual tembakaunya kepada pengecer yang berani memberikan harga tinggi (wawancara dengan Sum, pengepul, 22 Februari 2011).

Sementara itu, sistem perniagaan padi di Ngasem cenderung menguntungkan petani. Hal ini tak lepas dari peran kelompok tani. Petani bisa memilih untuk menjual gabahnya kepada kelompok tani atau tengkulak. Tapi harga yang dipatok tengkulak biasanya lebih rendah dibandingkan harga yang ditawarkan kelompok tani. Perbedaannya bisa mencapai 25% (wawancara dengan Mm, 16 Februari 2011). Kecuali terpaksa, petani tentu saja lebih memilih untuk menjualnya kepada kelompok tani sebab lebih menguntungkan.

Dalam sistem perdangan tebu di Pakisaji, aturan main ditentukan oleh mitra petani, yaitu pabrik gula, yang memberikan pinjaman lunak kepada petani berupa pupuk dan bibit. Pinjaman itu mesti dilunasi petani kelak pada saat panen dalam bentuk gula (ada juga yang melunasinya dalam bentuk uang). Pascapanen, buruh tani mengangkut tebu ke dalam truk-truk, lantas dibawa ke pabrik gula oleh tim pengangkut tebu yang terdiri atas pemilik transportasi dan penggarap lahan atau orang kepercayaan petani. Setelah sampai di pabrik, tebu tidak langsung masuk ke penggilingan, namun diuji terlebih dahulu kadar gulanya oleh unit laboratorium yang dimiliki pabrik. Setelah itu barulah tebu diproses menjadi gula. Ada juga tebu yang diproses di pa-

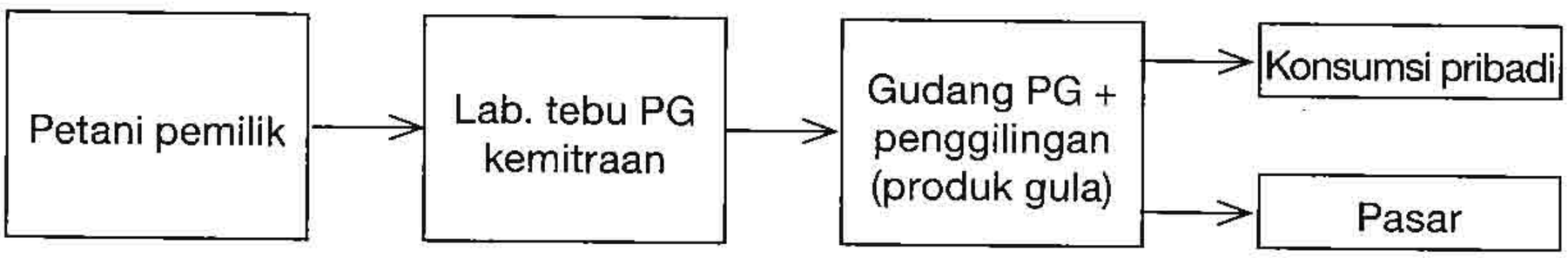
brik gula tingkat rumahan. Jika tidak dalam bentuk uang, gula inilah yang kemudian digunakan sebagai alat untuk melunasi hutang petani kepada pabrik.

Bagan 4.6.
Alur Perdagangan Padi di Malang



Sumber: diolah dari hasil wawancara.

Bagan 4.7.
Alur Perdagangan Tebu di Malang



Sumber: diolah dari hasil wawancara dan FGD.

Pada dasarnya, pola kemitraan yang dilakukan pabrik gula banyak membantu petani dalam mengurangi beban modal awal (masa pratanam sampai tanam) mereka. Akan tetapi, perhitungan berat tebu, uji kadar gula, dan penentuan harga berdasarkan kadar gula, seluruhnya dilakukan oleh pihak pabrik. Hal ini sedikit-banyak merugikan petani

sebab tidak bisa mengontrol ketepatan dari perhitungan tersebut. Selain itu, karena proses pengangkutan tebu sampai penggilingan memakan waktu yang sangat panjang, mengingat di Kabupaten Malang hanya ada 2 pabrik gula, maka sewaktu musim panen selalu terjadi antrian panjang untuk sampai ke proses penggilingan. Alhasil, ketika tiba giliran tes kadar gula, tidak jarang kadar gula tebu yang dimiliki petani sudah menyusut, yang berdampak pada berkurangnya pendapatan petani.

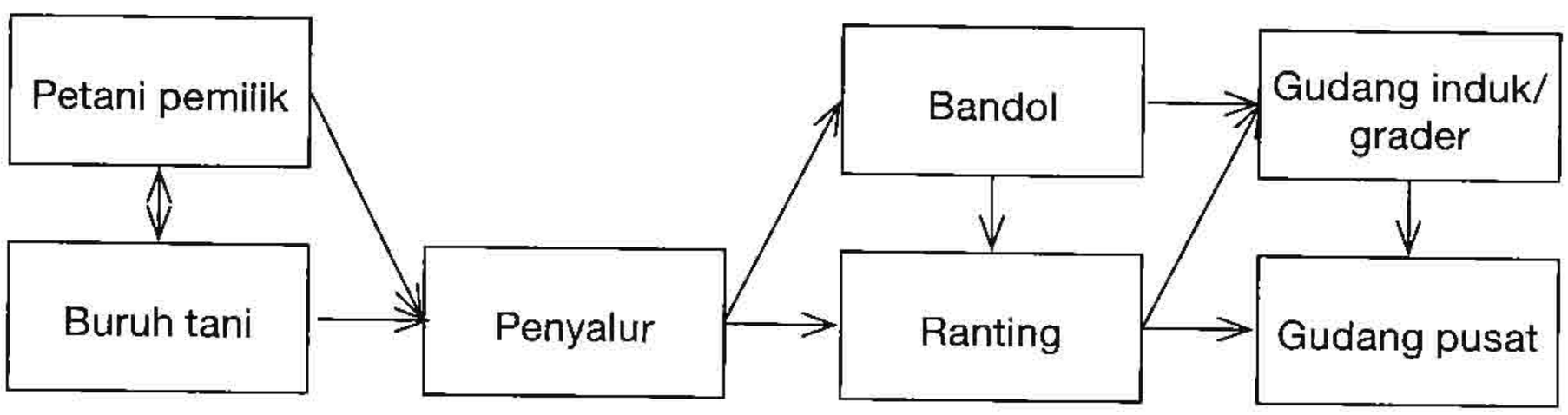
ADU SIASAT DEMI MEMAKSIMALKAN KEUNTUNGAN

Di Pamekasan, kita dapat menjumpai bagaimana kerumitan yang harus dihadapi petani tembakau dalam perniagaan, berujung pada situasi yang mengharuskan adanya adu siasat di antara para pelaku perekonomian tembakau. Pada bagan di bawah ini, kita dapat melihat garis besar perdagangan tembakau. Perniagaan tembakau memiliki mata rantai yang lebih banyak dibandingkan dengan garam. Di setiap mata rantai terdapat biaya penyaluran maupun penarikan keuntungan, sehingga selisih harga dari petani ke gudang menjadi lebar.

Alur perniagaan tembakau dari kiri ke kanan berikut tidak semata-mata menggambarkan bagaimana bahan mentah masuk ke pabrik untuk diolah, tetapi juga menggambarkan relasi hierarkis-vertikal. Buruh tani adalah aktor yang paling marjinal. Petani pemilik lahan lebih beruntung karena memiliki lahan. Dia bisa terbebas dari aktivitas pertanian, mulai pratanam hingga penjualan, dengan menyerahkannya

kepada buruh. Pascapanen dia tinggal menerima pembagian keuntungan. Lantaran keunggulan posisi inilah, terkadang petani pemilik juga dapat merangkap sebagai penyalur dan memperoleh penghasilan yang lebih besar. Terkadang penyalur juga tidak memiliki lahan, tetapi dia mempunyai modal besar untuk bisa membeli produk petani. Namun, tanpa modal pun sebenarnya seseorang bisa juga menjadi penyalur.

Bagan 4.8.
Alur Perdagangan Tembakau di Pamekasan



Sumber: diolah dari hasil wawancara.

Penyalur akan mengambil contoh produk petani terlebih dahulu, biasanya tidak lebih dari satu kilogram untuk ditunjukkan pada *bandol* atau ranting. Jika *bandol* atau ranting setuju, penyalur diminta membawa seluruh tembakau petani yang dibelinya untuk diserahkan pada gudang milik *bandol* atau ranting. Ranting adalah *bandol* yang telah dipercaya oleh gudang induk untuk menyimpan tembakaunya sebelum masuk ke gudang induk. *Bandol* dan ranting kemudian mengambil sampel untuk ditunjukkan pada *grader* di gudang induk. Selanjutnya, *grader* menentukan *grade* dan harga tembakau, serta memutuskan bisa

atau tidak tembakau tersebut dibeli/masuk gudang. Jika gudang induk setuju, tembakau dari *bandol* akan dibawa masuk ke gudang. Khusus untuk ranting, apabila tembakau yang dibawanya disetujui, hasil panen tersebut tidak harus langsung masuk ke gudang induk, tetapi dapat disimpan terlebih dahulu di gudang ranting. Setelah masuk gudang induk, *grader* akan melaporkan hasil pembeliannya kepada gudang pusat dengan menunjukkan sampel.

Di setiap mata rantai itu terdapat potensi terjadinya kecurangan. Para pelakunya, mulai dari petani hingga oknum dari gudang induk. Mereka saling adu siasat untuk untuk meraup keuntungan sebesar mungkin dalam perdagangan tembakau. Penyalur akan membayar petani setelah memperoleh uang hasil penjualan dari *bandol*. Namun, jika tembakau yang dijualnya ternyata tidak bisa masuk ke gudang, tembakau petani itu akan dihargai murah oleh *bandol*. Meski esoknya sebenarnya tembakau itu masih dapat terjual, bahkan dengan harga yang lebih tinggi, tetapi petani tidak berdaya jika tembakaunya sudah dibilang jelek dan tidak bisa masuk gudang. *Bandol* terhadap penyalur, dan sebaliknya, bisa saling menipu. Praktik suap untuk memuluskan tembakau yang diajukan *bandol* untuk masuk ke gudang induk juga lazim terjadi.

Grader, sebagai pihak yang paling berkuasa dalam menentukan kualitas dan harga tembakau, memiliki potensi paling besar untuk bersiasat meraup keuntungan, mulai dari bersiasat terhadap petani, terhadap ranting, bahkan terhadap gudang pusat.[3] Siasat itu biasanya dilakukan me-

3 Walaupun *grader* merupakan orang kepercayaan pabrik rokok, yang dilakukan *grader* di Pamekasan tersebut bukanlah kebijakan resmi pabrik. Kalau benar terjadi, kemungkinan hal itu adalah tindakan oknum (wawancara dengan seorang eksekutif pabrik rokok, 7 Juli 2011).

lalui mekanisme buka/tutup gudang. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2008 sebenarnya telah mengatur bahwa setidaknya seminggu sebelum tutup, ia harus memberikan pengumuman kepada publik. Namun, sering kali gudang memberikan pengumuman dalam waktu kurang dari seminggu dengan alasan, misalnya, karena stok gudang telah penuh. Kontrol pemerintah terhadap *grader* dalam kenyataannya lemah dan tidak ada sanksi yang tegas atas pelanggaran tersebut. Padahal efek dari penutupan gudang yang mendadak ini akan merugikan petani dan penyalur, termasuk *bandol* yang tidak memiliki gudang karena tidak dapat menyimpan tembakau yang belum terjual. Akibatnya, harga tembakau anjlok karena kualitasnya dianggap menurun saat gudang kembali dibuka.

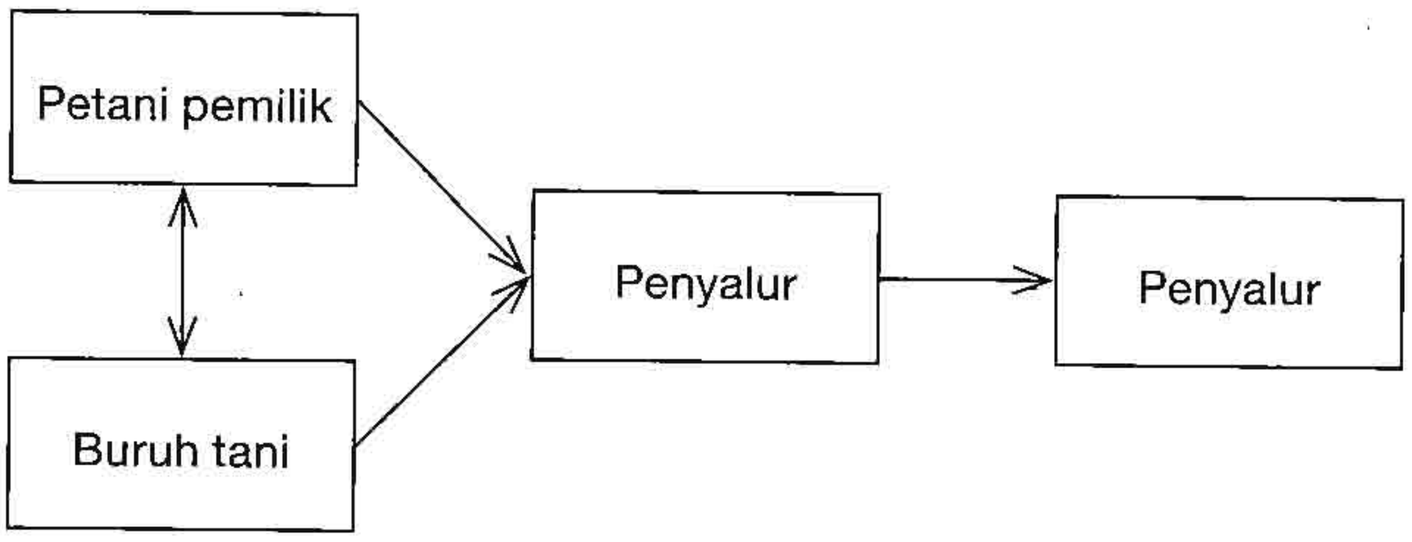
Gudang induk biasanya membuka pembelian tiga kali: daun bawah, daun tengah, dan daun atas dengan kualitas serta harga yang semakin tinggi. Keputusan buka/tutup gudang biasanya dilakukan bersama dengan ranting dan disetujui oleh gudang pusat. Namun, *grader* kerap menyiasati gudang pusat agar seolah-olah gudangnya telah penuh guna memperoleh pembelian dari rantai di bawahnya dengan harga yang lebih murah. Selain itu, *grader* juga kerap memainkan label mutu tembakau. Ranting adalah pihak yang paling tahu tentang kecurangan ini karena dia sebenarnya juga dapat mengenali derajat mutu tembakau. *Grader* juga bisa memperoleh "bonus" dengan menumpuk sampel. Gudang biasanya mengambil sampel per karung hingga 3 kg. Jika satu gudang induk bisa menampung 15.000 karung, maka dapat diperoleh tembakau cuma-cuma sebanyak 45 ton. Jika per kilogram tembakau dihargai Rp 25.000,00, maka *grader* bisa memperoleh "bonus" hingga Rp 1,1 mili-

ar. Perda Nomor 6 Tahun 2008 yang mengatur pembatasan pengambilan sampel maksimal 1 kg nampaknya justru membuka peluang baru "permainan" antara tim pengawas dengan pemilik gudang.

Sebenarnya petani juga dapat bersiasat untuk memperoleh keuntungan lebih banyak dari penyalur dan gudang dengan cara mencampurkan tembakau kualitas sawah (rendah) dengan kualitas gunung (tinggi), sehingga tembakau menjadi kualitas tegal dan gunung (sedang mendekati tinggi). Jadi, harga tembakaunya akan lebih mahal. Cara ini biasanya dilakukan petani tembakau gunung. Yang lebih berpeluang mencampur tembakau ini adalah penyalur dan *bandol* karena mereka memiliki modal untuk menyimpan sementara sebelum dijual. Ada juga siasat mencampur tembakau Pamekasan dengan tembakau Jawa yang kualitas dan harganya lebih rendah. Tetapi pada 2003 pemerintah Kabupaten Pamekasan telah mengeluarkan Perda Nomor 23 Tahun 2003 yang melarang impor tembakau dari Jawa untuk memurnikan tembakau Madura.

Berbeda dengan perdagangan tembakau, perniagaan garam tidak melibatkan banyak pihak. Aktor-aktor yang terlibat adalah buruh tani, petani pemilik, tengkulak, dan pabrik garam. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada penyimpangan dan tipu muslihat—penyelewengan adalah hal yang lazim terjadi ketika kekuasaan satu pihak atas pihak lain terlalu besar dan tidak dapat diawasi. Seperti yang terjadi dalam persoalan distribusi komoditas pertanian pada umumnya, yang mencekik petani adalah para tengkulak yang membeli garam dengan harga murah, kemudian menjual dengan selisih harga yang lebih tinggi kepada pabrik.

Bagan 4.9.
Alur Perdagangan Garam di Pamekasan



Sumber: diolah dari hasil wawancara.

Perusahaan garam, yang kedudukannya paling tinggi, juga dengan enteng menekan petani dan tengkulak. Pemerintah mempunyai kebijakan mengatur impor garam yang idealnya dapat memperkuat kedudukan petani garam dalam negeri. Hanya perusahaan yang telah memperoleh persetujuan dari asosiasi petani garam yang boleh melakukan impor; syaratnya, perusahaan tersebut telah menyerap minimal 25.000 ton garam rakyat. Namun, pihak pabrik dapat menyiasatinya dengan membentuk asosiasi sendiri, sehingga dapat mengimpor garam yang harganya lebih murah. Impor ini biasanya diambil dari Australia dan India yang harga garamnya sekitar Rp 300.000,00/ton, sementara harga garam rakyat mencapai Rp 600.000,00/ton. Garam impor lebih murah karena termasuk garam industri yang tidak bisa dijual langsung kepada konsumen sebagai garam konsumsi. Pihak perusahaan biasanya juga langsung menjual garamnya itu sebagai garam konsumsi rumah tangga.

5

TEMBAKAU DALAM DENYUT BUDAYA KAUM TANI

Bab ini merupakan sisi yang agak berbeda dari buku ini; mengenai bagaimana pengaruh pertanian tembakau terhadap kebudayaan para petani dan masyarakat setempat. Apa yang hendak disampaikan dalam bab ini, barangkali agak melenceng dari persoalan inti buku ini yang sebagiannya telah dibicarakan dalam sejumlah bab sebelumnya: memperlihatkan bagaimana nafas kehidupan begitu banyak petani disangga oleh tanaman tembakau. Akan tetapi, bagian ini sama sekali tidak hendak menyelingi ataupun meluruhkan keutuhan tema tersebut. Justru, kami pikir, bab 5 ini bisa menjadi ilustrasi yang amat kokoh untuk menggambarkan arti penting tembakau bagi kehidupan masyarakat penanamnya secara menyeluruh.

Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, tembakau membentuk dan menentukan aktivitas-aktivitas inti wilayah pertanian komoditas ini. Kebudayaan, yang berarti pikiran, akal budi, mentalitas yang sudah mendarah daging secara kolektif dalam suatu masyarakat, dibentuk lewat proses-proses sosial-ekonomi. Satu proses sosial-ekonomi yang vital

akan meninggalkan jejak yang kontras dan amat kasat mata dalam wajah kebudayaan sekelompok orang. Upacara-upacara spiritual agar panen tembakau berhasil, kualitasnya bagus, dan harganya tidak rendah, yang didatangi banyak warga tak lain menunjukkan bagaimana tanaman ini, dengan nilai ekonomis yang dimilikinya, telah meresap ke dalam sari batin masyarakat setempat. Sebagai fundamen ekonomi, baik individu maupun masyarakat setempat, tembakau masuk dan mengambil tempat yang tak akan pernah bisa digantikan dalam kebudayaan dan cara masyarakat petaninya memandang hidup.

MINTA BERKAH DALAM HAJAT BUMI

Masyarakat Kabupaten Sumedang, khususnya Kecamatan Ujung Jaya dan Tanjungsari, secara kultur keagamaan mengikuti tradisi NU, tetapi secara orientasi politik lebih dekat ke kultur abangan.[1] Mereka sering mempraktikkan tradisi keagamaan seperti *tahlilan*, *mauludan*, *yasinan*, *dzibaan*, *hadlarahan*, dan lainnya. Selain itu, ada juga tradisi budaya yang lebih mendekati sinkretisme-animisme, seperti kepercayaan adanya tempat-tempat keramat untuk pemujaan arwah leluhur. Di Kecamatan Ujung Jaya ada beberapa situs yang biasa digunakan untuk upacara tradisi yaitu, Makam Keramat, Sumur Kajayaan, Sumur Tujuh. Ketiganya ada di Desa Cipinangpait Kecamatan Ujung Jaya. Selain

1 Terbukti, pada pemilu 2009, meski tradisi keagamaan masyarakat Sumedang adalah NU, tetapi pilihan politiknya bukan PKB. Justru, partai politik yang memenangi pemilu tersebut adalah PDIP. Jadi, ada perbedaan orientasi keagamaan dengan orientasi politik. Di Kecamatan Ujung Jaya PDIP mendapat dua kursi, sisanya PKS, PAN, Golkar masing-masing mendapat satu kursi, sedangkan PKB tidak sampai mendapat satu kuris (hanya 506 suara).

itu, juga ada situs Makam Jagat Ratu di Desa Cibuluh dan Bendungan Cariang (*Renstra Kecamatan Ujung Jaya 2009-2013:* 22).

Berangkat dari kultur keagamaan tersebut, masyarakat petani Sumedang memiliki upacara hajat bumi[2] yang dilaksanakan setahun sekali setiap menjelang musim tanam. Dalam upacara ini dilantunkan bacaan doa-doa kepada leluhur untuk meminta berkah pada musim tanam padi mendatang. Acara ini dipimpin oleh juru kunci makam keramat. Ada dua lokasi yang digunakan untuk upacara hajat bumi: Makam Keramat Jaya dan Makam Mbah Buyut Chasun (wawancara dengan Eyk, juru kunci makam Mbah Buyut Chasun, 19 Februari 2011).

Pada awalnya, upacara ini banyak diprotes, dianggap mengandung unsur syirik karena maksud dan tujuan hajat bumi adalah meminta berkah kepada *karuhun* (arwah para leluhur yang sudah meninggal), bukan kepada Allah. Akan tetapi, pada perkembangan berikutnya acaranya diubah menjadi kegiatan *tawassul* (berwasilah), yaitu upacara baca doa dan menjadikan hajat bumi sebagai perantara untuk menyampaikan maksud utamanya. Sekarang ini upacara hajat bumi diiringi dengan bacaan doa-doa dan *hadlarahan* (menghadiahkan fatihah untuk arwah leluhur) oleh kyai-kyai dari NU (wawancara dengan Asf, 19 Februari 2011).

---

2 Tidak ada referensi yang bisa menjelaskan adat tradisi upacara hajat bumi, kecuali hanya penuturan lisan dari warga masyarakat. Dalam buku *Profil Potensi Wisata, Seni, Adat, dan Budaya Kabupaten Sumedang*, yang diterbitkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumedang (tanpa tahun), ada satu upacara yang mirip dengan upacara hajat bumi, yaitu upacara *ngalaksa*, sebuah tradisi menjelang musim tanam padi. Upacara ini banyak dilakukan di Kecamatan Rancakalong. *Ngalaksa* berasal dari bahasa *galaksanakeun* yang berarti melaksanakan sesuatu untuk memperoleh tujuan. Sama dengan hajat bumi, upacara *ngalaksa* dilakukan melalui musyawarah untuk menentukan waktu dan tempat, serta dipimpin oleh *saehu* (sesepuh) kampung.

Upacara hajat bumi juga dihadiri oleh pihak kecamatan, seluruh warga desa, dan menariknya, petugas penyuluh pertanian. Petugas penyuluh pertanian akan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pertanian. Selain itu, di tengah upacara ini digelar musyawarah pembahasan kapan musim tanam akan dimulai. Isu-isu pertanian lain, seperti rencana perbaikan saluran air (irigasi) pertanian juga tercetus (wawancara dengan Slh, 20 Februari 2011). Meskipun demikian, tidak semua petani mengikuti upacara hajat bumi. Kalangan buruh tani, salah satunya, lebih memilih bekerja daripada harus ikut upacara. Kalau tetap ikut upacara, mereka harus kehilangan sumber pendapatan selama satu hari (wawancara dengan Ars, 26 Februari 2011).

HAUL MBAH HADI: MELIHAT ISYARAT "LANGIT"

Di Demak terdapat satu kelompok *thariqah* yang rutin mengadakan kegiatan setiap Kamis malam. Jamaah *thariqah* ini bernama *Thariqah Khalidiyah Naqsabandiyah,* dipimpin tokoh kharismatik Kyai Munif Zuhri. Kyai Munif, menurut penuturan warga setempat, sering didatangi Abdurrahman Wahid dan juga tidak ketinggalan para politisi lainnya, termasuk Megawati dan Jusuf Kalla. Pusat kegiatannya terletak di Dusun Girikusumo, Desa Banyumeneng. Pada setiap malam Jumat, pesantren Giri Kusumo dipadati oleh para jamaah *thariqah* ini. Menurut informasi, mereka terdiri dari para petani di sekitarnya, termasuk para petani yang masih tetap menanam tembakau.

Dengan sendirinya, keberadaan *thariqah* tersebut memberi bentuk bagi kultur para petani setempat, yang merupakan para santri yang mengakrabi sufisme dengan aktif dalam kegiatan spiritual mereka. Bisa kita lihat, menjelang musim tanam biasanya para petani tembakau melangsungkan doa dan makan bersama yang dikenal dengan sebutan *mayoran*. Tembakau dan dunia santri menjadi dua hal yang tak bisa dilepaskan di wilayah ini.

Pondok Pesantren Giri Kusumo yang biasa dipadati *thariqah* ini terbilang cukup tua. Menurut sumber sejarah lisan, pesantren ini didirikan pada 1288 H atau bertepatan dengan 1868 M, oleh sosok bernama Mbah Hadi. Setiap tahun pada bulan Rajab selalu diperingati haul Mbah Hadi. Pada masyarakat di sekitarnya, termasuk Banyumeneng dan Sumberejo, muncul keyakinan bahwa cuaca pada saat perayaan tersebut akan mempengaruhi cuaca pada musim panen tembakau. Jika acara haul dilanda hujan, para petani percaya akan terjadi juga hujan pada musim panen tembakau yang tentu saja berakibat pada turunnya kualitas daun tembakau dan memburuknya harga jual.

> Saya juga tidak tahu sejak kapan kepercayaan seperti ini muncul di wilayah ini. Uniknya, para petani terutama dari Sumberejo sangat berpegang pada cuaca sewaktu haul Mbah Hadi. Saya sendiri juga setengah tidak percaya, namun warga kebanyakan mempercayai hal itu. Dengan keyakinan itu, biasanya jumlah lahan untuk tanam tembakau dipersempit. (Wawancara dengan Nr, 22 Februari 2011)

Terkadang pada waktu harga tembakau jatuh, tausiyah dari Kyai Munif menyinggung soal pentingnya menjaga kesabaran dan keimanan, sekalipun tengah dilanda jatuhnya harga tembakau (wawancara dengan Nim, 17 Februari 2011).

Warga petani juga mempercayai siklus tahunan dengan membedakan angka tahun ganjil dan genap. Mereka mempercayai hitungan ini akan berpengaruh pada hasil tanaman tembakaunya.

> Di sini ada kepercayaan, kalau tahun ini umpamanya ganjil, misalnya 2011, maka orang percaya akan membawa keberuntungan. Harga tembakau akan tinggi. Mungkin ini mengacu pada tahun 1999 ketika harga tembakau bagus, hingga harga tertinggi bisa mencapai Rp 60.000,00 (per kg). Tahun itu *kan* ganjil, jadi masyarakat di sini lantas mempercayai kalau tahun ganjil, harga akan bagus seperti tahun 1999. Padahal, kenyataannya tidak demikian juga. (Wawancara dengan Nim, 17 Februari 2011)

Tahun 1990-an, pada saat harga tembakau berjaya, pertunjukan wayang kulit besar-besaran pernah dipanggungkan di wilayah Sumberejo. Pada tahun-tahun yang sama, acara-acara perkawinan di daerah ini juga diselenggarakan dengan amat meriah. Namun, acara-acara kesenian massal yang berbiaya tinggi ini tidak pernah lagi dipentaskan—hilang seiring dengan rendahnya harga jual tembakau.

MENGHITUNG HARI, MENCARI "HARI BAIK"

Temanggung mempunyai berbagai aktivitas kebudayaan yang bertalian langsung dengan pertanian tembakau. Pertanian kopi juga memberikan bentuk bagi kebudayaan masyarakat setempat, meski belakangan ritual-ritual yang berkenaan dengan komoditas ini kian pudar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap ritual yang diselenggarakan petani Temanggung adalah doa memohon berlimpahnya hasil pertanian.

Setiap memulai suatu tahapan pekerjaan seperti mencangkul, menanam, dan memanen, petani tembakau Temanggung biasanya menggunakan perhitungan hari. Perhitungan hari ini merupakan perpaduan kalender Jawa dan Masehi. Ada hari-hari tertentu yang dipercaya sebagai hari baik berdasarkan perhitungan *neptu*-nya. Selain itu, ada juga yang menggunakan *weton,* hari kelahiran petani yang dihitung dalam kalender Jawa. Pada pertanian tembakau, petani memulai masa mencangkul dengan ritual *nyecel,* yaitu membuat nasi *golong* yang kemudian dikenduri atau didoakan di rumah, lalu dibawa ke tegal. Di daerah tertentu biasanya ritual ini dilakukan pada hari Selasa Legi (wawancara berkelompok di Dusun Cepit, 21 Februari 2011). Setelah didoakan nasi tersebut biasanya dimakan oleh pekerja yang akan mencangkul lahan tembakau.

Dusun Cepit memiliki keunikan budaya tersendiri dalam kegiatan persiapan masa tanam tembakaunya. Paguyuban seni setempat memanfaatkan masa tanam tembakau ini untuk mengumpulkan uang. Caranya, anggota paguyuban diminta agar menyediakan waktu sehari dalam seminggu

untuk mencangkul lahan petani yang membutuhkan tenaga. Uang hasil kerja tersebut kemudian disetorkan pada organisasi. Uang inilah yang digunakan untuk menggerakkan organisasi kesenian, juga kegiatan-kegiatan kebudayaan di kampung tersebut.

Pada saat memulai tanam tembakau dikenal ritual *nglekasi* yang menyajikan jajan pasar, ketan hitam, dan makanan lainnya. Prosesinya berbeda di tiap-tiap daerah. Ada yang hanya didoakan di rumah kemudian dibagi-bagikan pada tetangga, atau dibawa ke sawah untuk didoakan dan dimakan bersama pekerja. Ada yang didoakan kemudian diletakkan pada setiap penjuru lahan. Ada pula yang mencari hari baik tertentu untuk mulai tanam seperti Selasa Legi atau lainnya sesuai hitungan hari pasaran Jawa (ada juga yang menggunakan perhitungan *weton*). Masing-masing hari ada angkanya, misalnya, untuk Selasa berapa, Legi berapa, lalu dijumlahkan, dan bibit sebanyak hasil penjumlahan itulah yang akan ditanam lebih dulu sebagai tanda sudah mulai tanam. Pemilihan hari ini penting. Meskipun kadang hari baiknya jatuh pada saat cuaca masih belum sesuai untuk masa tanam, petani akan tetap menanam berdasarkan perhitungan hari tersebut (wawancara dengan Imb, petani tembakau, 21 Februari 2011).

Dalam memulai panen dikenal ritual *wiwit* yang menyajikan makanan dalam bentuk *ingkung* (ayam dimasak utuh) untuk satu lahan. Jika petani memiliki tiga lahan yang terpisah, maka untuk *wiwit* petani menyediakan tiga *ingkung* (wawancara dengan Str, petani, 22 Februari 2011). Untuk ritualnya juga berbeda-beda di tiap daerah di Temanggung. Ada yang didoakan di rumah, ada yang dibawa ke sawah. Di beberapa daerah, ritual di sawah didoakan oleh seorang



Istighosah akbar umat peduli tembakau di Temanggung (foto: syukron)



Tumpeng yang dibawa para petani untuk istighosah akbar (foto: syukron)

kaum (perangkat desa yang mengurusi bagian keagamaan) dengan membakar kemenyan. Biasanya, ritual ini dilakukan setelah Maghrib atau saat matahari tenggelam.

Wld menambahkan, di beberapa daerah ada tradisi unik dalam memulai memetik tembakau, *"Ada yang khusus, di Katekan, Ngadirejo, itu malah menyebar (kue) apem. Di Ngadirejo, (ritual) ini hanya di Katekan saja."* Tradisi *wiwit* ini juga dilakukan oleh petani kopi. Untuk tradisi pergelaran besar seperi pengajian akbar biasanya dilakukan pada masa bersih desa atau Maulid Nabi dengan dana patungan. Kegiatan besar ini biasanya dilakukan pascapanen tembakau dan kopi. Masa pascapanen, baik itu pada pertanian kopi maupun tembakau, umumnya diikuti dengan berbagai kegiatan *syukuran*. Warga pun datang berduyun-duyun untuk mengikutinya.

DARI SESAJEN HINGGA TARIAN MAGIS KUDA LUMPING

Di desa para petani tembakau di Malang, semasa musim tanam dan prapanen padi—tanaman selingan tembakau—petani meminta bantuan "orang pintar" lokal untuk berdoa secara kejawen di lahan yang baru ditanami dan yang akan segera dipanen (pengamatan di Jatiguwi, 22 Februari 2011). Selain didoakan, pemilik sawah juga wajib mempersiapkan *sesajen* (sesaji). Sesaji ini biasanya diletakkan di sudut sawah. Pada sesaji yang diletakkan sebelum panen terkandung harapan agar panen berjalan lancar.

Selain itu, sistem penanggalan Jawa juga masih tertanam dalam kepercayaan para petani (pahing, pon, wage, kliwon,

legi). Ada hari-hari yang dianggap lebih baik untuk mulai menanam seperti hari-hari legi, dan ada hari-hari yang dianggap kurang baik untuk pergi ke sawah seperti hari-hari ketika orang tua meninggal dunia (misalnya, orang tua meninggal pada hari Selasa Pahing, maka sebaiknya petani tidak ke sawah pada setiap hari itu).

Ada pandangan bahwa ritual budaya lokal yang dianggap tidak terkait dengan ritual keagamaan perlahan mulai ditinggalkan oleh para petani. Hal ini dinyatakan dengan tegas oleh Muh, bahwa sejak akses terhadap pelajaran maupun pengetahuan agama Islam semakin meningkat, banyak petani yang memandang esensi ritual budaya Jawa agak berlawanan dengan ajaran agama Islam. Ketika ditanyakan tentang ritual budaya pada masa pratanam dan prapanen, memang, sejumlah petani padi maupun tebu cenderung menyatakan tidak pernah ada ritual khusus. Muh mengingat-ingat, terakhir kali ia menemukan petani di Ngajum yang melaksanakan ritual pratanam adalah semasa ia masih kecil.

Namun, sepanjang pengamatan di lapangan, masih tampak beberapa ritual yang menandai masa tanam dan masa panen. Ritual tersebut tidak harus selalu diartikan sebagai upacara adat, namun dapat berupa suatu kebiasaan lokal. Seperti di Jatiguwi, ritual penanda musim tanam adalah kebiasaan untuk makan bersama, baik petani penggarap, buruh, bahkan keluarga para pekerja lahan di tepi sawah. Makan bersama ini dilaksanakan di pagi hari pertama menanam bibit. Yang menyediakan makanan umumnya adalah pemilik/penggarap utama lahan. Pada hari tersebut pemilik/penggarap membawa makanan lengkap dengan peralatan makan.

Sesampainya di lahan, apabila semua pekerja sudah berkumpul makanan pun disediakan dan disantap bersama. Acara makan bersama ini, berlangsung layaknya *syukuran* kecil dan sederhana, sambil berharap bibit yang akan ditanam tumbuh dengan baik. Ritual ini juga menguatkan rasa kebersamaan antarpekerja lahan, sehingga ketika menanam pekerjaan dapat dilaksanakan dalam suasana akrab (pengamatan di Jatiguwi, Malang, 23 Februari 2011). Umumnya, penggarap menyediakan makan sebanyak dua kali, di pagi hari sebelum menanam bibit dan siang hari setelah pekerjaan harian selesai (sekitar pukul 11:30 atau memasuki waktu shalat Dzuhur). Sambil beristirahat setelah bekerja sejak pagi, para petani makan siang bersama, baru setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing.

Pada musim hujan, petani tembakau di Jatiguwi umumnya menanam padi, jagung, atau kacang hijau. Ketika menanam padi ini, selain berdoa kepada Tuhan ada pula petani yang meminta bantuan dari sumber kekuatan lain, yaitu "orang pintar", seseorang yang dikenal pandai mendoakan secara *kejawen.* Menurut Tu dan Kar, "orang pintar" diminta untuk membacakan doa di lahan padi yang akan segera dipanen. Doa dipanjatkan dengan tujuan agar padi terus dalam keadaan baik hingga saat panen, lalu proses panen dapat berjalan dengan lancar (pengamatan di Jatiguwi, 22 Februari 2011).

Selain didoakan oleh "orang pintar", dalam kepercayaan para petani ada syarat lain yang diperlukan agar semua berjalan lancar; pemilik sawah harus mempersiapkan sesaji dan meletakkannya di salah satu sudut sawah. Sesaji terdiri atas nasi dan berbagai lauk. Beberapa lauk yang harus disediakan, antara lain ayam bakar dan telur. Umumnya,



Makan bersama sebelum menanam bibit pertama kalinya



Mendoakan tanaman sebelum panen di sudut sawah dan menyajikan sesajen

prosedur yang berlaku adalah pemilik sawah menghubungi "orang pintar" dan memberitahu letak sawahnya. Pada hari yang dijanjikan, pemilik sawah terlebih dahulu meletakkan sesaji di sawah, kemudian "orang pintar" datang ke sawah dan berdoa di pinggirnya. "Orang pintar" berdoa sambil memegang padi, sehingga dari kejauhan terkesan sedang berbicara kepada padi (pengamatan di Jatiguwi, 22 Februari 2011). Pada saat padi sedang didoakan petani tidak perlu hadir menyaksikan "orang pintar" bekerja. Asalkan diberitahu lokasi lahan, "orang pintar" akan datang sendiri.

Dalam sebuah wawancara, seorang buruh tani bercerita bahwa dalam seminggu setidaknya ada 1-2 kali latihan tari Kuda Lumping[3] di depan rumah salah satu penduduk di desa ini. Untuk apa? Ia bercerita, di samping hajatan, di Desa Jatiguwi kerap diadakan pergelaran tari Kuda Lumping. Para penari perlu berlatih rutin karena setiap tanggal 1 Suro[4] petani berkumpul untuk acara *syukuran* yang diisi doa dan ditutup dengan acara kesenian, salah satunya tari Kuda Lumping. Tu dan rekan-rekannya (wawancara, 23

3 Tari Kuda Lumping adalah seni tari yang dimainkan dengan properti berupa kuda tiruan, yang terbuat dari anyaman bambu atau kepang. Tari Kuda Lumping merefleksikan semangat heroisme dan aspek kemiliteran sebuah pasukan berkuda atau kavaleri. Hal ini terlihat dari gerakan-gerakan ritmis, dinamis, dan agresif, melalui kibasan anyaman bambu, menirukan gerakan layaknya seekor kuda di tengah peperangan. Sering kali dalam pertunjukan tari Kuda Lumping, juga ditampilkan atraksi yang mempertontonkan kekuatan supranatural berbau magis, seperti atraksi mengunyah kaca, menyayat lengan dengan golok, membakar diri, berjalan di atas pecahan kaca, dan lain-lain. Mungkin, atraksi ini merefleksikan kekuatan supranatural yang pada jaman dahulu berkembang di lingkungan Kerajaan Jawa, dan merupakan aspek nonmiliter yang dipergunakan untuk melawan pasukan Belanda. Di Jawa Timur, seni ini akrab dengan masyarakat di beberapa daerah, seperti Malang, Nganjuk, Tulungagung, dan daerah-daerah lainnya. Tari ini biasanya ditampilkan pada event-event tertentu, seperti menyambut tamu kehormatan, dan sebagai ucapan syukur, atas hajat yang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selengkapnya lihat http://dunialain-laindunia.blogspot.com/2009/04/tari-kuda-lumping.html.

4 Hari pertama pada bulan pertama dalam sistem kalender Jawa.

Februari 2011) mengatakan, setiap tanggal 1 Suro Desa Jatiguwi ramai dan semarak. Petani-petani berkumpul. Sanak saudara mereka dari luar Jatiguwi pun berdatangan menghadiri acara *syukuran* tersebut. Inti dari acara tersebut adalah berterima kasih atas rezeki yang telah diberikan-Nya setahun ke belakang, dan memohon rezeki yang baik untuk setahun selanjutnya. Tentu saja, acara ini juga menguatkan *silahturahmi*.

Selain dalam bentuk-bentuk budaya konkret (perayaan, kebiasaan, tarian, dan sebagainya), di Malang terdapat pula tradisi perhitungan hari baik dan hari kurang baik untuk bertani. Dalam menentukan apakah hari tertentu merupakan hari baik atau tidak, masing-masing petani memiliki kepercayaannya sendiri. Bagi Ar, misalnya, ada jenis hari yang dianggap lebih baik untuk mulai menanam. Sedikit berbeda, Sd memiliki kepercayaan bahwa ada hari-hari yang sebaiknya dihindari untuk mulai menanam dan memanen tanaman.

> Orang tua saya tidak ada (meninggal) *pas* Sabtu Paing dan satunya Kamis Kliwon. *Pas* hari itu saya tidak mau menanam (dan) memanen. .... Kata orang tua zaman dulu, saat hari itu (hari orang tua meninggal) semua aktivitas apa saja disuruh berhenti, itu kata orang dulu, kalau sekarang hanya ikut-ikutan. (Wawancara dengan Sd, penggarap lahan tembakau, 24 Februari 2010)

Istri Sd, yang juga merupakan penduduk asli Jatiguwi, memilih mengikuti tradisi pemikiran turun-temurun terse-

but untuk keselamatan keluarganya. Pilihan tersebut dilakukannya berdasarkan pengalaman.

> Tapi ya itu kenyataan, memang, hari ini ya *ndak* boleh, Bapak saya *bilangi* tetap *ndak* mau, tetap *brujul* (membajak sawah) *pas* hari itu (hari orang tua meninggal), ya patah tangannya, jatuh di sawah, mesinnya (bajak) rusak. (Wawancara dengan istri Sd, 24 Februari 2011)

Bercermin pada pengalaman buruk tersebut, istri Sd untuk ke depan memilih untuk mengikuti kebiasaan yang sudah berjalan lama tersebut. Jika mengikuti kebiasaan maupun aturan budaya Jawa, ada banyak hari yang harus diperhitungkan ketika akan melaksanakan sesuatu. Ada hari-hari di mana kegiatan atau aktivitas besar sebaiknya tidak dilaksanakan. Ada pula hari-hari yang hanya memperbolehkan aktivitas rutin yang tidak terlalu penting sifatnya. Namun, Sd dan istrinya lebih memilih untuk mengambil hal yang cukup bisa diterima oleh logika saat ini. Kalau semua aturan diikuti akan merepotkan kegiatan harian mereka. Bagi mereka, tujuan akhir dari setiap kegiatan adalah memperoleh *ridho* ilahi. Menurut mereka, selama tetap mawas diri dan ingat kepada Tuhan, niscaya mereka akan selalu berada dalam perlindungan Tuhan.

RASIONALITAS BUDAYA PETANI PAMEKASAN

Sebagian besar masyarakat Pamekasan adalah warga *nahdliyyin* dengan laku agama yang konservatif. Oleh karena itu, wilayah ini jauh dari praktik-praktik budaya sinkretis Islam-Jawa sebagaimana yang telah kita lihat pada wilayah-wilayah sebelumnya. Simbol ke-NU-an sangat ditonjolkan. Peci selalu melekat di kepala lelaki, sementara jilbab dikenakan oleh hampir semua perempuan di Pamekasan. Tidak hanya laku warga saja yang kental nuansa keislamannya, ruang-ruang publik di Pamekasan penuh dengan hiasan bernuansa "syariah". Tulisan *asmaul husna* dan bacaan-bacaan dzikir, anjuran moral tentang narkoba, pelacuran, dan ketaatan beribadah melekat di tiap sudut kota. Mulai dari masa pratanam hingga pascapanen, baik untuk komoditas tembakau maupun komoditas garam, tidak ada ritual apa pun. Semua itu tampak dilakoni sebagai aktivitas pekerjaan semata.

Mhd, salah seorang narasumber, mengatakan bahwa petani tembakau di Pamekasan tidak mengenal ritual-ritual yang khusus diperuntukkan bagi penanaman maupun panen tembakau (wawancara dengan Mhd, 16 Februari 2011). Pandangan senada juga muncul dalam FGD kelompok tani tembakau yang diselenggarakan 22 Februari 2011. Salah seorang partisipan FGD itu mengatakan bahwa, *"Di sini tidak ada begitu-begituan (ritual), semua dijalani biasa saja."* Petani garam, sebagai perbandingannya, juga tidak memiliki ritual tertentu saat akan menanam hingga panen.

Namun, apakah ini berarti kebudayaan maupun pandangan hidup masyarakat setempat tidak pernah dipengaruhi

tembakau? Tidak juga. Keliru untuk mengatakan demikian. Acara-acara *syukuran*, yang diselenggarakan dalam hari-hari besar Islam, biasanya akan jauh lebih meriah bila diadakan saat seseorang berangkat dan pulang haji. Dan, aktivitas berhaji di wilayah-wilayah pertanian tembakau tidak akan pernah lepas dari panen tembakau.

6

Negara di Ladang Tembakau

Dari potret-potret yang telah kita lihat, petani tembakau, mata rantai pertama sekaligus yang sebenarnya paling penting, justru kerap yang paling ringkih dalam sektor pertembakauan. Penyebabnya beragam, mulai dari cuaca yang susah ditebak, lemahnya manajemen keuangan, modal terbatas, daya tawar rendah, dan sebagainya. Di antara aneka penyebab itu, minimnya kehadiran negara merupakan hal yang amat berpengaruh. Sialnya, sekali hadir, negara justru memaksakan regulasi pengendalian tembakau tanpa pernah mengindahkan kehidupan para petani.

Padahal, bila mengamati dengan seksama pertanian di negara-negara maju—yang secara salah kerap kita persepsikan menyerahkan semua proses perekonomiannya kepada pasar, biar pasar yang menentukan—kita akan menemukan perhatian negara yang begitu luar biasa terhadap para petaninya. Amerika Serikat (AS), yang dirujuk sebagai negara yang menjunjung pasar bebas, pada tahun 2006 menggelontorkan anggaran sebesar 20 miliar dolar untuk "stabilisasi pendapatan pertanian" yang diberikan dalam bentuk subsidi langsung. Pada tahun 2000, bahkan sebesar

47% pendapatan sektor pertanian di AS berasal dari subsidi negara ("Farm Subsidies Over Time"). Uni Eropa pada tahun 2010 lalu tercatat mengeluarkan anggaran sebesar 57 miliar euro untuk pengembangan sektor pertaniannya (http://eur-lex.europa.eu/budget/data/D2010_VOL4/EN/nmc-titleN123A5/index.html).

Membandingkan jumlah subsidi pertanian di Indonesia dengan negara-negara maju tersebut secara langsung tentu saja tidak adil. Oleh karena itu, kita perlu melihat data berikut. Menurut studi Bank Dunia, sebagaimana dikutip Koran Tempo, anggaran pertanian Indonesia dalam rentang 1990-2005 paling terpangkas drastis dibandingkan negara-negara lainnya, dari 8,1% PDB menjadi tinggal 2% PDB. Bandingkan dengan Malaysia yang pada 2005 anggaran pertaniannya masih mencakup 5% PDB, Burma 8,5%, dan Thailand 4,8% (*Koran Tempo*, 1 Juli 2009). Tapi data yang sudah sangat memprihatinkan ini pun, bahkan tidak cukup untuk menggambarkan perlakuan negara terhadap petani di lapangan. Petani dibiarkan lepas, tanpa perlindungan dan proteksi apa pun, padahal mereka terjerat dalam perniagaan komoditas yang tumbuh di atas tanahnya sendiri. Tenaga dan energi petani yang terkuras di atas lahannya tidak pernah kembali kepada dirinya sendiri, hanya akan dinikmati oleh pihak-pihak lain.

Bab ini akan memperlihatkan bagaimana petani tembakau tercerabut dari hak-hak sosial-ekonominya karena kurangnya perhatian negara. Bahkan, secara sistematis, kebijakan-kebijakan yang dilansir cenderung menyudutkan para petani. Akan tetapi, kita akan mengidentifikasi persoalan ini dengan teliti, mengupas bahwa negara mencakup aktor-aktor berbeda yang masing-masing memiliki tingkat

perhatian tersendiri kepada petani. Di samping kebijakan di tingkat pusat yang membredeli petani, di lapangan kita bisa menjumpai upaya pemerintah daerah untuk membantu pertanian tembakau; tidak sinkron dan terkadang terasa berhadap-hadapan dengan pusat.

Disayangkan, pada berbagai kasus, bantuan ini hanya penunaian kewajiban pemerintah semata, tidak berangkat dari kondisi dan kesulitan riil petani. Disayangkan juga, kendati perhatian dari sejumlah instansi negara ada, petani tembakau tetap berada pada situasi yang kalut. Sejauh ini, upaya pemerintah daerah atau instansi tertentu dalam membantu petani masih terlihat seadanya bila dibandingkan dengan ancaman yang mengintai petani dari kebijakan pengendalian tembakau pemerintah pusat.

Dengan semua kondisi yang akan dipaparkan berikut ini, tak mengherankan jika kemudian orang-orang kecil yang tak bisa memperoleh hasil buminya sendiri itu lantas mencurigai adanya konspirasi di tingkat negara demi kepentingan segelintir elite. Meski pandangan mereka belum teruji dan tentunya tidak sepenuhnya benar, tetapi apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan hanya membuktikan jauhnya perhatian negara dari detak jantung perekonomian negerinya sendiri—pernyataan ini sama sekali tidak berlebihan. Sebagian besar penduduk Indonesia, ingat, adalah petani.

PERLAWANAN PETANI DAN PENGUSAHA

Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan sektor pertanian tidak terlalu banyak, kecuali hanya melak-

sanakan apa yang sudah menjadi kebijakan tingkat pusat. Meskipun Kabupaten Sumedang merupakan pasar regional tembakau terbesar di Jawa Barat atau penghasil tembakau terbesar kedua setelah Garut, tetapi tembakau khas Kabupaten Sumedang, tembakau *mole*, masih belum menjadi komoditas produk unggulan. Dalam mengembangkan sektor pertanian, pemerintah daerah pun baru sebatas memberikan bantuan peralatan untuk proses pengolahan tembakau berupa mesin perajangan, alat pengasapan, pisau potong manual, dan kompresor yang dananya tak lain berasal dari DBHCHT.

Menanggapi kebijakan pembatasan produksi tembakau dengan tar nikotin rendah, Dishutbun tampak sedang menjajaki kemungkinan pengalihan ke komoditas lain seperti peternakan dan perikanan. Ide pengalihan ini berasal dari usulan APTI Kabupaten Sumedang, dan secara khusus dengan mempertimbangkan bahwa di Jatigede akan dibuat waduk terbesar se-Asia. Jika kebijakan pembatasan produksi tembakau diberlakukan, APTI mengklaim bahwa para petani kemungkinan akan beralih ke peternakan dan perikanan. Alasannya, selain karena tidak adanya lahan, kedua bidang ini juga lebih sesuai dengan lokasi yang ada.

Berikut adalah runutan kebijakan pemerintah setempat terhadap tembakau dengan perbandingan kebijakannya terhadap padi.

Tabel 6.1.
Kebijakan Pemerintah terhadap Petani Tembakau dan Padi di Sumedang

Aspek program/ kebijakan	Program pemerintah	
	Petani padi	Petani tembakau
Program/kebijakan	SLPTT (Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu) untuk padi hibrida dan nonhibrida	Bantuan peralatan untuk peningkatan produktivitas tembakau
Sumber pendanaan	APBD	DBHCHT
Dinas yang bertanggung jawab	Dishutbun	Dishutbun, Disperindag
Bentuk	Bantuan pupuk, obat-obatan, dan benih	Bantuan alat-alat:: pisau potong, mesin perajangan, mesin pengasapan, kompresor
Respons petani	Cukup membantu dan bisa dipergunakan, meski terkadang merugi akibat gagal panen karena hama	Belum bisa dipergunakan; waktunya tidak dilakukan pada musim panen; hanya diberikan kepada 4 kelompok tani; tidak sesuai dengan kondisi lokasi

Sumber: diolah dari data sekunder, hasil wawancara dan FGD 27 Februari 2011.

Tetapi, ada pula sebagian petani lain yang menyatakan akan tetap menanam tembakau selama masih ada permintaan atau ada yang membelinya (wawancara dengan And, 17 Februari 2011). Lebih miris lagi ketika kita mendengar suara dari pihak pengelola hasil industri tembakau. Mereka menyatakan tidak tahu harus berbuat apa karena selama ini tembakau sudah menjadi mata pencaharian hidupnya.

> Jadi, kalau mau dialihkan, terus pengolah dan pengusaha akan mengolah apa? Di Kabupaten Sumedang sendiri ada 138 pengusaha rokok dan sudah ada 8 usaha rokok yang bangkrut. (Wawancara dengan ketua APTI Jawa Barat, 25 Februari 2011)

Kalangan asosiasi (APTI, APTN, dan AMTI) yang tidak setuju dengan kebijakan larangan tersebut berupaya melakukan perlawanan dengan melakukan demonstrasi di Senayan, Jakarta; dan Senayan sama sekali tidak memberikan respons yang konkret.

Kalangan petani tembakau menolak argumentasi bahwa tembakau merupakan biang penyakit. Menurut Ujr (wawancara, 26 Februari 2011), di Tanjungsari ada orang yang merokok sejak usia 20 tahun, dan hingga sekarang usianya 111 tahun, ia tidak mengalami sakit. Bahkan, orang-orang yang bekerja di pengolahan tembakau juga tidak ada yang sampai masuk rumah sakit besar di Bandung. Justru, menurutnya, mereka yang sering sakit adalah orang-orang kaya dengan gaya hidup tinggi. Jadi, dalam pandangan Ujr tembakau bukan penyebab dari persoalan kesehatan manusia. Kalaupun ada petani tembakau yang sakit, maka cukup berobat ke rumah sakit biasa, tidak harus dirawat sampai berminggu-minggu bahkan menghabiskan uang hasil panen tembakau.

Tabel 6.2.
Respons Para Pihak dalam Pertanian Tembakau di Sumedang terhadap Kebijakan Pengendalian Tembakau

Pihak	Respons
Petani dan buruh tani	Bersikap pasrah atas apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, tetapi selama masih ada yang mencari dan membeli, akan terus menanam tembakau. Kalaupun hendak dialihkan ke tanaman lain, petani tembakau lebih memilih beralih ke pertanian dan peternakan
Pengolah hasil	Bersikap pasrah, karena selama ini usaha tembakau cukup membantu perekonomian keluarga
Pedagang	Beralih ke bisnis perdagangan lain
Asosiasi (APTI-APTN)	Menolak dan akan terus melawan dengan berbagai cara

Sumber: diolah dari hasil wawancara dan FGD 27 Februari 2011.

DILEMA PETANI DEMAK

Ada yang menarik di Kabupaten Demak. Menyadari bahwa banyak warganya gemar bertanam tembakau, beberapa tahun terakhir ini pemerintah Kabupaten Demak, khususnya di Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen, mengundang para perwakilan perusahaan rokok untuk bertemu dengan perangkat desa. Dalam pertemuan tersebut juga hadir perwakilan dari Asosiasi Petani Tembakau dan Distan Kabupaten Demak. Lantas, di antara mereka dibicarakanlah berapa ton kebutuhan tembakau perusahaan rokok-perusahaan rokok tersebut. Kebutuhan itu lantas disesuaikan dengan luasnya lahan yang perlu ditanami (wawancara dengan Nr, 22 Februari 2011).

Setelah pertemuan itu, para kepala desa lantas memberi informasi kepada petani bahwa gudang pabrik rokok di Mranggen dan Karangawen hanya membutuhkan sekian ton (untuk tahun ini sekitar 1.500 ton) dengan asumsi hanya membutuhkan lahan sekian hektar. Sayang, informasi ini tidak lantas ditindaklanjuti. Petani dibiarkan saja bertanam sendiri tanpa arahan lebih lanjut.

Tinggi-rendahnya harga tembakau juga amat ditentukan oleh cuaca sehingga bertanam tembakau dilihat masih sangat berisiko. Bupati setempat menganjurkan supaya petani mulai beralih ke tanaman nontembakau, atau malah tidak menanam tembakau. Namun, pemerintah daerah belum menentukan kebijakan tembakau secara khusus dalam bentuk Perda, hanya anjuran untuk menghindari jatuh-bangunnya bertanam tembakau. Padahal, ada kultur yang sangat kuat di Mranggen dan Karangawen bahwa menanam tembakau erat hubungannya dengan keteraturan sosial. Tidak

bertanam tembakau akan dianggap menyimpang. Di Desa Sumberjo, misalnya, petani akan merasa malu jika tidak bertanam tembakau. Apalagi bila tembakau kemudian laris, ia akan semakin menyesal dan kecewa. Biasanya dalam pertemuan antarsesama petani di desa ini, ketika musim tembakau, hal yang paling sering dibicarakan adalah perkembangan tembakau setiap harinya. Biasanya yang tidak bertanam tembakau akan kehilangan sumber pembicaraan. *"Kalau tidak tanam, ya, nggak bisa cerita. Lalu biasanya menyingkir saja,"* (wawancara dengan Mnj, 18 Februari 2011).

Tabel 6.3.
Kebijakan/Program Pemerintah dalam Sektor Pertanian Tembakau dan Nontembakau di Kabupaten Demak

Kebijakan/ program	Dasar kebijakan	Realisasi	Respons
Bantuan langsung benih unggul jagung dan padi	Peraturan Menteri Pertanian No 72/Permentan/ OT.140/11/2007 tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2007	Nilainya sekitar Rp 4,3 miliar	Banyak petani menerima bantuan benih ini dan hasilnya cukup bagus. Namun, untuk dijadikan bibit sendiri, hasilnya justru menurun
Anjuran bupati untuk tanam jagung	Tidak stabilnya harga tembakau	Dinas pertanian mengadakan penyuluhan peningkatan kualitas tanaman jagung	Ada petani yang mengikuti anjuran tersebut, namun petani di wilayah yang telah lama bertanam tembakau akan sulit beralih ke tanaman nontembakau
Pertemuan aparat desa dengan perwakilan pabrik rokok	Petani merasa jauh dari pabrikan	Diadakan pertemuan dengan pabrikan yang dihadiri kepala desa se-Mranggen dan Karangawen	Petani belum kompak untuk membatasi luasnya lahan yang ditanami tembakau. Akibatnya, jika hasil tanaman membludak, harga otomatis jatuh

Sumber: diolah dari hasil wawancara.

Dari informasi yang diperoleh, Kabupaten Demak mendapatkan kucuran dana dari cukai tembakau sebesar Rp 6 miliar untuk tahun 2010 kemarin. Oleh pemerintah daerah, dana ini lalu dialokasikan untuk membantu petani tembakau. Namun, dana itu sejauh ini belum dirasakan pengaruhnya oleh petani. Bantuan dari pemerintah daerah setempat yang dirasakan petani hanyalah peralatan sederhana seperti mesin perajangan tembakau dan sabit perajangan konvensional (wawancara dengan Nim, 23 Februari 2011).

Menarik untuk dicatat, petani menganggap sejumlah fatwa maupun regulasi rokok yang mengarah pada pembatasan tembakau tidak akan berpengaruh bagi wilayah ini. Alasan yang dikemukakan sangat sederhana. Menurut mereka, selama gudang pabrik rokok masih ada di wilayah mereka, pertanian tembakau tidak mungkin dihentikan.

> Larangan atau pembatasan itu tidak berpengaruh bagi petani di sini. Selama gudangnya Djarum dan Gudang Garam masih ada dan masih buka, *(petani di sini, pen.)* tetap tanam terus, tidak ada urusan dengan dunia sana. Lagipula, soal larangan itu *kan* adanya sudah sejak lama. (Wawancara dengan Msr, aparat Banyumeneng, 16 Februari 2011)

Sebagian petani berharap, pemerintah seharusnya turun tangan pada saat harga tembakau jatuh. Sejauh ini, pemerintah daerah sama sekali tidak turut campur dalam urusan harga. Seperti diakui oleh PPL, pemerintah hanya membina supaya tanaman dapat berproduksi maksimal, namun tidak ikut berperan dalam menentukan harga jual. Dinas Perdagangan daerah pun tidak bisa mengintervensi harga.

Padahal rantai niaga pertembakauan sangat menghimpit petani; dari petani, diterima tengkulak, dan dimasukkan ke gudang pabrik. Komoditas tembakau berbeda dengan komoditas nontembakau yang penjualannya bisa dilakukan secara bebas. Tembakau harus disalurkan ke gudang pabrik, sebab di sanalah tembakau itu akan tetap terjaga mutunya, atau malah lebih bagus setelah disimpan sekian lama (wawancara dengan Sn, PPL Mranggen, 16 Februari 2011).

Malah, sejumlah petani memaklumi sulitnya posisi pemerintah dalam menyikapi kontroversi tembakau. Di antara instansi-instansi pemerintah sendiri masih belum ada sinkronisasi kebijakan, seperti dituturkan oleh S (wawancara, 23 Februari 2011) yang juga aktif dalam organisasi APTI Cabang Demak.

> Pemerintah masih setengah-setengah dalam soal tembakau. Tembakau ini dihentikan apa dilanjutkan. Kalau dihilangkan, pemerintah kehilangan dana Rp 55 triliun dari cukai tembakau setiap tahunnya. Begitu juga pemerintah harus memikirkan bagaimana mengalihkan kerja 30 juta orang yang menggantungkan pada tembakau, mulai dari petani, pedagang, sampai pabrikan. Saya sendiri bingung dengan pemerintah, suatu saat Departemen Kesehatan menolak tembakau, namun Dinas Pertanian melakukan pembinaan agar tembakau tetap ditanam. Pemerintah sendiri di sini tidak terlihat sinkron.

Dari pengakuan sejumlah petani, mereka berniat untuk terus bertanam tembakau. Meski di sana-sini muncul pertentangan, menurut mereka hal itu hanyalah lagu lama.

Persoalan riil yang dihadapi petani saat ini adalah minimnya kehadiran negara dalam memberikan daya tawar kepada mereka dalam keseluruhan proses pertanian tembakau, dari hulu ke hilir, dari pratanam, tanam, panen, pascapanen hingga perniagaan. Persoalan riil ini justru sama sekali tidak tersentuh.

DARI UNJUK RASA HINGGA PANGGUNG DOA

Kondisi ekonomi Temanggung yang amat bergantung pada tembakau tampaknya membuat perhatian pemerintah setempat terhadap komoditas ini relatif berbeda dengan wilayah lainnya. Pemerintah setempat berusaha membantu pertanian tembakau dengan upaya *on farm* seperti intensifikasi usaha tani yang dilakukan dengan pola tumpangsari/diversifikasi. Seiring kian menyempitnya lahan pertanian, ini adalah upaya yang relevan untuk meningkatkan pendapatan petani. Pemerintah daerah juga mendorong petani untuk mengerjakan lahannya dengan *tenanan,* sungguh-sungguh, agar hasil yang diperoleh meningkat, selain menerapkan *entrepreneurship* dalam pertanian yang melibatkan perhitungan cermat dalam menghadapi berbagai risiko, serta sigap dalam menangkap peluang dan berani untuk berubah.

Pada level *off farm,* pemerintah berfokus pada bantuan pengolahan hasil-hasil pertanian. Untuk pertanian kopi, contohnya, pemerintah memberikan bantuan alat pengolahan kopi di daerah Gesing. Untuk pertanian tembakau, pemerintah juga membagikan alat perajang tembakau, meskipun hanya kepada beberapa kelompok tani. Di samping

itu, pemerintah juga membantu penyediaan sarana produksi pertanian seperti pupuk, benih, alat, dan mesin pertanian.

Namun, tidak semua merasakan bantuan pemerintah dalam bentuk sarana produksi pertanian ini. By, petani yang juga pedagang dari Cepit, malah mengeluh dengan pedas, *"(Bantuan) sarana pertanian seperti apa kok kayaknya tidak ada, paling (bantuannya) jalan usaha tani."* By menambahkan:

> Untuk perawatan tidak ada bantuan, petani tembakau itu swadaya semua, apalagi saat panen, untuk memperjuangkan harga biar tinggi saja tidak mau, malah pernah meminta pajak, retribusi sebesar Rp 2.000,00 untuk setiap *kenthung* (keranjang).

Memang, ada program bantuan benih bagi kelompok tani. Namun, dari pengamatan lapangan, hanya sebagian petani yang mendapatkannya. Jalan menuju areal pertanian, yang juga mendapat anggaran dari pemerintah daerah, pada kenyataannya belum menjangkau semua lahan. Selama ini, misalnya, *saking* rusaknya jalan menuju areal pertanian kopi, petani kopi di Gesing harus menggunakan motor *trail* untuk mencapai lahannya. Apabila menggunakan mobil biasanya roda mobil dirantai untuk memperkuat cengkraman roda pada jalan (St, petani kopi, dalam FGD, 26 Februari 2011).

Kondisi jalan yang rusak ini membuat biaya produksi, baik pada komoditas kopi maupun tembakau, menjadi tinggi. Beberapa daerah yang telah diperbaiki jalanannya menunjukkan indikasi penurunan biaya produksi yang signifikan. Untuk mengangkut pupuk kandang ke ladang,

misalnya, biaya angkutnya bisa berkurang hingga 50% (FGD, 26 Februari 2011). Padahal, selain dari anggaran rutin APBD, sektor pertanian juga mendapat insentif dari DBHCHT, yang pada 2010 direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung lewat anggaran Rp 13,1 miliar untuk peningkatan kualitas bahan baku dengan bibit, pembangunan jalan, pengadaan alat ekstraksi tembakau dan pemurni nikotin, intensifikasi dan rehabilitasi tanaman cengkeh, pengembangan model usaha tani partisipatif, penanganan panen dan pascapanen, pemfasilitasan kelompok tani, optimalisasi tanaman di lahan tembakau, SLPHT tembakau, dan pengembangan kawasan agropolitan (Bagian Perekonomian Setda Temanggung).

Tabel 6.4.
Penerimaan DBHCHT Kabupaten Temanggung

Tahun	Alokasi insentif
2008	Rp 785.456.624,00
2009	Rp 9.994.550.476,00
2010	Rp 14.894.592.909,00
2011	Rp 11.691.928.559,00

Sumber: Bagian Ekonomi Setda Temanggung.

Sehubungan dengan semakin panasnya isu pengendalian tembakau yang digulirkan pemerintah pusat, pemerintah daerah Temanggung mempersiapkan beberapa langkah. Di antaranya dengan mempelajari pengolahan dan pemurnian tembakau menjadi nikotin cair. Dengan menggandeng akademisi, pemerintah berusaha mencari potensi dan prospek ekonominya; nikotin cair ini bisa digunakan untuk campuran obat maupun untuk minuman suplemen, dan sisa am-

pasnya masih bisa digunakan untuk rokok rendah nikotin seperti *shisha* Timur Tengah yang populer itu.

Namun, ketika pemerintah daerah mendorong petani untuk melakukan diversifikasi serta intensifikasi pertanian, bagaikan menyiram minyak ke api, para petani tembakau tersulut emosinya. Buletin Kementerian Pertanian sempat menulis agenda diversifikasi ini sebagai alih tanam, dan ini berkembang hingga menjadi isu tembakau akan dialihtanamkan dengan tanaman kopi oleh pemerintah Provinsi Jateng. Padahal, pola Tlahap, yang dijadikan pola percontohan untuk alih tanam ini, merupakan pola tanam tumpangsari. Ketua kelompok tani di Tlahap, Thr, mengakui pola Tlahap bukan untuk menggantikan tembakau, namun ditanam tumpangsari dengan kopi agar ada penghasilan tambahan. Panen kopi biasa dilakukan pada bulan Juni-Juli, sehingga bisa menutupi kebutuhan besar seperti biaya sekolah anak. Thr menunjukkan buletin terbitan Kementrian Pertanian yang salah mempersepsikan pola Tlahap sebagai subtitusi tanaman tembakau. Menurut Thr, petani lain cenderung kurang bisa menerima bila tembakau diganti tanaman lain. Petani Tlahap yang dikira mengembangkan pola subtitusi mendapat pandangan sinis dari petani lainnya, bahkan cenderung dimusuhi. Padahal, pada intinya pola Tlahap bukan subtitusi tembakau karena petani tetap menanam tembakau.

Di Tlilir malah sudah banyak tanaman kopi yang didongkel (dibongkar) oleh petani. Petani khawatir tanaman kopi akan dimanfaatkan sebagai subtitusi tembakau, di samping kopi yang ditanam di pinggir lahan menutupi sinar matahari tanaman tembakaunya. Petani belum menerima pengalihan tanaman tembakau ke komoditas lain.

Nilai ekonomi tanaman yang baru, menurut pengakuan para petani, belum tentu setinggi nilai ekonomi tembakau, di samping juga belum terujinya komoditas pengganti tersebut pada lahan setempat saat musim kemarau. Menurut Nrh (wawancara, 20 Februari 2011):

> Tidak ada tanaman semusim yang mampu bertahan pada musim kemarau, kopi saja garing. Kopi *kan* tanaman tahunan, daunnya rontok, tanaman semusim yang mampu hidup di musim kemarau itu tidak ada, tanaman yang menguntungkan tidak ada yang hidup.

Btk, petani tembakau (wawancara berkelompok, 21 Februari 2011), juga menyampaikan, *"Di sini itu alamnya tidak mendukung kalau mau ditanami selain tembakau."* Hal ini juga dibenarkan Wld, petani tembakau (wawancara berkelompok, 21 Februari 2011), *"Pernah di sini kemarau panjang, tanaman hancur. Bambu saja mati. Kalau tembakau masih bertahan hidup. Itu kelebihan tembakau."* Dan menurut Bayu, petani tembakau yang juga pedagang (wawancara berkelompok, 21 Februari 2011), *"Tembakau itu kalau sudah besar, ada panas terik itu seperti alum (layu), tapi sore sebelum matahari tenggelam dia segar lagi."*

Ditetapkannya tembakau sebagai zat adiktif dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sangat meresahkan petani tembakau di Temanggung. Nrh, petani tembakau dari Tlilir (wawancara, 20 Februari 2011), menyampaikan pandangannya dengan satir, "*Karepe* (DPR) *mbako arep dipateni, nek mbako dipateni wong Tlilir yo mati tenan.*"

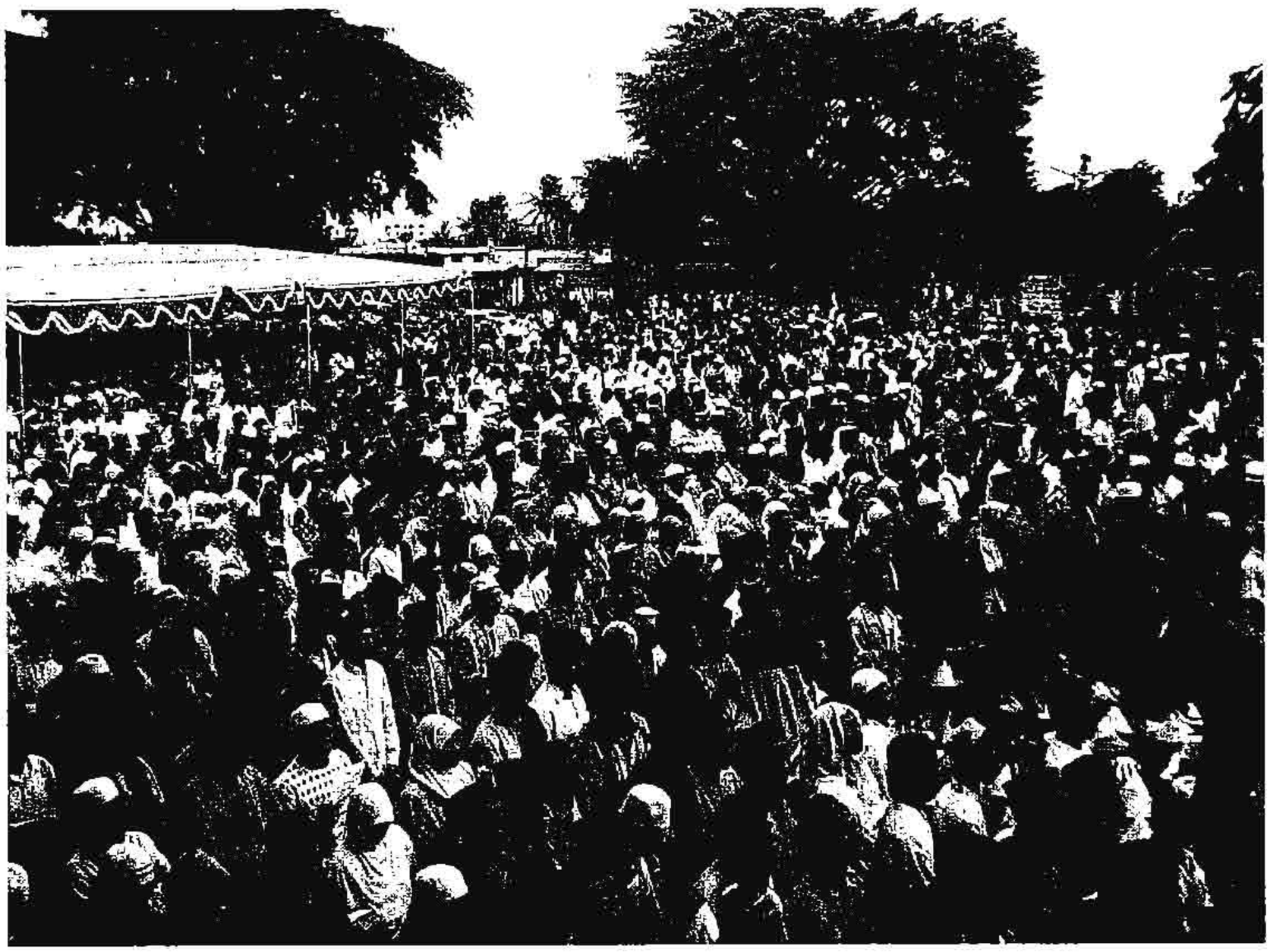
[Inginnya (DPR) tembakau dimatikan, kalau tembakau dimatikan orang Tlilir benar-benar mati].

Dua orang dari Temanggung bahkan melayangkan *judicial review* atas nama pribadi kepada Mahkamah Konstitusi untuk UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Petani juga melakukan demonstrasi sampai ke Jakarta. *"Menurut saya dengan adanya RPP Tembakau jangan sampai tembakau itu musnah,"* ujar Sarip. Bila tidak, petani akan habis karenanya. Masyarakat pertembakauan mengorganisasi diri dalam wadah APTI untuk menghadang gerakan antitembakau. Terhadap skema pengendalian tembakau dan fatwa haram rokok dari pusat yang akan menghabisi perekonomian tembakau ini, nyaris seluruh elemen warga Temanggung satu suara; jajaran pemerintahan lokal, politisi, juragan tembakau, ulama setempat, dan petani, seiya-sekata dalam memperjuangkan tembakau.

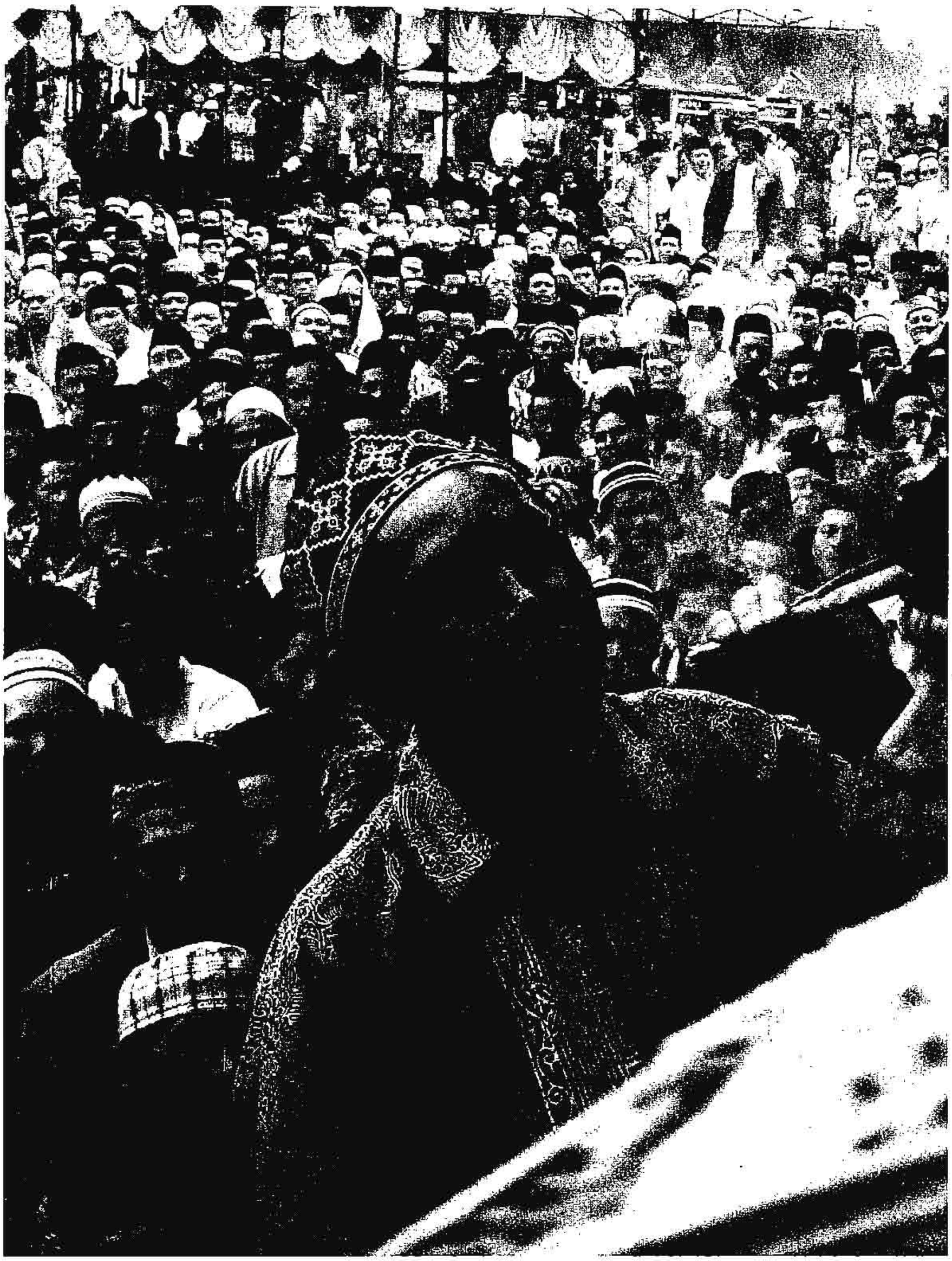
Ulama Temanggung dan sekitarnya juga terpanggil untuk menunjukkan keberpihakannya kepada petani. Ulama dari Nahdlatul Ulama (NU), meskipun tidak mengatasnamakan organisasi NU, mengadakan *istighosah* akbar untuk menunjukkan keberpihakannya pada petani. Dua kali pertemuan akbar di alun-alun untuk menunjukkan aspirasi masyarakat pertembakauan selalu dipenuhi massa, bahkan membludak. Pertemuan akbar pertama dalam bentuk orasi dan hiburan diselenggarakan oleh masyarakat pertembakauan yang dimotori APTI. Pertemuan kedua yang digagas oleh para ulama dalam bentuk *istighosah* juga mendatangkan massa yang meluber. Bahkan, penyelenggaraan doa bersama ini direplikasi di daerah lain seperti Malang, Kudus, Magelang, dan lainnya. Dan, sepantasnya sebuah gerakan perlawanan total, pertemuan-pertemuan ini dihadiri elemen



Grebeg petani tembakau Nglamuk menolak pengendalian tembakau (foto: syukron)



Suasana istighosah akbar umat peduli tembakau (foto: syukron)



Seorang bapak memperlihatkan ekspresi menikmati tembakau dalam istighosah akbar umat peduli tembakau (foto: Syukron)

jajaran pemerintah daerah, politisi, ulama, pedagang tembakau, dan petani tembakau.

MENANTI KEBIJAKAN YANG TEPAT

Di Malang, sebagaimana di daerah lain, negara memberikan penyuluhan kepada petani lewat PPL, mantri tani, dan petugas pengendali hama (PPH). Tetapi, bagi sebagian petani tembakau, PPL dan PPH hanya terasa sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintah. Tidak lebih. Mereka melakukan kunjungan tiga bulan sekali dan sesekali memberi penyuluhan. Adapun bagi petani tebu, PPL tidak terlalu terlihat fungsinya karena tertutup oleh peran penyuluh dari kemitraan pabrik gula.

> Kami sesama petani suka saling *rembug*, kadang kalau *mbako* ada yang beda suka saling tanya. Pernah satu kali *mbako* saya daunnya *mlungker-mlungker*, lalu saya konsultasi dengan PPL, ternyata katanya pupuk yang saya pakai sudah kadaluarsa. (Wawancara dengan Tu, buruh tani tembakau, 23 Februari 2011).

Selain kehadiran para petugas ini, kebijakan pemerintah yang cukup dirasakan adalah himbauan untuk membentuk kelompok tani. Dengan berdirinya kelompok-kelompok tani pemerintah memiliki kejelasan dalam melakukan distribusi bantuan pertanian. Namun, pada praktiknya sulit untuk memberdayakan kelompok tani. Kesadaran untuk berhimpun di antara para petani di Kabupaten Malang masih rendah (wawancara dengan Ketua LPP NU Malang, 18 Fe-

bruari 2011). Di antara ketiga kategori petani yang diteliti, hanya petani padi yang memiliki kelompok tani yang baik secara struktur dan fungsi. Dengan demikian petani padi ini pulalah yang dapat merasakan kebijakan pemerintah seperti subsidi pupuk. Untuk petani tembakau dan tebu, karena secara umum kelompok taninya kurang berjalan, kebijakan pemerintah tidak sampai secara langsung, namun melalui informasi dari PPL dan PPH.

Tidak sedikit juga petani yang tidak terlalu merasakan manfaat kebijakan pemerintah. Beberapa petani mengakui bahwa keberadaan PPL cukup membantu dalam memberikan pengetahuan tentang komoditas yang mereka tanam (wawancara dengan Mm, 15 Februari 2011; Tu, 23 Februari 2011), namun sebagian menganggap keberadaan PPL hanyalah sebatas formalitas, sebagai aparat negara yang berkunjung dan melihat-lihat lahan mereka satu kali dalam tiga bulan. Kebijakan yang cukup memberi pengaruh adalah kebijakan pupuk bagi petani padi. Sejak terbentuknya kelompok tani, penghasilan petani cenderung meningkat. Pengetahuan-pengetahuan bermanfaat didiseminasikan lewat kelompok tani, contohnya bagaimana menimbang gabah. Dengan menjemur sendiri dan kemudian menimbang gabah sebelum digiling, akan ada peningkatan harga hasil panen. Sebelumnya, karena tidak paham proses penimbangan dan penggilingan, petani lebih suka menjual gabah kepada tengkulak, yang seringkali menghitung padi dihitung di bawah harga pasar (wawancara dengan Mm, 15 Februari 2011).

> Sebenarnya ada banyak program bantuan dari pemerintah yang ditujukan pada petani. Hanya saja belum merata pembagiannya karena ada syarat, bantuan

hanya diberikan kepada kelompok tani. Apabila kelompok taninya bagus, biasanya mudah sekali dapat bantuan dari pemerintah. (Wawancara dengan Mm, pemilik lahan padi, dalam FGD, 21 Februari 2011).

Respons petani terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah cukup beragam. Pada intinya, selama kebijakan pemerintah tidak merugikan, para petani akan merespon dengan baik. Seperti halnya kebijakan pupuk subsidi, petani menyambut dengan baik karena kebijakan ini meringankan modal untuk menanam padi. Selain itu, pemerintah memberikan bantuan mesin perajangan tembakau.

> Baru beberapa hari lalu ada bantuan dari pemerintah berupa pupuk organik, harganya Rp 10.000,00/kuintal. Sebelum dibantu, pupuk organik harganya Rp 170.000,00/kuintal. Lalu ada bantuan mesin *brujul mbako*, mesin pemotong tembakau. Sekarang mesin itu ada di rumah Pak Puji (ketua kelompok tani di Jatiguwi). (Tu dalam FGD, 21 Februari 2010)

Namun, kelompok tani masih berpikir lebih lanjut untuk memakainya karena mesin tersebut memakan listrik cukup besar, 900 watt (Tu dalam FGD di Jatiguwi, 21 Februari 2011)..

Selang beberapa waktu, pupuk-pupuk yang didistribusikan mulai berubah sistemnya. Biasanya petani bisa membeli pupuk mana saja yang diperlukan. Dalam beberapa bulan terakhir, petani diwajibkan untuk membeli pupuk dalam bentuk paket-paket. Membeli pupuk dalam bentuk paket merugikan petani, karena ada pupuk-pupuk yang

tidak diperlukan. Sebagai bentuk reaksi atas perubahan ini, banyak petani yang memilih untuk tidak mengambil pupuk sama sekali (wawancara dengan Mm, 26 Februari 2011). Jika hal ini terus berlanjut, lama-lama petani tidak mau membeli pupuk subsidi lagi. Selain itu, dalam kebijakan subsidi pupuk, ada kesenjangan informasi di antara para petani. Sesudah enam bulan petani padi mendapatkan pupuk bersubsidi, para petani tembakau baru mulai bisa mendapatkannya.

Tabel 6.5.
Peran Pemerintah dalam Pertanian Tembakau, Padi, dan Tebu di Malang

Kegiatan	Tembakau	Padi	Tebu
Pratanam	Pasca keluarnya UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Distan melalui PPL memberikan anjuran untuk menanam tembakau dengan kadar nikotin rendah	Memberi informasi bibit padi yang sedang banyak dikembangkan	Peran pemerintah digantikan oleh petugas dari pabrik gula sebagai mitra
Pembinaan (masa tanam)	Penyuluhan tentang pupuk dan penanggulangan hama	Bersama PPL dan PPH melakukan kegiatan pemberantasan hama, terutama tikusMenerima distribusi pupuk subsidi secara periodik	PPL memberi penyuluhan tentang pemanfaatan pupuk organik
Pascapanen	Distan memberi bantuan teknis berupa informasi alat perajang, pemanfaatan oven, teknik preservasi tembakau Dinas pertanian membantu mencarikan mitra untuk menjual tembakau	PPL memberikan petunjuk teknis penimbangan gabah yang tepat, sehingga petani dapat memiliki posisi tawar yang baik terhadap pasar	Peran pemerintah digantikan oleh petugas dari pabrik gula sebagai mitra

Sumber: diolah dari hasil wawancara.

Menurut beberapa narasumber yang diwawancarai, seharusnya pemerintah tidak mengambil kebijakan-kebijakan yang membuat jatuh harga komoditas. Misalnya, memberikan bea masuk 0% bagi beras impor di saat panen raya dalam negeri, sehingga beras lokal jatuh harga jualnya. Mm mengalaminya, ketika sebelum panen raya harga beras umumnya Rp 6.600,00/kg, lalu dengan kebijakan impor beras di musim panen raya harga berasnya menjadi Rp 5.500,00/kg. Petani tembakau pun dibiarkan begitu saja saat gagal panen atau surplus produksi tembakau, dan harga tembakau turun drastis. Negara sama-sekali tak hadir untuk membantu.

Menghadapi regulasi negara yang memasukkan tembakau sebagai zat adiktif, para petani tembakau bergeming saja. Ditanyai tentang aspek kesehatan, para petani menjawab merokok adalah pilihan pribadi. Mereka siap menanggung risikonya. Ada satu respon yang mewakili isi pikiran para petani Malang:

> Selama masih fatwa MUI yang melarang merokok kami tidak terlalu ambil pusing, karena tidak jelas juga dasar yang menjadikan rokok haram. Tetapi kalau yang melarang adalah Kiai dari NU, mungkin kami akan berhenti merokok. (Wawancara dengan Ar, 20 Februari 2011)

Intinya, selama organisasi keagamaan tempat para petani itu "berpayung", yang memahami arti penting tembakau bagi masyarakat setempat, tidak mempermasalahkan rokok, mereka tentu saja tidak merasa harus berhenti merokok atau menanam tembakau.

Bagi para petani, merokok jauh dari citra merusak kesehatan ataupun haram. Merokok merupakan simbol solidaritas dan identitas mereka. Jelas saja, nafas kehidupan mereka disangga oleh tanaman ini. Selama organisasi keagamaan di mana mereka "berpayung", yang memahami arti tembakau bagi masyarakat setempatnya, tidak mempermasalahkan rokok, mereka tentu tidak merasa harus berhenti merokok atau menanam tembakau.

Beberapa petani sudah mendengar isu-isu tentang pengalihan ke tanaman lain. Sebagian besar keberatan dengan anjuran tersebut, karena belum ada komoditas yang terjamin dapat menggantikan tembakau.

> Selama pabrik rokok masih ada, (petani) akan terus tanam *mbako,* kecuali kalau pabrik rokok tutup... Pengurangan (tembakau) sesungguhnya merugikan kesejahteraan kami.... (Wawancara dengan Swt, pengepul tembakau, dalam FGD, 21 Februari 2011)

TERJEPIT REGULASI DAN FATWA MUI

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang akan memangkas habis pendapatan hasil pertanian tembakau, menimbulkan sejumlah tanda tanya di Pamekasan. Tak mengherankan, karena di wilayah ini begitu banyak warga yang menggantungkan kehidupannya pada tembakau. Kadiskes Pamekasan (wawancara, 23 Februari 2011) bahkan menyampaikan:

> Memang sulit mengatakan penyakit yang diderita seseorang itu akibat kebiasaan merokoknya atau bukan. Efek merokok memang tidak bersifat langsung terhadap kesehatan; dalam jangka waktu yang lama baru terlihat. Tetapi, misalnya seseorang terkena (penyakit) jantung, sulit juga mengatakan itu akibat rokok karena bisa saja itu akibat keturunan atau sebab yang lain.

Dibandingkan komoditas lain, pemerintah Kabupaten Pamekasan lebih banyak mengeluarkan kebijakan mengenai tembakau; mulai dari Perda mengenai pemurnian tembakau Pamekasan hingga soal tata niaga. Tembakau memang menjadi andalan penggerak ekonomi Pamekasan, terlebih sektor ini melibatkan lebih dari separuh total populasi, yang berarti bahwa hampir semua angkatan kerja terserap dalam sektor pertembakauan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2004 juga telah mengeluarkan Perda tentang pengendalian garam yang tidak beriodium.

Pertanyaannya adalah apakah kebijakan-kebijakan tersebut sudah mencerminkan upaya pemerintah dalam mengangkat posisi petani yang lemah dalam perdagangan? Untuk komoditas tembakau, adanya tim pemantau dalam urusan perniagaan ternyata tidak menjamin hilangnya praktik-praktik kecurangan yang dilakukan para tengkulak, penyalur, maupun pemilik gudang. Pada tahun 2009 bahkan pernah terjadi kasus pengusiran tim pengawas oleh *grader* hingga hampir terjadi pemukulan (http://www.pamekasan.go.id, diakses 16 Februari 2011). Terkadang, anggota tim pengawas juga bermain mata dengan pemilik gudang, seperti

diungkap oleh seorang mantan ranting (wawancara dengan informan X, 22 Februari 2011):

> Masak ada pengawas kok datang ke gudang duduk-duduk santai bukannya mengawasi. Sama saja, mereka pasti dibayar agar tidak melaporkan kecurangan gudang.

Upaya pemerintah untuk memotong rantai niaga yang panjang melalui program kemitraan dengan perusahaan ternyata juga tidak menguntungkan petani. Selain tidak ada kontrak tertulis antara petani dengan perusahaan, petani justru ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah seolah sebagai buruh perusahaan. Respon petani juga negatif terhadap program ini, kecuali petani yang memiliki hubungan dekat dengan karyawan perusahaan. Seorang buruh tani tembakau Desa Tambung (FGD, 22 Februari 2011) misalnya, mengungkapkan:

> Justru lebih untung *nggak* ikut kemitraan. Petani yang ikut kemitraan biasanya *nggak* bisa menjual ke luar, sementara harga di luar lebih tinggi, *kan* jadinya rugi petani.

Pendapat sebaliknya dikemukakan Klebun Desa Tambung (wawancara, 15 Februari 2011).

> Pola kemitraan Gudang Garam ini bagus. Petani bisa dapat bibit dan pupuk gratis, meski nanti dipotong hasil penjualannya. Tetapi tetap lebih baik karena terjamin semuanya. Dua hektar tanah kas desa ini

> juga kami sewakan untuk uji coba pola kemitraan GG untuk bibit Virginia.

Selain perkara perniagaan yang kompleks, pemerintah Kabupaten Pamekasan juga melihat keterpurukan petani tembakau akibat nilai jual yang terus anjlok; tidak hanya karena faktor alam tetapi juga karena produksi yang melimpah. Menurut Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian (Kabid Tanaman Pangan Distan), daerah sawah seharusnya tidak ditanami tembakau, tetapi masyarakat tetap menanaminya, akibatnya produksi melimpah sementara kualitas menurun. Ini karena dulu tembakau pernah mencapai masa keemasan hingga ada sebutan daun tembakau adalah "daun emas", sehingga para petani menjadi tergiur menanam tembakau (wawancara dengan Kabid Tanaman Pangan Distan, 18 Februari 2011). Hal yang sama juga dikemukakan Kadishutbun (wawancara, 24 Februari 2011):

> Kami terus menghimbau para petani untuk menanam bibit Prancak 95 yang murni bibit Madura, terutama untuk daerah gunung dan tegal, sedangkan daerah sawah sedikit demi sedikit akan kami kurangi, dan kalau ditanam ya tanam tembakau *krosok* saja.

Selain mengurangi jumlah penanaman tembakau, terutama untuk daerah sawah, pemerintah Kabupaten Pamekasan juga berupaya melakukan diversifikasi produk tembakau. Hal ini terungkap dalam pernyataan Kadisperindag berikut (wawancara, 24 Februari 2011):

Kami masih membuat *bussiness plan* untuk mengetahui potensi pasar alternatif produk tembakau selain rokok. Yang sedang kami uji coba sekarang terutama adalah untuk pembuatan parfum minyak atsiri. Selain itu, dapat juga untuk pupuk dan bahan kosmetik.

Kita juga dapat menjumpai sebuah baliho besar milik Bagian Administrasi Perekonomian Pemkab Pamekasan di sisi alun-alun sebelah timur yang memberi penjelasan diversifikasi produk-produk dari bahan tembakau. Tidak hanya melalui diversifikasi, pemerintah daerah juga berupaya melakukan konversi tanaman tembakau. Hal ini terungkap dalam pernyataan Kabid Tanaman Pangan Distan (wawancara, 18 Februari 2011):

> Kami hanya bisa melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada petani untuk bisa menanam padi paling tidak dua kali dalam setahun. Selain itu, juga menghimbau kepada petani untuk menanam tanaman lain yang lebih tidak berisiko daripada tembakau.

Kepala Desa Tambung ternyata juga mendukung upaya pemerintah ini, menurutnya:

> Kalau ada tanaman yang lebih baik daripada tembakau, saya akan sarankan itu pada warga, karena tembakau selama ini terus merugikan. Tidak pernah untung petani itu. Masalahnya lahan di sini *kan* tadah hujan.

Tabel 6.6.
Peran Pemerintah dalam Pertanian Tembakau dan Garam di Pamekasan

Kegiatan	Tembakau	Garam
Pratanam (modal)	Dishutbun pada bulan ke-5 pada masa tanam menyediakan bibit tembakau gratis kepada petani dalam jumlah yang terbatas	Pembentukan Insitut Garam Indonesia di Pamekasan bertujuan untuk melakukan penelitian dan intensifikasi demi meningkatkan mutu garam rakyat
Pembinaan (masa tanam)	Dishutbun sejak 2008 melakukan kerjasama dengan HM Sampoerna dalam melakukan pembinaan kepada petani pada masa tanam tembakau. Ini terutama dilakukan pada petani yang menanam bibit *Prancak 95* rekomendasi Balittas	Disperindag melakukan pembinaan kepada petambak garam agar dapat menghasilkan garam super premium untuk kebutuhan konsumsi dan industri
Tata niaga (panen dan penjualan)	Perda 24/2008 tentang Budidaya Tembakau ditujukan untuk membentuk pola kemitraan antara petani-pabrik dalam rangka memangkas rantai niaga yang panjangPerda 6/2008 tentang Tata Niaga Tembakau melahirkan Komisi Usaha Tembakau Pamekasan yang berwenang melakukan penyelidikan kecurangan dalam tata niaga tembakau. Ada juga tim pemantau yang khusus dibentuk untuk mengawasi proses tata niaga di gudang	Pembentukan Komisi Garam Pamekasan bertujuan untuk melakukan pendampingan kepada petambak garam dan pengusaha garam agar menciptakan tata niaga yang menguntungkan kedua pihak Perda 21/2004 tentang Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beriodium

Sumber: diolah dari hasil wawancara, studi dokumen.

Akan tetapi, seorang petani tembakau dalam FGD (22 Februari 2011) mengungkapkan bahwa *"Sulit untuk menganti komoditas lain, pasarnya kan tidak jelas. Kalaupun rugi, sulit untuk membuat kami pindah ke tanaman lain."*

Terpuruknya nasib para petani tembakau ini ternyata tidak hanya menjadi perhatian pemerintah. Ada ormas yang juga peduli terhadap mereka, meskipun masih elitis. Asosiasi Petani Tembakau Pamekasan (APTP) adalah organisasi

yang mewadahi para petani tembakau dalam menyuarakan kepentingan mereka terhadap pemerintah maupun perusahaan. Sayangnya, organisasi ini cenderung elitis (wawancara dengan ketua KUTP, 21 Februari 2011). Di Pamekasan wadah ini tidak banyak diketahui warga. Seorang partisipan (FGD, 22 Februari 2011) mengungkapkan:

> Tidak ada organisasi yang memperjuangkan kepentingan kami. Saya tidak tahu apa itu APTP. Menurut saya, seharusnya untuk menjembatani kepentingan petani dengan perusahaan hidupkan saja kembali koperasi.

Namun, adapula yang melihat organisasi ini merupakan sarana efektif yang dapat menjembatani petani tembakau, pemerintah, dan pabrik rokok. Saat ada penyuluhan budidaya pertanian tembakau, misalnya, pihak pemerintah biasanya akan mengundang APTP. Contoh lain, dalam uji coba kemitraan antara Dishutbun dengan Sampoerna, Kadishutbun cukup memanggil APTP untuk meminta pendapat dari kelompok petani. Menurut Kadishutbun (wawancara, 23 Februari 2011), *"Untuk kontak dengan petani kan sudah ada APTP, jadi lebih mudah bagi kami komunikasinya, termasuk dalam uji coba pola kemitraan dengan Sampoerna ini."*

APTP sendiri muncul dalam rangka merespon UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dianggap tidak hanya merugikan kepentingan petani tembakau, tetapi juga kepentingan perusahaan rokok. Ketua APTP (wawancara, 18 Februari 2011) mengakui bahwa organisasi yang dike-

tuainya baru berdiri saat ramainya perdebatan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

> Asosiasi ini memang muncul terkait dengan UU Kesehatan, untuk merespon itu. Petani tembakau dirugikan dengan kebijakan itu, tembakau selalu dijadikan kambing hitam penyakit jantung, padahal minyak kedelai itu lebih berbahaya.

Ketika ditanya mengenai kebijakan pembatasan tembakau yang didasari alasan kesehatan, sangat sedikit petani yang mengetahui korelasi kampanye kesehatan antirokok dengan pembatasan tembakau yang akan berpengaruh pada nasib mereka. Mereka mendengar pendapat sebagian pakar kesehatan bahwa merokok itu merusak kesehatan dan perlu dikurangi sedikit demi sedikit hingga berhenti. Tetapi mereka juga menyaksikan kakek nenek mereka sejak dulu merokok dan berumur panjang, serta tidak memiliki riwayat penyakit seperti yang kerap dituduhkan kepada para perokok. Uniknya, tidak satu pun petani yang setuju bila rokok dilarang atas dasar haram. Betapa tidak, para petani tembakau, yang hampir semuanya adalah warga *nahdliyyin*, menumpukan hidupnya pada tembakau.

KIPRAH NU DALAM MERESPONS KEBIJAKAN PENGENDALIAN TEMBAKAU

Para aktivis NU, baik di pusat maupun daerah, cukup dekat dengan petani, termasuk petani tembakau. Di tingkat pusat, misalnya, ada Maksoem Mahfoedz, salah satu Ke-

tua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang rajin menyoroti kebijakan pemerintah di sektor perberasan. Dalam berbagai forum, dengan argumentasi yang tajam, ia kerap membela petani padi. Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU, pun dalam beberapa kesempatan menunjukkan simpatinya terhadap perjuangan para petani tembakau untuk mendapatkan hak-hak bertaninya secara layak dan wajar. Begitu juga dengan As'ad Said Ali, Wakil Ketua Umum PBNU yang asli Kudus. Ia berpendapat tentang lemahnya perlindungan pemerintah terhadap industri tembakau:

> Pada 1960-an orang tua saya cukup kaya, punya puluhan truk untuk menopang usaha keluarga di bidang industri tembakau. Tapi sejak 1970-an usaha itu makin menurun dan mati akibat regulasi pemerintah yang tidak memihak. Mestinya pemerintah tidak begitu, mestinya usaha rakyat bisa makin maju. (Wawancara Asad Said Ali, 30 Maret 2011)

Secara khusus, melalui forum *bahtsul masail,* NU merespons kegelisahan para petani berkaitan dengan kebijakan pengendalian tembakau yang dilakukan pemerintah. Pada 23 Februari 2011, Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) membahas hukum merokok. Para kiai yang hadir dalam forum tersebut di antaranya K.H. Dr. Ahmad Yasin Asmuni (Kediri), K.H. Arwani Faishal (Jakarta), K.H. Zulfa Mustofa (Jakarta), K.H. Ahmad Ishomuddin (Lampung), K.H. Nadjib Hassan (Kudus), K.H. Romadlon Chotib (Semarang), K.H. Busro Musthofa (Semarang), dan K.H. Imam Abi Jamroh.

Dalam forum tersebut, setelah mendengarkan penjelasan para pakar kesehatan dan melakukan investigasi, LBM PBNU akhirnya memutuskan bahwa hukum merokok adalah *mubah*, yang lalu disahkan dalam rapat Syuriyah PBNU pada 9 Maret 2011. Keputusan tersebut didasarkan pada *hukm al-ashl* (hukum dasar) karena tidak ada dalil syar'i yang secara khusus menegaskan hukum merokok. Rokok bukanlah benda memabukkan. Selain itu, kandungan radikal bebas yang secara medis dikategorikan berbahaya dapat menjadi netral oleh antioksidan yang terkandung dalam sayur-sayuran dan buah-buahan serta oleh sistem kekebalan tubuh. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa merokok tidak menyisakan kemudaratan. Hal ini terbukti pula pada kondisi kesehatan para perokok yang cukup baik, padahal selama puluhan tahun mereka aktif merokok. Bahkan merokok juga membawa manfaat, seperti menciptakan ketenangan, membangkitkan konsentrasi atau daya berfikir, dan bahkan menjadi obat dibalik adanya kemudaratan yang dapat menjadi netral atau luntur.

Menurut keputusan LBM PBNU, rokok yang terbukti tidak memabukkan atau membahayakan bagi orang tertentu (tidak bersifat umum), tidak layak dikenakan status haram secara umum. Di lain pihak, penetapan hukum haram yang tidak atas dasar *ittifaq* (kesepakatan pendapat) di kalangan ulama karena berdasar pada dalil atau bukti yang tidak kuat wajib dihindari apabila dapat menimbulkan kemudaratan, seperti kerugian ekonomi bagi rakyat dan negara. Hal ini berbeda dengan benda yang hukumnya haram atas dasar *ittifaq*, seperti *khamr*, yang tentu saja status hukumnya tetap haram meskipun berakibat pada merosotnya perekonomian rakyat dan negara. Dengan kata lain, hukum

haram *khamr* tersebut tidak akan berubah menjadi mubah (boleh) meskipun membawa peningkatan ekonomi bagi rakyat dan negara. Adapun mengenai kemudaratan yang *mauhumah* (kecil dugaan/tidak jelas) atau kemudaratan ringan akibat merokok, selayaknya penetapan hukumnya adalah makruh. Selanjutnya, jika terdapat manfaat, hukum makruh itu dapat berubah menjadi mubah (boleh).

LBM PBNU sendiri berpandangan bahwa hukum merokok adalah makruh bagi orang tertentu apabila *mauhumah* (kecil dugaan/tidak jelas) dapat menimbulkan kemudaratan, *muhaqqaqah* (terbukti) mendatangkan kemudaratan ringan, dan atau karena aroma asap rokok dapat mengganggu orang lain. Hukum merokok bisa juga haram bagi orang tertentu apabila diyakini atau *muhaqqaqah* (terbukti) membawa kemudaratan cukup besar, misalnya bagi pasien yang meyakini atau telah terbukti bahwa penyakitnya semakin parah karena merokok.

Upaya lain yang dilakukan NU adalah Rembug Nasional Lembaga Pengembangan Pertanian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta pada 22-25 April 2011. Walaupun sebagian petani *manut* saja terhadap kebijakan itu, mereka pada dasarnya menyimpan kegundahan. Di lain pihak, mereka tak punya kekuatan. Juga akses untuk menyampaikan kegundahan tersebut kepada elit nasional. Karenanya, rembug nasional yang diselenggarakan NU menjadi semacam celah kecil bagi para petani (dan pedagang tembakau) untuk menyampaikan aspirasi mereka berkaitan dengan kebijakan pembatasan tembakau.

Beberapa ketua LPPNU yang daerahnya menjadi kantong petani tembakau memanfaatkan rembug nasional tersebut untuk menyuarakan aspirasi petani tembakau di da-

erahnya. Kepada perwakilan pengusaha rokok yang sengaja didatangkan dalam forum tersebut, mereka mempertanyakan wujud sinergi perjuangan antara petani tembakau dengan pengusaha rokok. Menurut mereka, selama ini, petani merasa masih sendirian dalam memperjuangkan eksistensi tembakau di Indonesia. Mereka merasa belum melakukan komunikasi intensif dengan pihak pengusaha perihal strategi dan taktik dalam memperjuangkan eksistensi tembakau di Indonesia (wawancara dengan IP, pengurus LPPNU, 23 Oktober 2010).

Keluhan para aktivis pertanian NU tersebut mendapatkan tanggapan dari SMS, salah seorang perwakilan pengusaha rokok. Menurutnya, kalangan pengusaha telah melakukan upaya-upaya demi memperjuangkan eksistensi tembakau di Indonesia, baik di tingkat lokal maupun internasional. Di tingkat lokal, misalnya, telah diupayakan agar petani tembakau mengarah menjadi petani yang mempunyai nilai ekonomi dan kemandirian. Caranya dengan alih teknologi dan berorientasi bisnis.

7

TEMBAKAU, UNTUK PERTANIAN INDONESIA

Demikianlah. Lima daerah yang diteliti memiliki wajah pertanian tembakau yang beragam. Akan tetapi, kelimanya memiliki satu keseragaman, pertanian tembakau membawa manfaat yang tak tergantikan bagi daerah-daerah tersebut. Di Sumedang, Demak, dan Malang, luas lahan pertanian tembakau memang berada di bawah komoditas utamanya, namun permintaan pasar yang tinggi memungkinkan tanaman ini menjadi salah satu sendi masyarakatnya. Di dua daerah lainnya, Temanggung dan Pamekasan, lebih-lebih lagi; tembakau merupakan komoditas unggulan yang kontribusinya amat besar terhadap PDRB.

Kita bisa melihat di Temanggung, luas lahan tembakau memang di bawah luas lahan jagung dan padi, namun apabila disandingkan dengan kedua komoditas pangan utama Indonesia ini, tembakau tetap memiliki nilai ekonomis yang kompetitif. Di Temanggung sendiri pertanian tembakau merupakan tulang punggung perekonomiannya. Perputaran uang pada masa panen tembakau yang nyaris menyentuh angka Rp 900 miliar merupakan fakta yang tak terbantahkan. Adapun perkebunan kopi, komoditas andalan lain

yang menjadi pembandingnya, omzetnya hanya Rp 60 miliar. Lebih dari setengah penduduk Temanggung terlibat dalam perekonomian tembakau.

Belum lagi kalau kita menghitung alokasi DBHCHT yang menjadi sumber PAD signifikan bagi daerah-daerah tersebut. Di Malang, penerimaan DBHCHT mencapai Rp 28 miliar. Di Pamekasan, DBHCHT mencapai Rp 23 miliar, terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Kediri dan Malang. Padahal di Pamekasan tidak terdapat pabrik rokok besar seperti di dua kota tersebut. Perputaran uang dari pertanian tembakau di Pamekasan mencapai Rp 497,5 miliar. Bandingkan dengan pertanian garam, sektor pertanian dominan lainnya di wilayah ini, yang kontribusinya hanya mencapai Rp 24,4 miliar.

Meskipun di Sumedang, Demak, dan Malang, kontribusi tembakau tidak dapat dibandingkan dengan dua wilayah lainnya dalam studi ini, khususnya karena luas lahannya yang tidak begitu besar, namun komoditas ini memiliki nilai pada level yang lebih mikro, yaitu perekonomian keluarga para petani, selain juga secara geografis wilayah-wilayah ini memang sangat cocok untuk pengembangan tembakau. Sumbangan pertanian tembakau bagi kesejahteraan petani di Sumedang bahkan lebih besar dibandingkan dengan pertanian padi. Dalam jangka waktu enam bulan, petani tembakau di Demak dapat menghasilkan Rp 16 juta. Sedangkan petani pembandingnya, petani padi dan jagung, menghasilkan Rp 6-7 juta selama 3 bulan. Di Temanggung penghasilan petani tembakau bisa mencapai dua kali lipat dari petani kopi. Di Malang pendapatan dari pertanian padi hanya mencapai Rp 14 juta, tebu Rp 10 juta, sedangkan tembakau bisa mencapai Rp 60 juta.

Tak mengherankan jika kemudian pertanian tembakau membentuk ritual-ritual tradisi dan memberi wajah kebudayaan di berbagai wilayah. Di Sumedang ada hajat bumi; di Demak ada haul memohon penanda untuk menanam tembakau; di Temanggung ada *nyecel*, *nglekasi*, sampai *wit*; di Malang ada pemilihan hari baik; di Pamekasan perayaan-perayaan Islam tak pernah lepas dari perekonomian tembakau. Tradisi-tradisi ini tak lain menunjukkan keterikatan masyarakat setempat kepada komoditas-komoditas yang ditanam. Tembakau telah menjadi organ-organ dalam dari kehidupan mereka.

Namun, sebagai komoditas berdaya jual tinggi, tembakau kerap berhadapan dengan aneka problematika, yang dalam banyak hal merupakan cerminan dari persoalan yang melilit sektor pertanian Indonesia. Di Temanggung persoalan modal menjerat petani tembakau, sehingga mereka terkungkung dalam jaringan rentenir. Di Malang, meskipun pertanian tembakau memberikan pendapatan yang tinggi, namun fluktuasi harga menjadi kendala. Pendapatan tinggi tersebut dapat anjlok sewaktu-waktu. Di Pamekasan, sempitnya lahan tembakau memperkeruh situasi para petani tembakau kecil, yang masih harus berhadapan dengan sistem perniagaan yang kerap tak menguntungkannya.

Ironisnya, dalam keadaan demikian, negara (pemerintah pusat) justru hendak menerapkan pengendalian tembakau yang bahkan tidak pernah diidentifikasi sejauh mana rembetan ekses negatifnya. Namun, terkesan berhadapan bahkan bertentangan dengan pemerintah pusat, instansi pemerintah setempat dalam beberapa kasus justru berusaha membantu pertanian tembakau. Di Sumedang, pertanian tembakau mendapat pendampingan, mulai dari penyediaan

saprodi sampai pendaftaran tembakau *mole* sebagai produk khas Sumedang. Di Demak, pemerintah setempat membantu memfasilitasi pabrik rokok dengan petani tembakau. Di Temanggung, pemerintah mencoba membantu petani, baik dari segi *on farm* maupun *off farm*, serta menyarankan konservasi alam. Di Malang, pemerintah membantu dengan mendorong dibentuknya kelompok-kelompok tani yang kemudian didampingi PPL, walaupun hal itu masih dianggap formalisme semata. Adapun di Pamekasan, petani mendapat bantuan, baik berupa bibit maupun fasilitasi dengan pihak pabrik, meski sebagian mengeluhkan tidak terasanya dampak positif dari kebijakan ini.

Sayang sekali, meski aneka problematika yang dirasakan petani ini nyata, tetap saja negara ini tampak tak berpihak kepada mereka. Petani pada tingkat bawah masih belum mendapatkan rasa aman dalam menjalankan profesinya. Lahan mereka kian menyempit. Urusan permodalan, seperti yang terjadi di Temanggung, diserahkan kepada rentenir yang siap menjerat mereka dengan bunga mencekik. Belum ada instrumen permodalan yang memberikan jaminan kemudahan dan keamanan kepada petani. Pemerintah setempat memang memberikan penyuluhan pertanian. Sayangnya, ini masih bersifat formalistik dan tidak memberikan manfaat konkret kepada petani. Selain itu, dalam kasus Temanggung, pupuk belum terjangkau petani. Merek yang ada terlalu mahal dan tidak ada alternatif.

Perlindungan dan penyediaan fasilitas pada masa pascapanen amat dibutuhkan petani. Petani tembakau seringkali mengalami ketidakpastian harga. Harga kerap kali anjlok dan menghenyak petani. Ditambah lagi, di Jawa lahan pertanian cenderung kian menyempit. Urbanisasi tenaga kerja

muda dari desa ke kota terjadi dalam skala yang masif, sementara kesiapan sektor di luar pertanian untuk menampung tenaga kerja juga masih diragukan kapasitasnya.

Idealnya, negara agraris seperti Indonesia harus menjadikan petani sebagai subjek utama dalam pembuatan kebijakan. Namun negara, dari paparan panjang lebar buku ini, kelihatannya tak memadai dalam menyediakan bibit unggul dan pupuk yang murah, lambat dalam membantu petani untuk mengatasi iklim tak tentu yang mengganggu proses tanam, belum berhasil membangun sistem perniagaan yang lebih adil bagi petani, dan sebagainya. Kebijakan pengendalian tembakau kian menegaskan ketidakpedulian negara terhadap hak sosial-ekonomi para petani tembakau ini.

Dengan uraian tersebut, maka ada tiga hal yang mesti dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan tembakau. Pertama, kebijakan itu tak boleh mengawang dari kondisi sosial-ekonomi Indonesia yang konkret; tak boleh ahistoris; tak boleh menafikan karakter bangsa Indonesia sebagai masyarakat agraris. Bagaimanapun, data statistik memperlihatkan bahwa pertanian merupakan denyut nadi Indonesia. Celakanya, sektor pertanian selama ini tak diurus dengan baik oleh negara, bahkan ditinggalkan dan dihimpit. Kebijakan negara di sektor pertembakauan, sebagai salah satu bagian dari sektor pertanian, sebagaimana yang ditunjukkan buku ini, memperlihatkan kepada kita bagaimana negara secara sistematis hendak menghabisi penghidupan sekian banyak warganya sendiri.

Kedua, dalam pembangunan pertanian, termasuk penataan pertanian tembakau, negara mesti berperan secara optimal, mulai dari hulu hingga hilir. Negara harus membantu petani dalam menyediakan bibit unggul, pupuk,

dan obat hama yang murah, bantuan modal, diversifikasi produk, proteksi terhadap serbuan komoditas pertanian asing, pengawasan perniagaan produk pertanian, dan sebagainya. Pemerintah di negara-negara industri sangat berperan dalam menata dan menopang sektor pertaniannya, bahkan melakukan proteksi di tengah tren globalisasi yang antiproteksi. Jika pemerintah di negara-negara industri maju saja berperan seperti itu, mengapa Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris justru berkelakuan sebaliknya?

Ketiga, taruhlah semua pihak sepakat bahwa rokok, yang bahan baku pentingnya adalah tembakau, merusak kesehatan, maka kebijakan yang paling realistis untuk mengatasinya adalah penguatan sosialisasi bahwa rokok merusak kesehatan. Rekomendasi LBM PBNU tentang hal ini patut disimak. Menurut lembaga *think tank* PBNU tersebut, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk melakukan penelitian mengenai dampak merokok secara *population based* (berdasarkan masyarakat secara umum), bukan sekadar *hospital based* (berdasarkan pasien rumah sakit secara khusus), sehingga akan diperoleh hasil yang akurat dan adil. LBM PBNU juga merekomendasikan agar setiap perokok memperhatikan orang di sekelilingnya ketika hendak merokok, sehingga tidak mengganggu orang lain yang tidak tahan asap rokok.

Walhasil, para petani tembakau menginginkan agar kebijakan pengendalian tembakau tidak membunuh tikus di lumbung padi dengan cara membakar habis lumbung tersebut. Cara "membakar" mungkin menyelesaikan satu persoalan, tetapi menimbulkan persoalan lain yang jauh lebih mengerikan, sebab yang mati bukan cuma tikus; si pemilik lumbung pun mati kelaparan.

EPILOG

HARUSKAH PETANI TEMBAKAU MATI DI TANGAN PENGELOLA GLOBALISASI?

Dr. Hanneman Samuel

Setelah membaca hasil-hasil penelitian yang mengungkap dinamika dan persoalan sosial petani tembakau, yang diperlukan adalah merangkainya dalam satu bingkai yang utuh; saya hendak membingkainya dalam perspektif globalisasi, *the bigger picture* dari kehidupan petani tembakau. Berangkat dari sinilah, epilog tulisan ini disusun.

Ketika Washington Consensus dicetuskan pada tahun 1989, seperangkat rekomendasi kebijakan dari lembaga-lembaga yang berlokasi di jantung Amerika Serikat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara Amerika Latin, terbersit adanya harapan baru untuk meningkatkan taraf hidup ratusan juta kehidupan di Dunia Ketiga. Liberalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, resep Washington yang kemudian menjadi kebijakan perekonomian berbagai negara di dunia, dianggap bisa membongkar kebobrokan negara: korupsi, kolusi, nepotisme. Apa yang terjadi setelah dua dekade liberalisasi ekonomi dan keuangan berlangsung? Tentunya tidak sedikit orang Indonesia dan orang dunia ketiga yang menikmati liberalisasi. Sayangnya, masih banyak yang belum menikmatinya. Bahkan, mungkin, menjadi korban liberalisasi.

Salah satunya korbannya, petani. Tata dunia neoliberal berlaku keras terhadap petani Dunia Ketiga; negara-negara yang mengikuti resep ekonomi Washington dituntut menghapus subsidi untuk petani, yang pada akhirnya menempatkan mereka dalam kompetisi yang amat timpang menghadapi produk-produk pertanian negara maju. Belum lagi, di negara seperti Indonesia, *global warming* dan ketidakpastian hukum merupakan momok yang sangat nyata mengancam mereka. Perdagangan antarnegara yang adil masih merupakan sesuatu yagn jauh dari jangkauan para petani Indonesia.

Buku ini sendiri secara tajam dan khusus menukik perhatian kita ke kalangan petani yang paling rentan menjadi korban liberalisasi ekonomi: petani tembakau. Berbeda dengan di era Orde Baru, petani tembakau sama sekali tidak terlindung di era neoliberal. Berbagai halangan mereka alami. Tidak ada kemudahan akses ekonomi yang mereka peroleh. Bahkan, mereka mengalami proses marginalisasi yang lebih mendalam dibandingkan dengan petani komoditas lainnya. Kegalauan petani beras, misalnya, lebih mudah menjadi isu publik ketika media massa menayangkan kekeringan yang mereka alami. Simpati atas penderitaan mereka pun mengalir, termasuk dari Kementerian Pertanian. Bahkan pemerintah, melalui Menteri Pertanian, berjanji untuk memberikan ganti rugi.

Mengapa para petani tembakau ini mengalami diskriminasi, meski mereka juga warga negara Indonesia seperti halnya para petani beras? Dilihat dari kontribusi mereka yang dipaparkan dalam buku ini, keberadaan mereka sendiri merupakan sumbangan ekonomi yang sangat berharga bagi Indonesia. Belum lagi di wilayah-wilayah yang mengandal-

kan tembakau seperti Temanggung, kehidupan sosial dan kebudayaannya bertumpu pada pertanian tembakau—tanyakan kapan warga di wilayah tersebut menggelar hajatan-hajatan yang menjaga silaturahmi di desa, kemungkinan mereka akan menjawab "setelah panen tembakau".

Mengapa para petani tembakau tersebut kini bahkan makin dipojokkan dengan regulasi tembakau yang tidak sensitif dengan kehidupan para penopang perekonomian Indonesia ini? Kita pun bertanya-tanya, ke manakah negara, sang pengelola globalisasi, berpihak? Prasangka-prasangka spekulatif bahwa negara berpihak ke kepentingan korporasi asing yang diuntungkan dengan melemahnya pertanian tembakau di Indonesia kemudian berkembang; meski saya sendiri tidak hendak berspekulasi demikian, tetapi pelemahan sistematis petani tembakau merupakan preseden yang terang dari tenggelamnya pertanian Indonesia di bawah tata dunia neoliberal. Pesan yang paling jelas: negara tidak sanggup melindungi tonggak-tonggak perekonomiannya sendiri, lemah di hadapan globalisasi yang terus bergerak dengan kecepatan tinggi.

Keterlibatan negara yang terlalu besar dalam satu sektor memang berpotensi menimbulkan korupsi wewenang, dan itulah pelajaran yang kita ambil dari penyimpangan-penyimpangan masif pada masa Orde Baru. Tetapi, negara misalnya dapat memperkuat dan memfasilitasi petani tembakau dalam jaringan tata niaganya. Selama ini wilayah tersebut sama sekali dibiarkan, dilepaskan negara, sehingga petani yang merupakan kekuatan produksi paling vital dalam perekonomian tembakau justru berada pada posisi yang rentan—apalagi bila komoditas ini mengalami fluktuasi atau terjembab. Memberikan sentuhan, dalam kadar

yang tepat, dan guna memberikan kesempatan yang setara kepada warganya, adalah tugas para pengelola globalisasi saat ini—negara.

Globalisasi hanya dapat dihadapi dan digarap untuk kemaslahatan Indonesia hanya ketika kita mengenal diri kita sendiri dengan baik. Selama ini negara telah melakukan hal-hal yang tak pantas dilakukan oleh pelaksana mandat rakyat negeri agraris, dan secara khusus negeri para petani tembakau. Sekarang saatnya itu berubah. Jangan sampai para petani tembakau ini mati lantaran para pengelola globalisasi yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. 2010. *Temanggung dalam Angka.*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan. 2010. *Pamekasan dalam Angka.*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang. 2010. *Sumedang dalam Angka.*

Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Temanggung. *Tanggapan dan Masukan serta Sikap Pemkab Temanggung terhadap RUU Pengendalian Dampak Tembakau terhadap Kesehatan.*

Disperindag Kabupaten Pamekasan. 2009. *Laporan Evaluasi Kegiatan DBHC Tahun 2009.*

Hamilton, Wanda. 2010. *Nicotine War.* Yogyakarta: Insist Press.

Kementrian Keuangan RI. *Permenkeu No.66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.*

Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban Bupati Sumedang. 2010.

Pemerintah Kabupaten Sumedang. *RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013.*

RPJMDes Desa Tambung Kecamatan Pademawu. 2009.

Topatimasang, Roem, Puthut Ea, dan Hasriadi Ary. 2010. *Kretek: Kajian Ekonomi dan Budaya 4 Kota*. Jakarta: Indonesia Berdikari dan Spasimedia.

ARTIKEL, LAPORAN, DAN KARYA ILMIAH

Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat. 2009. "Program Pemasaran Hasil Produksi: Kegiatan dan Pengembangan Pemasaran Hasil di Kabupaten Malang." *Laporan Penelitian* (tidak diterbitkan).

Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat. 2000. "Tembakau Temanggung." *Monograf Balittas* No. 5 Malang: Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat.

Dishutbun Kabupaten Sumedang-APTI Sumedang. 2010. "Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis Tembakau Mole Sumedang.".

Rasyidah, Resa. 2009. "Profil Desa Pagelaran." *Makalah.*

Santoso, Thomas. 2001. "Tata Niaga Tembakau di Madura." Dalam *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* 3(2): 96-105.

SURAT KABAR

Jawa Pos, 2 Juli 2010.

------, 22 Agustus 2010.

Kompas, 27 Februari 2009.

------, 29 Februari 2009.

------, 14 Januari 2010.

------, 22 September 2010.
------, 24 November 2010.

INTERNET

BPS Jawa Timur. Agustus 2009. " Keadaan Ketenagakerjaan Jawa Timur." Diunduh 8 Maret 2011 (http://jatim.bps.go.id/wp-content/uploads/images/BRS-Agst_09_tenaga%20Kerja.pdf).

Epaper Media Indonesia. 19 Agustus 2010. "Sejarah Kebun Raya Purwodadi." Diunduh 12 Maret 2011 (http://www.mediaindonesia.com/mediatravelista/index.php/read/2010/08/19/1258/2/Sejarah-Kebun-Raya-Purwodadi).

"Farm Subsidies Over Time." (http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/graphic/2006/07/02/GR2006070200024.html)

Kapanlagi.com. Diunduh 4 Maret 2008.

"Komoditas Kopi Jawa Tengah." Diunduh 15 Maret 2011 (http://regionalinvestment.com/newsipid/commodityarea.php?ic=62&ia=33).

Kompas. 2011. "Liputan Khusus Kompas, Rantai Panjang Tata Niaga." Diunduh 13 Maret 2011 (http://www.kompas.com/tembakau/tulisan4.html).

Malang Lavalatte Photo and History. Diunduh 12 Maret 2011 (http://malangphotos.blogspot.com/2009/03/malang-lavalette-hospital-photos-and.html).

"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.07/2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010." Diunduh 12 Ma-

ret 2011 (http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2010/243~PMK.07~2010PerLamp.htm).

"Pertumbuhan Padi Sumedang." Diunduh 13 Maret 2011 (http://www.kompas.com/kompas-cetak/0302/03/nasional/107956.htm di Download 15/3/2011).

"Produksi Beras Sumedang." Diunduh 25 Februari 2011 (http://bataviase.co.id/node/488344).

Tauchit, Ahmad. 5 Maret 2010. "Rencana Pendirian Empat PG Baru: Dua Pabrik Gula 'Berebut' Wilayah Malang Barat." *Duta Masyarakat*. Diunduh 10 Maret 2011 (tamasyarakat.com/artikel-28090-dua-pabrik-gula-%C3%ABberebut%C3%AD-wilayah-malang-barat.html).

Tempo Interaktif. 20 Oktober 2008. "Seratusan Penganggur Dilatih Jadi Pengusaha Rokok." Diunduh 12 Maret 2011 (http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2008/10/20/brk,20081020-141112,id.html).

Tempo Interaktif. Diunduh 4 April 2011 (http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/12/21/brk,20101221-300604,id.html).

http://eur-lex.europa.eu/budget/data/D2010_VOL4/EN/nmc-titleN123A5/index.html

www.pamekasan.go.id, diunduh 12 Februari 2011.

PROFIL PENULIS

Abdil Mughis Mudhoffir menamatkan kuliah hukum di Universitas Brawijaya pada 2006 dan meraih gelar master di bidang sosiologi dari Universitas Indonesia pada 2008. Saat ini aktif sebagai dosen tetap di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Email: abdil.mughis@yahoo.com.

Abdul Aziz Muslim menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Sunan Ampel, Surabaya dan S2 di Program Pascasarjana Sosiologi UI. Sekarang ini aktif sebagai *associate* di LP3ES dan staf ahli anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Selatan. Email: amasaziz@yahoo.com.

Andi Rahman Alamsyah adalah lulusan S1 Jurusan Sosiologi FISIP UI tahun 1997 dan S2 Sosiologi UI tahun 2007. Saat ini tercatat sebagai staf pengajar tetap pada Departemen Sosiologi FISIP UI, peneliti di LabSosio FISIP UI, dan pengurus LTN PBNU. Email: rahmanega@yahoo.com, andi.rahman@ui.ac.id.

Audriane F. Sani menyelesaikan pendidikan sarjana kewilayahan untuk studi Jepang dan magister dalam bidang sosiologi di Universitas Indonesia. Saat ini adalah peneliti

independen untuk beberapa pusat kajian universitas dan konsultan penelitian. Email: audrisani@gmail.com.

Feri Suprapto menyelesaikan pendidikan S1 Sosiologi Universitas Indonesia pada 2010. Sekarang sedang aktif membantu beberapa program penelitian. Email: becax_04@yahoo.co.id.

Zaenal Abidin Ekoputro menamatkan studi S1 di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan S2 di Sosiologi Universitas Indonesia (UI). Saat ini adalah koordinator penerbitan, advokasi, dan penelitian pada Centre of Asian Studies (CENAS).

INDEKS

A

alat ekstraksi tembakau 155
antirokok 2, 4, 173

B

bandol 120-123
Banyumeneng vi, 11, 23-25, 58-62, 128-129, 151
Bentoel 45
buruh musiman 97
buruh pabrik rokok xviii, 2
buruh petik 57, 97
buruh tani 8-12, 52-56, 58, 78-84, 91-92, 94, 96-97, 103-104, 112-114, 116-117, 123, 128, 138, 148, 161, 168
buruh tani padi 79, 97
buruh tani tebu 80
buruh tani tembakau 8-11, 53, 58, 78, 91, 94, 96, 161, 168

C

cukai tembakau 17, 151, 152

D

DBHCHT 17, 20, 46, 52, 146-147, 155, 180
Dishutbun 10, 14-16, 18, 50, 146-147, 171-172
Distan 46, 149, 164, 169-170
Djarum 151

F

faktor cuaca 93
fatwa haram rokok 41, 158
FTI 3

G

gagal panen 48, 82, 85, 93, 147, 165
gaok 106
garam xix, xx, 12, 48-52, 91-94, 119, 123-124, 141, 167, 171, 180
garam impor xx
garam industri 124
garam konsumsi 124
garam rakyat 124, 171
garet 20, 66, 67, 99, 100
genjah sitieng 32
gerakan antitembakau 3, 41, 158
gober genjah kemloko 32-33
gober togog 32
grader 10, 65, 101, 107-108, 110, 116, 120-122, 167
GTI 14
Gudang Garam 12, 65, 151, 168
gudang induk 120-122
gudang pabrik rokok 65, 99, 149, 151
gudang pusat 121-122
gudang ranting 121
gudang tembakau 103

H

hajat bumi 127-128, 181
hama 74, 91, 93, 147, 161, 164, 184
Hindia Belanda 21

J

jalan usaha tani 154
jaringan sosial xvii, 5
Jatigede 13-14, 146

Jatiguwi 43, 45, 47, 78-79, 90, 112-113, 115-117, 134-136, 138-139, 163

K

Karangawen 21-22, 25, 68, 149-150
kebijakan pupuk subsidi 163
kelompok tani 10, 18, 86, 111, 117, 141, 147, 153-156, 161-163, 182
kemenyan 30, 134
kemitraan 88, 112, 118, 161, 168-169, 171-172
kesehatan 1-4, 6, 8, 90, 148, 165-167, 173, 175, 184
klembak 30
konspirasi 2, 145
kontroversi tembakau 3, 152
koperasi tembakau 103
kopi arabika 39
kopi robusta 39
kukrukan 59
kuli angkut 50, 52, 94
Kyai Munif Zuhri 128

L

labuh 24, 104
la nina 93
lingkaran setan 100
lintingan 50, 65, 95

M

makam keramat 127
makam Mbah Buyut Chasun 127
masa panen xviii, 31, 38, 40, 47, 51, 53, 69, 78-80, 104, 114-115, 135, 179
masa pascapanen 46, 77, 113, 182
masa pratanam 113-114, 118, 135, 141
masa tanam 20, 32, 52, 74, 91, 131-132, 135, 164, 171
mayoran 129
Mbah Hadi 128, 129
mbrujul 79
mekanisme buka/tutup gudang 122

metode tunda-simpan 53
moster 108
Mranggen 11, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 61, 64, 65, 67, 68, 98, 101, 102, 103, 149, 150, 152

N

negara agraris xvii, 4, 183-184
nglekasi 132, 181
nikotin 3, 146, 155, 156, 164
NRT 3

O

oblok 14
orientasi politik 126
ose 111

P

pabrik gula xx, 45, 117-119, 161, 164
pabrik kopi bubuk 111
pabrik rokok xviii, 2, 5, 12, 46, 50, 65, 95, 99-101, 103, 112, 116, 121, 149-151, 166, 172, 180, 182
Pakisaji 43, 115, 117
panen raya 50-52, 91, 93, 165
pasar bako omprongan 14
pasar tembakau 14, 20, 95
PDRB 17-18, 20, 23-24, 33-34, 43-44, 52, 77, 179
pedagang kecil 106
pedagang perantara kopi 72
pedagang tembakau 10, 41, 75, 161, 176
pemilik lahan 9-12, 27, 52, 56-58, 61, 78, 81, 88, 91-93, 95-96, 112-115, 119, 163
pemurni nikotin 155
pencuri kopi 112
pengecer 86, 88-89, 112, 117
pengendalian garam 167
pengendalian tembakau xv, 1-4, 6, 8-9, 143, 145, 155, 158-159, 174, 181, 183-184
pengepul 11, 78, 88-89, 95-97, 106, 109, 112, 116-117, 166

pengolah hasil tembakau 20, 96
pengrajin tembakau 50, 72
penyalur 92, 120-123, 167
penyewa lahan 9-10, 55
perekonomian tembakau 4, 119, 158, 180-181, 187
perusahaan farmasi global 3
Pesantren Giri Kusumo 129
petani garam xix, xx, 12, 50, 91, 93, 94, 124
petani kopi 11-12, 30, 39, 70-75, 77, 111-112, 134, 154, 180
petani padi 10-11, 53, 55, 92, 97, 135, 162, 164, 174, 180
petani penggarap 9, 11, 58-60, 81, 114-115, 135
petani tebu xx, 161
petani tegalan 38
petani tembakau xv, xvii, xviii, 2, 6, 7, 10-12, 23, 26-27, 30, 37, 39-41, 45, 47, 53-55, 57, 61, 63, 65-69, 72, 74-77, 79, 84-85, 88-91, 93-94, 97-98, 103-105, 110, 112-113, 119, 123, 129, 131-132, 134, 136, 141, 143-145, 148, 151, 154, 156-157, 159, 161-162, 164-165, 169, 171-174, 176-177, 180-188
petikan terakhir 34
petugas penyuluh pertanian 11, 128
pinjaman lunak 117
pola subtitusi 156
PPL 10, 21, 76, 103, 151-152, 161-162, 164, 182
proteksi xix, 77, 144, 184
pupuk 75, 86, 88, 98, 104-106, 113-115, 117, 147, 154, 161-164, 168, 170, 182, 183
pupuk kandang 75, 154
pupuk kimia 75
pupuk subsidi 105, 163-164
Pusat Agrobisnis Tembakau Jawa Barat 15

R

Ranting 12, 120, 122
regulasi rokok 151
rokok xviii, 1-3, 5-6, 12, 16, 30-31, 41, 46, 50, 65, 66, 82, 90, 95, 96, 99-101, 103, 112, 116, 121, 147, 149-151, 156, 158, 165-167, 170, 172-173, 175-177, 180, 182, 184
rokok rendah nikotin 156

S

Sampoerna 12, 65, 171-172
sektor perdagangan 17, 33
sektor perikanan 50
sektor pertanian xvii, 5, 13, 17, 23-24, 26, 29, 33-34, 42, 44, 52, 77, 80, 144-146, 155, 180-181, 183
sektor pertembakauan 16, 20, 51, 115, 143, 167, 183
sentra kopi 37
sentra tembakau 37
sesajen 134, 137
sistem borongan 63
sistem harian 27, 63
Sukun 65
Sumberejo 11, 23-27, 58, 61, 68, 129-130
Sumberpucung 44
Suseda 16
syukuran 134, 136, 138-139, 142

T

tanah bengkok 62
Tanjungsari 13-14, 95, 126, 148
tata niaga xx, 74, 77, 91, 94, 102, 167, 171
tata niaga tembakau 77, 91, 94, 171
tembakau garangan 30
tembakau Kedu 30
tembakau kering 27, 63, 65-66, 101
tembakau krosok 50, 169
tembakau mole 14-15, 95-96, 146, 182
tembakau rajangan 94
tembakau sawah 32, 72
tembakau srintil 105, 107
tembakau voor oogst 31
tengkulak 11, 64-67, 74, 94, 98-101, 103, 106, 111, 115-117, 123-124, 152, 162, 167
thariqah 128-129
Thariqah Khalidiyah Naqsabandiyah 128
Tomo 10, 13, 14
tukang cocok 109

tukang *tumplek* 108-109
tumpangsari 153, 156

U

Ujung Jaya 10, 13, 126-127
UU Kesehatan 164, 173

W

Waduk Kedungombo 22
WHO FCTC 1-3
wiwit 132, 134, 181

Z

zat adiktif 1, 41, 157, 165



"Cerita petani tembakau dalam buku ini idealnya dibaca oleh pemerintah, baik pihak eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dunia pertembakauan di Indonesia mempunyai cerita panjang. Pada cerita tersebut pemerintah ikut serta menjadi aktor, bahkan dalam konteks tertentu, menjadi sutradara. Selepas membaca buku ini mestinya pemerintah tidak lagi menambah cerita panjang kegetiran dunia pertembakauan di Indonesia melalui kebijakan dan segala peraturannya yang kontroversial. Masyarakat kelas bawah, terutama buruh pabrik rokok dan petani tembakau, sudah lama menginginkan ketenangan dan kesejahteraan hidup."

—DR. SAID AQIL SIROJ

"Mengapa para petani tembakau tersebut kini bahkan makin dipojokkan dengan regulasi tembakau yang tidak sensitif dengan kehidupan para penopang perekonomian Indonesia ini? Kita pun bertanya-tanya, ke manakah negara, sang pengelola globalisasi, berpihak? Prasangka-prasangka spekulatif bahwa negara berpihak ke kepentingan korporasi asing yang diuntungkan dengan melemahnya pertanian tembakau di Indonesia kemudian berkembang; meski saya sendiri tidak hendak berspekulasi demikian, tetapi pelemahan sistematis petani tembakau merupakan preseden yang terang dari tenggelamnya pertanian Indonesia di bawah tata dunia neoliberal."

—DR. HANNEMAN SAMUEL

FISIP UI Press

LTN PBNU

ISBN 978-979-1040-22-8